



LAPORAN KINERJA **INTERIM** Triwulan I **TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 triwulan I tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023.



Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai Besar POM di Surabaya dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2023 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target Triwulan I Tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada triwulan selanjutnya.

Surabaya, 18 April 2023

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Surabaya



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes. Epid.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis triwulan I pada tahun 2023 mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama. Dari 11 sasaran strategis yang dievaluasi, hanya 6 sasaran strategis yang bisa dievaluasi karena realisasi indikator dari 5 sasaran strategis lainnya belum tersedia atau baru dapat diperoleh sesuai penilaian di akhir tahun. Dari 6 sasaran strategis yang dievaluasi, diperoleh bahwa semua sasaran strategis memperoleh capaian “Memenuhi Ekspektasi”. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 106,67% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2023;
2. Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedua pada triwulan I tahun 2023, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya;
3. Belum ada capaian indikator sasaran strategis ketiga pada triwulan I tahun 2023, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya;
4. Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 108,35% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2023;
5. Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 115,10% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2023;
6. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 113,58% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam

meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2023;

7. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 120% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2023;
8. Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal;
9. Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesembilan, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal;
10. Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
11. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 116,35% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel pada triwulan 1 tahun 2023.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2023 antara 96,32% sampai dengan 220,13%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator "Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu" disebabkan karena Sistem ebpom untuk proses SKI bermasalah sehingga tidak dapat diakses pada waktu tertentu padahal sudah banyak pengajuan yang masuk. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator "Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik", hal ini disebabkan karena adanya program inovasi pendampingan UMKM pangan, obat tradisional, dan kosmetik sehingga capaian yang diperoleh sangat tinggi menyesuaikan dengan banyaknya permintaan dari stakeholder.

Pada tahun 2023 BBPOM di Surabaya melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan 3 kegiatan tidak efisien dan semua sasaran efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,58 (Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT) hingga 15,04 (Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman). Sedangkan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) 6 sasaran diperoleh bervariasi antara 0,17 hingga 0,70. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin

rendah ketidakefisienan yang terjadi. Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Surabaya didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 61.048.715.000,-. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2023 adalah Rp 8.243.135.482,- atau 13,50%.

BBPOM di Surabaya berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2023.

Surabaya, 18 April 2023

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Surabaya



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes. Epid.

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Aspek Strategis Organisasi	4
1.5. Analisis Lingkungan Strategis	5
1.6. Isu Strategis	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Rencana Strategis	13
2.2. Rencana Kerja Tahun 2023	15
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	18
2.5. Metode Pengukuran	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	23
3.2. Realisasi Anggaran	164
3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	165
BAB IV. PENUTUP	171
4.1. Kesimpulan	171
4.2. Saran	173
LAMPIRAN	175

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya	3
Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM	6
Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur	7
Gambar 4. Visi dan Misi	13
Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya	14
Gambar 6. Kriteria Pencapaian Indikator	21

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Balai Besar POM di Surabaya	15
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023	16
Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023	19
Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2023	23
Tabel 6. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
Tabel 7. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat triwulan I tahun 2023	26
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	27
Tabel 9. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	27
Tabel 10. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	28
Tabel 11. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase obat yang memenuhi syarat sebelumnya	28
Tabel 12. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat triwulan I tahun 2023	29
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	30
Tabel 14. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	31
Tabel 15. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	31
Tabel 16. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase makanan yang memenuhi syarat sebelumnya	32
Tabel 17. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2023	32
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	33
Tabel 19. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	34
Tabel 20. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	34
Tabel 21. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase obat yang aman dan bermutu sebelumnya	35
Tabel 22. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I tahun 2023	36
Tabel 23. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	37
Tabel 24. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	37
Tabel 25. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	38
Tabel 26. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	38
Tabel 27. Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Triwulan I tahun 2023	39
Tabel 28. Perbandingan Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan target tahun 2023	40
Tabel 29. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	41
Tabel 30. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	41
Tabel 31. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal pada Indikator Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	41

Tabel 32. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Triwulan I tahun 2023	42
Tabel 33. Perbandingan Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	44
Tabel 34. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	48
Tabel 35. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	48
Tabel 36. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sebelumnya	49
Tabel 37. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023	50
Tabel 38. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	51
Tabel 39. Rencana Aksi pada Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	52
Tabel 40. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	53
Tabel 41. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sebelumnya	53
Tabel 42. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023	54
Tabel 43. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	56
Tabel 44. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	58
Tabel 45. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	59
Tabel 46. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebelumnya	59
Tabel 47. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan I tahun 2023	60
Tabel 48. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	61
Tabel 49. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	63
Tabel 50. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	65
Tabel 51. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM sebelumnya	65
Tabel 52. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi triwulan I tahun 2023	66
Tabel 53. Perbandingan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	68
Tabel 54. Rencana Aksi pada Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi	69
Tabel 55. Efisiensi Anggaran pada Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi	69
Tabel 56. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi sebelumnya	69
Tabel 57. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan I tahun 2023	70
Tabel 58. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	72

Tabel 59. Rencana Aksi pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	73
Tabel 60. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan I tahun 2023	73
Tabel 61. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan sebelumnya	73
Tabel 62. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan tepat waktu triwulan I tahun 2023	75
Tabel 63. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	76
Tabel 64. Rencana Aksi pada Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	79
Tabel 65. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	79
Tabel 66. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebelumnya	79
Tabel 67. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I tahun 2023	81
Tabel 68. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	83
Tabel 69. Rencana Aksi pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83
Tabel 70. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	84
Tabel 71. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85
Tabel 72. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86
Tabel 73. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	87
Tabel 74. Rencana Aksi pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88
Tabel 75. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	89
Tabel 76. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	89
Tabel 77. Realisasi Indeks Pelayanan Publik Triwulan I tahun 2023	90
Tabel 78. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	91
Tabel 79. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Pelayanan Publik	94
Tabel 80. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Pelayanan Publik	95
Tabel 81. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian Indeks Pelayanan Publik	95
Tabel 82. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan I tahun 2023	96
Tabel 83. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	98
Tabel 84. Rencana Aksi pada Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	99
Tabel 85. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100
Tabel 86. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik sebelumnya	100
Tabel 87. Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan I tahun 2023	102

Tabel 88. Perbandingan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	103
Tabel 89. Rencana Aksi pada Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	104
Tabel 90. Efisiensi Anggaran pada Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	106
Tabel 91. Tindak lanjut reokmendasi hasil evaluasi capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebelumnya	106
Tabel 92. Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan I tahun 2023	108
Tabel 93. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan I tahun 2023 Dengan Target tahun 2023	109
Tabel 94. Rencana Aksi Pada Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	111
Tabel 95. Efisiensi Anggaran Pada Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	111
Tabel 96. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sebelumnya	111
Tabel 97. Jumlah desa pangan aman triwulan I tahun 2023	112
Tabel 98. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023	113
Tabel 99. Rencana Aksi pada Indikator Jumlah desa pangan aman	114
Tabel 100. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah desa pangan aman	115
Tabel 101. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Desa Pangan Aman sebelumnya	116
Tabel 102. Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Triwulan I tahun 2023	116
Tabel 103. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Triwulan I tahun 2023 Dengan Target tahun 2023	118
Tabel 104. Rencana Aksi pada Indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	119
Tabel 105. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	119
Tabel 106. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya sebelumnya	119
Tabel 107. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I tahun 2023	120
Tabel 108. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023	121
Tabel 109. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	123
Tabel 110. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	124
Tabel 111. Tindak lanjut rekoemndasi hasil evaluasi capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebelumnya	124
Tabel 112. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I tahun 2023	126
Tabel 113. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023	127
Tabel 114. Rencana Aksi pada Indikator Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	129
Tabel 115. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	129
Tabel 116. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebelumnya	130
Tabel 117. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan I tahun 2023	131
Tabel 118. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023	132
Tabel 119. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	135
Tabel 120. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	137

Tabel 121. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sebelumnya	137
Tabel 122. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya Triwulan I tahun 2023	140
Tabel 123. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023	141
Tabel 124. Rencana Aksi pada Indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya	142
Tabel 125. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya	143
Tabel 126. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya sebelumnya	143
Tabel 127. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2023	144
Tabel 128. Kategori Penilaian SAKIP	144
Tabel 129. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023	144
Tabel 130. Rencana aksi pada Indikator Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	146
Tabel 131. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	146
Tabel 132. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Nilai AKIP BBPOM di Surabaya sebelumnya	146
Tabel 133. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2023	147
Tabel 134. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	148
Tabel 135. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN	149
Tabel 136. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN	150
Tabel 137. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	150
Tabel 138. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP triwulan I tahun 2023	151
Tabel 139. Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2021 dengan target tahun 2023	152
Tabel 140. Rencana Aksi pada Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	154
Tabel 141. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	155
Tabel 142. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP sebelumnya	155
Tabel 143. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan I tahun 2023	157
Tabel 144. Perbandingan Realisasi pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	158
Tabel 145. Rencana Aksi pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	159
Tabel 146. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	159
Tabel 147. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal sebelumnya	159
Tabel 148. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2023	160
Tabel 149. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	161
Tabel 150. Rencana Aksi pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran	163
Tabel 151. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran	163
Tabel 152. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya sebelumnya	163
Tabel 153. Tingkat Efisiensi Kegiatan	165
Tabel 154. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis	167



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2021-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial Masyarakat, perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, BBPOM di Surabaya menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan *premarket*, *postmarket*, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai konsumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM.

Perubahan paradigma ini juga disikapi BBPOM di Surabaya dengan kebijakan penguatan kapasitas BBPOM di Surabaya untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan BBPOM di Surabaya ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa

memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 23 Tahun 2021 tanggal 08 Juni 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Surabaya merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Surabaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep).
- b. Loka POM di Kabupaten Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 (enam) kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar)
- c. Loka POM di Kabupaten Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 (lima) kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang)

Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan tugas dan fungsi :

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Surabaya guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 23 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Surabaya yang mengawal pencapaian 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proaktif control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Timur meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Timur;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Surabaya dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.5. Analisis Lingkungan Strategis

Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar POM di Surabaya sebanyak 138 orang. Rincian distribusi pegawai berdasarkan lokasi penempatan dan tingkat pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan

Lokasi Penempatan	S2	Apoteker	S1 Lain	D3	SLTA
Balai Besar POM di Surabaya	10	49	55	12	12

Sumber Daya Lainnya

- Kantor Balai Besar POM di Surabaya memiliki 2 (dua) bangunan gedung dengan total luas tanah 5.164,673 m² dan luas bangunan 4.496,09 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Surabaya memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu Balai Besar POM di Surabaya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya.

Keunggulan Balai Besar POM di Surabaya

- Laboratorium Unggulan Pengujian Rokok
- Laboratorium Rujukan Pengujian Endotoksin dan Sterilitas

- Laboratorium Pengujian Covid-19
- Mempunyai tenaga ahli sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui *e-registration*.
- Pengembangan layanan publik bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan fasilitas Bakorwil di Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jember.

Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.432784/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2022 sebesar Rp61.048.715.000,- (enam puluh satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis

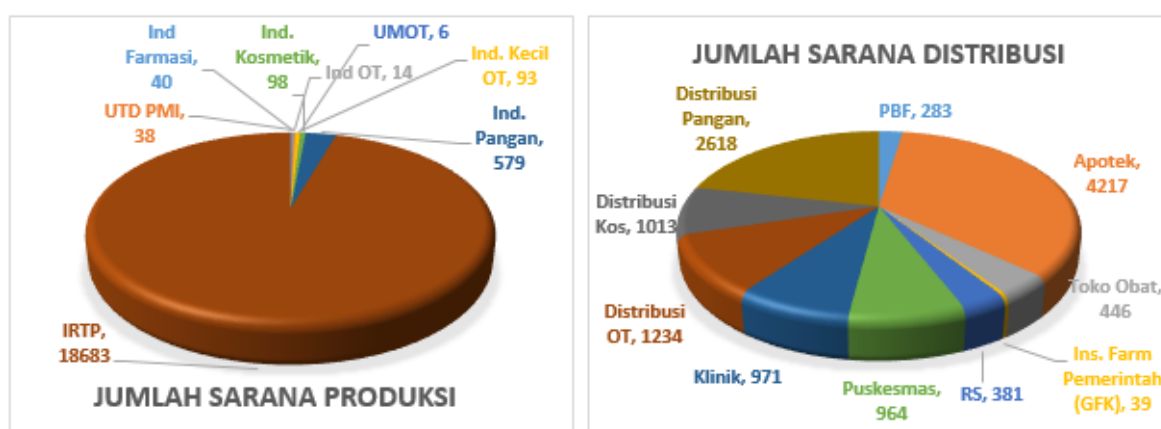
Provinsi Jawa Timur terletak pada 111⁰ hingga 1114⁰⁴' Bujur Timur dan 7⁰¹²' hingga 8⁰⁴⁸' Lintang Selatan. Wilayah Provinsi Jawa Timur seluas 47.963 km². Cakupan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk 38.610.202 jiwa.



Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada gambar 3. tersebut di bawah ini.



Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur

1.6. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Surabaya antara lain: :

1. Generasi *Stunting* Mengancam Masa Depan Bangsa

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. *Stunting* ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization (WHO)* dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Surabaya melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. **Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara *Online***

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai Besar POM di Surabaya sejak tahun 2014 melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara *on-line*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

3. **Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Surabaya meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

4. **Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha pangan desa**

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya baru dapat mengintervensi 572 desa dari 8.499 desa yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan di seluruh desa.

Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya sehingga masyarakat terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat.

5. Reformasi Birokrasi (WBK/WBBM)

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2017. Triwulan I tahun 2023 Balai Besar POM di Surabaya berkomitmen untuk mempertahankan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), dengan upaya menambah inovasi dari 29 inovasi menjadi 31 inovasi, Inovasi baru pada triwulan I tahun 2023 diantaranya Gerakan komitmen menumbuhkan pangan aman berkualitas untuk PKL Jawa Timur dan Kegiatan Pengembangan Kompetensi

Penanggung Jawab Obat dan Makanan Terstruktur (Kembang Aster). Inovasi GEMPUR Jatim (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jatim) yang merupakan inovasi unggulan Balai Besar POM di Surabaya pada triwulan I tahun 2023 berhasil meraih penghargaan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

6. Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Surabaya sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 31 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaraan bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan standart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, *monitoring* tindak lanjut pengawasan sarana. BBPOM Surabaya melaksanakan pendampingan dan *monitoring* pelaksanaan DAK di Provinsi Jawa Timur.

7. UMKM di Jawa Timur

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, sektor industri pengolahan merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa Timur dengan kontribusi terbesar yaitu sekitar 30% pada tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan pertumbuhan di atas 4% untuk lima tahun terakhir, di mana industri pengolahan pangan memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp 248,7 triliun dengan pertumbuhan 14,51%, termasuk di dalamnya UMKM di bidang pangan.

Melihat data tersebut, tampak bahwa sektor UMKM merupakan sektor andalan di Jawa Timur sehingga peran UMKM dalam proses pembangunan di Jawa Timur patut diberi perhatian lebih. Jangkauan pemasaran komoditas hasil olahan makanan dan minuman

adalah pasar lokal Jawa Timur, antar daerah di luar Jawa Timur (ekspor antar daerah), serta sebagian kecil diekspor ke luar negeri. Sebagai salah satu upaya penguatan daya saing produk, pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai program *One Pesantren One Product* (OPOP) untuk memberdayakan para santri yang dipelopori oleh pesantren preneur di bawah naungan Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kota Surabaya juga meluncurkan program inovasi pendampingan UMKM dengan nama Pahlawan Ekonomi. Program ini berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga miskin yang ingin mengembangkan usaha UMKM. Program ini berupaya memberi pendampingan bagi UMKM, sejak tahap awal bimbingan mental, pembuatan produk, pengemasan, pemasaran, hingga promosi. Jumlah UMKM yang menjadi peserta Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda terus bertambah secara signifikan. Pada tahun pertama atau 2010, jumlah UMKM yang ikut pelatihan tak lebih dari 92 UMKM. Sedangkan hingga tahun 2017, jumlahnya mencapai 8.565 UMKM. Selain itu juga ada program pendampingan kepada para mahasiswa yang dipelopori oleh Big Indonesia. Hal ini mendorong BBPOM di Surabaya untuk turut serta membantu mewujudkan UMKM yang dapat menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat dengan membuat inovasi program pendampingan yang diberi nama (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat) GEMPUR JATIM.

8. Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak

Dalam penanganan kasus cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang ditemukan dalam sirup obat sejak Oktober 2022, BPOM telah melakukan langkah-langkah antisipatif, seperti intensifikasi surveilans mutu produk, penelusuran dan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, hingga pemberian sanksi administratif, termasuk melakukan verifikasi pemastian mutu terhadap sirup obat yang beredar. Upaya - upaya penindakan juga terus dilakukan terhadap sarana produksi dan distribusi jika terdapat unsur pidana bidang kesehatan. Balai Besar POM di Surabaya turut berkontribusi dalam penanganan kasus Gangguan Gagal Ginjal dengan melakukan pemeriksaan sarana produksi, pengujian sampel melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana produksi. Pengujian terhadap sampel EG DEG tidak hanya dilakukan pada sampel obat sirup, namun juga pada produk bahan tambahan pangan dengan bahan utama pelarut sorbitol, polietilen glikol.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :



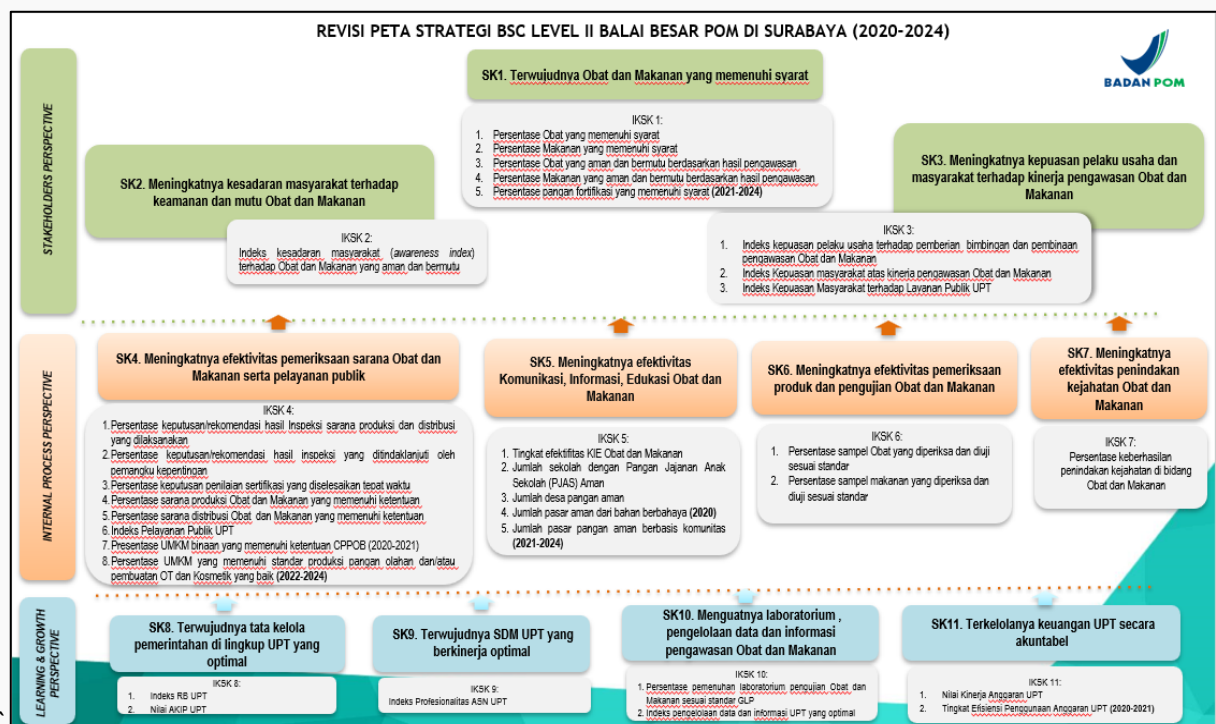
Gambar 4. Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Surabaya berdasarkan Renstra 2020-2024 dan Reviu Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Surabaya maka Balai Besar POM di Surabaya menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024.

Pada tahun 2021, telah dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 BBPOM di Surabaya mengacu pada Reviu Renstra BPOM dan berlaku mulai 01 Oktober 2021. Reviu Renstra BBPOM di Surabaya tidak merubah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, hanya terdapat sedikit

perubahan pada kebijakan dan strategi, serta perubahan nomenklatur indikator dan perubahan jumlah indikator dari 30 indikator menjadi 29 indikator.

2.2. Rencana Kerja Tahun 2023

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2023 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2023.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Balai Besar POM di Surabaya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,7
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,55
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64
		Indeks Pelayanan Publik	4,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	65
		Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,38
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	112
		Jumlah desa pangan aman	37
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	24

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	89,7
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85,6
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,5
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,75
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	95,2

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Surabaya menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Surabaya Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp61.048.715.000,- (enam puluh satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Surabaya. Jika dibandingkan dengan RKT tahun 2023, terdapat perubahan target PK tahun 2023 pada indikator Indeks Pelayanan Publik berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPOM per 2 Januari 2023. Perubahan target dari 4,51 menjadi 4,60 dikarenakan adanya perubahan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,7
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,55
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64
		Indeks Pelayanan Publik	4,60
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	65
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,38
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	112
		Jumlah desa pangan aman	37
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	24
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	89,7
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85,6
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,5
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,75
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	95,2
	Kegiatan :		Anggaran :
	Pengawasan Obat dan Makanan di	Seluruh Indonesia	61.048.715.000

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Surabaya sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Surabaya selalu di-*monitoring* dan dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi BOC dan setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap bulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap bulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dasar pemantauan tiap bulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)	
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	595.329.600	
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	289.803.360	
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	148.832.400	
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	149.292.640	
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	63.394.000	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												81	280.539.000	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan													85,7	223.620.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan													78,55	209.320.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM													91	64.653.500
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	46.830.000	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	283.620.000	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	525.300.000	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	452.771.000	
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	792.959.000	
		Indeks Pelayanan Publik							4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	64.653.500	
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan	4,3	10,8	31,1	50,8	59,5	70,6	76,5	83,8	89,1	91,33	96	65	315.156.000	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	OT dan Kosmetik yang baik			93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	18.943.840.000
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan			93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0,8	2,1	17,1	32,1	39,6	47,1	57,1	62,1	72,1	82,2	95,5	112	811.162.000
		Jumlah desa pangan aman	5	10	20	31,7	35	42,8	54,4	67,8	77,8	80	90	37	1.154.484.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0,8	1,7	13,3	41,1	52,9	59,5	72,9	72,9	85,4	97,9	100	24	575.545.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	11	20	27	35	45	55	65	75	85	95	100	744.162.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	11	20	30	38	45	55	65	75	85	95	100	439.096.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	2	6,8	12,1	14,3	18,5	26,5	33,4	37,7	50,7	59,1	66,8	72	1.312.841.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya											89,7	28.786.178.000	
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya												85,6	90.810.000
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya											85,5	246.648.000	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												88	2.835.300.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal			2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	514.075.000
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya		46	56	61	63	66	67	69	71	72	74	95,2	88.500.000

2.5. Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 Triwulan I tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

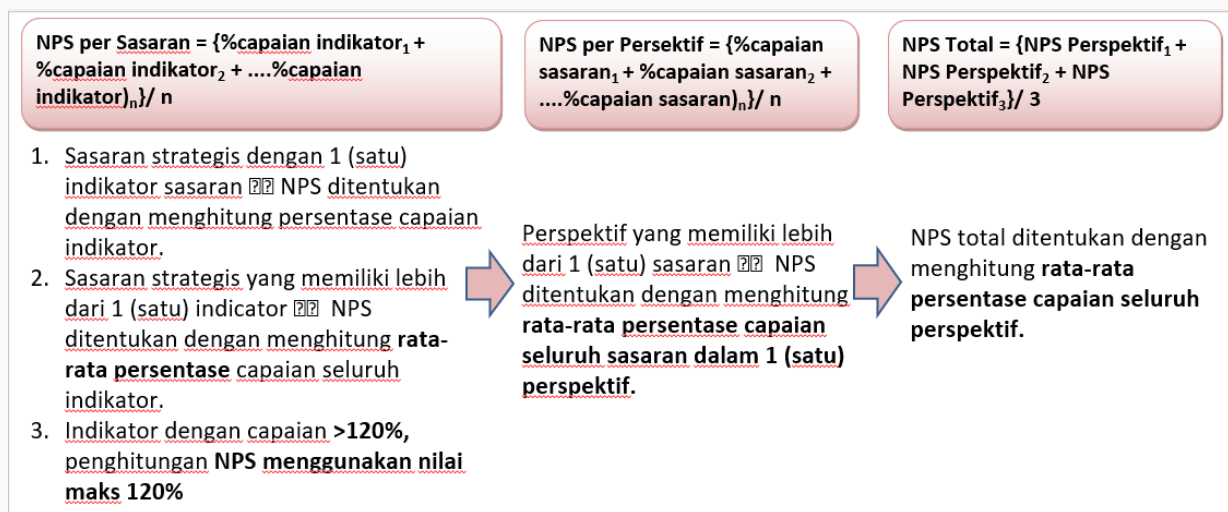
Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Gambar 6. Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.
2. Pemanfaatan *monitoring* kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):



Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Surabaya yang disahkan dalam SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Surabaya menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Surabaya
3. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada data base *online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, monev Bappenas dan pada aplikasi *e-performance*.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang telah dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC). Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi Simakin pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level pimpinan eselon 2 hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Surabaya guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2023, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan I tahun 2023 dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2023, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan I tahun 2023, diperoleh nilai NPSS sementara sebesar 112.30% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, terdiri dari NPS perspektif stakeholder sebesar 106.68%, NPS perspektif internal proses sebesar 113.58%, NPS perspektif learning & growth sebesar 116.65%. Dengan demikian disimpulkan bahwa BBPOM di Surabaya telah berhasil mencapai target semua sasaran strategis dari semua perspektif. Hasil tersebut merupakan evaluasi dari 6 sasaran strategis dari 11 sasaran strategis yang harus dievaluasi. 5 sasaran strategis lainnya belum bisa dievaluasi menunggu penilaian indikator di akhir tahun oleh pusat. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	106.68	Sesuai Ekspektasi
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	-	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	108.35	Sesuai Ekspektasi
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	112.18	Sesuai Ekspektasi
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	113.78	Sesuai Ekspektasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	120	Sesuai Ekspektasi
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	-	-
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	116.35	Sesuai Ekspektasi

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah diperjanjikan 11 sasaran strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
			TRIWULAN I 2023	TRIWULAN I 2023	TRIWULAN I 2023	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	94,69	102,92
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	93,62	111,45
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	96,61	107,34
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	80,77	110,64
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90,91	101,01
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	98,02	105,40
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	79,39	103,10
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	95,36	96,32

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN I 2023	REALISASI TRIWULAN I 2023	CAPAIAN TRIWULAN I 2023	
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	69,89	107,52
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64	75,37	117,77
		15	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	31,1	68,46	120,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,38	93,74	100,39
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	17,1	22,82	120,00
		19	Jumlah desa pangan aman	20	21,67	108,35
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	13,3	18,33	120,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	21,51	107,55
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	23,94	120,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	12,1	21,67	120,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	24	Indeks RB BBPOM di Surabaya	-	-	-
		25	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	-	-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,75	3	109,09
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	56	65,16	116,36

Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator, hanya 20 indikator yang dapat dievaluasi. **Dari 20 indikator tersebut** terdapat **19 indikator** yang sudah mencapai target dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**, dan **1 indikator** dengan kategori **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**, Kriteria memenuhi ekspektasi menunjukkan bahwa target triwulan I tahun 2023 sudah dapat tercapai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Surabaya, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1
TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI
SYARAT DI LINGKUP BALAI BESAR POM
DI SURABAYA

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 7. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	92	-	-	-
Pebruari	92	93,10	101,20	Memenuhi ekspektasi
Maret	92	94,69	102,92	Memenuhi ekspektasi

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS}}{\text{Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat triwulan I tahun 2023 adalah 94,69%, diperoleh dari hasil pemeriksaan 320 sampel acak obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 303 sampel MS (memenuhi syarat), 17 sampel TMS (tidak memenuhi syarat hasil uji dan atau tidak memenuhi ketentuan penandaan). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2023 **mencapai target** yaitu 102,92 % dengan kriteria “ **Memenuhi Ekspektasi**”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat triwulan I tahun 2023 dengan target 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	92	94,69	102,92	memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat triwulan I tahun 2023 **mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria capaian memenuhi ekspektasi.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Untuk Triwulan I sampel obat yang Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 17 sampel. Sampel obat yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan atau hasil uji terdiri dari komoditi Obat Tradisional 15 sampel dan 2 sampel Kosmetik. Di triwulan I, komoditi obat yang belum disampling oleh Balai Besar POM di Surabaya adalah sampel obat kuasi dengan alasan belum diterbitkan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi. Akan dijadwalkan sampling obat kuasi di TW 2 sehingga sampel obat kuasi dapat diuji

Dengan adanya regionalisasi laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Begitu pula dengan sampel yang disampling oleh BBPOM di Surabaya, diuji di laboratorium regionalisasi sesuai dengan pembagian parameter uji regionalisasi.

e. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Tabel 9. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	QIA.005.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A Pengadaan Sampel (acak)	24 kali/trip	2	1	2	1	2	2
	QIA.005.055	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen	A Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan (acak)	1 pkt lelang	0	0	0	0	0	0

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU persentase obat yang memenuhi syarat antara lain : melakukan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Pengadaan

sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Dari 455 sampel Obat yang disampling BBPOM di Surabaya, baru 320 sampel yang selesai diuji. Namun jumlah sampel secara keseluruhan yang telah diuji laboratorium termasuk sampel dari balai lain adalah 489 sampel.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 10. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase obat yang memenuhi syarat	56.885.249	56.885.249	100,00	102,92	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran. Pada triwulan I tahun 2023, sebenarnya realisasi penyerapan anggaran sudah melebihi perencanaan POA, namun untuk perhitungan efisiensi, target anggaran disamakan dengan realisasi. Beberapa reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk pengujian belum tersedia dan terlalu lama bila menunggu proses lelang, sehingga sudah dilakukan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan reagen. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 11. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase obat yang memenuhi syarat sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	Belum dilakukan sampling untuk komoditi obat kuasi	Belum dilakukan sampling untuk komoditi obat kuasi	Belum dilakukan sampling untuk komoditi obat kuasi
Rekomendasi Perbaikan	- Melakukan penjadwalkan kembali untuk sampling obat kuasi - Berkoordinasi dengan PPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi	- Melakukan penjadwalkan kembali untuk sampling obat kuasi - Berkoordinasi dengan PPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi	- Melakukan penjadwalkan kembali untuk sampling obat kuasi - Berkoordinasi dengan PPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi
Rencana Aksi	- Merencanakan sampling obat kuasi - Berkoordinasi dengan PPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi	- Merencanakan sampling obat kuasi - Berkoordinasi dengan PPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi	- Merencanakan sampling obat kuasi - Berkoordinasi dengan PPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling	Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling	Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Maret: - Sampling obat kuasi direncanakan pada triwulan 2	Kondisi Maret: - Sampling obat kuasi direncanakan pada triwulan 2	Kondisi Maret: - Sampling obat kuasi direncanakan pada triwulan 2
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	open	open	open

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan IV tahun 2022, sudah tidak terdapat lagi permasalahan penandaan kosmetik (TMK penandaan karena tidak mencantumkan QR code) di triwulan I tahun 2023. Pada triwulan I tahun 2023 juga sudah direncanakan lagi pelaksanaan inovasi Kembang Aster (Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penanggungjawab Obat dan makanan Terstruktur), dimana dilakukan pengembangan kompetensi terhadap apoteker/penanggungjawab sarana yang didalamnya juga terdapat materi tentang penandaan produk dengan harapan hasil penandaan produk yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) dapat menurun.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 12. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	84	-	-	-
Pebruari	84	94,74	112,78	Memenuhi Ekspektasi
Maret	84	93,62	111,45	Memenuhi Ekspektasi

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan

Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat BBPOM di Surabaya hingga TW I tahun 2023 adalah 93,62%. Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat di TW I sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 111,45% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

- b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**
Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
- c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	84,00	93,62	111,45	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat hingga triwulan I tahun 2023 **sudah mencapai target** tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Tetap dilakukan monitoring agar target di tahun 2023 dapat tercapai.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**
Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat hingga triwulan I tahun 2023 sudah mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi .
 - Sampai TW 1 sampel acak yang masuk pengujian sebanyak 179 sampel, 94 sampel sudah dilakukan pengujian dan sebanyak 85 sampel belum selesai dilakukan pengujian.
 - Dari 94 sampel yang selesai diuji terdapat 88 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 6 sampel TMS.

- Sesuai Pedoman Sampling, bahwa pada sampel acak dilakukan evaluasi penandaan sehingga hasil penandaan mempengaruhi kesimpulan hasil uji akhir. Pada TW 1 terdapat 1 sampel rusak dan 9 sampel TMK Penandaan.

TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan pada sampel makanan acak yang disampling dikarenakan pencantuman label pada produk tidak sesuai yang dengan label yang telah disetujui saat registrasi produk, misalnya : mencantumkan klaim, tidak mencantumkan kode produksi dan tanggal kadaluwarsa. Pada sampel yang TMK Penandaan tidak hanya pada sampel produk pangan MD tetapi juga pada sampel produk pangan dengan nomor ijin edar PIRT.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 14. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	QIA.001.053	Pengujian laboratorium sampel makanan	A Pengujian Laboratorium Sampel Makanan (acak)	1 pkt lelang	0	0	0	0	0	0
	QIA.001.055	Pengadaan sampel makanan	A Pengadaan Sampel (acak)	8 kali/trip	1	1	1	1	1	1

Kegiatan yang menunjang IKU persentase makanan yang memenuhi syarat adalah Pengujian laboratorium sampel makanan acak dan Pengadaan sampel makanan acak. Selamt triwulan I tahun 2023 telah dilakukan sampling terhadap 179 sampel makanan, dengan realisasi sampel yang sudah diperiksa dan diuji 94 sampel saja. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak sampel yang harus diuji BBPOM di Surabaya sedangkan sarana prasarana sangat terbatas.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 15. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase makanan yang memenuhi syarat	17.680.007	12.117.911	68,54	111,45	90% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat **efisien** karena % realisasi anggaran lebih rendah daripada % capaian indikator. Beberapa reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk pengujian belum tersedia dan terlalu lama bila

menunggu proses lelang, sehingga sudah dilakukan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan reagen. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 16. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase makanan yang memenuhi syarat sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	Belum dilakukan pengujian sampel di bulan Januari, sehingga belum ada realisasi yang dihitung di bulan Januari.	- Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji	Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji namun Target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sudah tercapai
Rekomendasi Perbaikan	Pengujian harus segera dilakukan setelah pembagian regionalisasi sudah ditetapkan.	Percepatan pengujian sampel	Percepatan pengujian sampel
Rencana Aksi	Monev terhadap pengujian sampel makanan acak	Percepatan pengujian sampel makanan acak di bulan berikutnya	Percepatan pengujian sampel makanan acak di bulan berikutnya
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 0%, disebabkan belum ada sampel yang diuji	Dari 93 sampel acak yang disampling, baru dilakukan pengujian 38 sampel	Dari 179 sampel acak yang disampling sd bulan Maret (1 sampel rusak, sehingga masuk lab adalah 178 sampel), baru dilakukan pengujian 93 sampel
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Februari: - Sudah dilakukan pengujian 38 sampel	Kondisi Maret: - Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 93,62% dari target 84 %	Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 93,62% dari target 84 %
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	close	close	close

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan IV tahun 2022, maka akan direncanakan kembali pelaksanaan kegiatan Bimtek pelaku usaha dan desk CAPA di tahun 2023, mengundang pelaku usaha dengan hasil pemeriksaan sarana tidak memenuhi ketentuan sekaligus memberikan bimtek terkait penandaan produk.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 17. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Pebruari	90	100	111,111	memenuhi ekspektasi

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Maret	90	96,61	107,34	memenuhi ekspektasi

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu triwulan I, diperoleh dari hasil pemeriksaan 118 sampel *targeted* obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 114 sampel MS (memenuhi syarat) dan 4 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase obat yang aman dan bermutu pada triwulan 1 tahun 2023 **mencapai target** yaitu 107,34 % dengan kriteria “**memenuhi ekspektasi**”.

- b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**
Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
- c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	96,61	107,34	memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2023 **mencapai target** Tahun 2023 dengan kriteris memenuhi ekspektasi. Tetap dilakukan monitoring agar target di tahun 2023 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu pada triwulan I tahun 2023 sudah mencapai target dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Untuk Triwulan I sampel obat yang Aman dan bermutu sebanyak 114 sampel. Sampel obat yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan atau hasil uji terdiri dari komoditi Obat Tradisional sebanyak 4 sampel. Di triwulan I, komoditi obat yang belum disampling oleh Balai Besar POM di Surabaya adalah sampel obat kuasi dengan alasan belum diterbitkan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi. Akan dijadwalkan sampling obat kuasi di TW 2 sehingga sampel obat kuasi dapat diuji.

Upaya yang bisa dilakukan untuk pencapaian target adalah melakukan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 19. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET		
					T	R	T	R	T	R	
3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	QIA.005.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengadaan Sampel (targeted)	6 kali/trip	0	0	1	1	1	1
	QIA.005.055	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen	A	Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan (targeted)	1 pkt lelang	0	0	0	0	0	0

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU persentase obat yang aman dan bermutu antara lain kegiatan Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan. Selama triwulan I telah dilakukan sampling Obat targeted sebanyak 186 sampel, namun sampel yang selesai diperiksa dan diuji hanya 118 sampel. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 20. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	13.604.527	13.604.527	100,00	107,34	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran. Beberapa reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk pengujian belum tersedia dan terlalu lama bila menunggu proses lelang, sehingga sudah dilakukan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan reagen. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 21. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase obat yang aman dan bermutu sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	Belum dilakukan sampling untuk komoditi obat kuasi	Belum dilakukan sampling untuk komoditi obat kuasi	Belum dilakukan sampling untuk komoditi obat kuasi
Rekomendasi Perbaikan	- Melakukan penjadwalkan kembali untuk sampling obat kuasi - Berkoordinasi dengan PPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi	- Melakukan penjadwalkan kembali untuk sampling obat kuasi - Berkoordinasi dengan PPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi	- Melakukan penjadwalkan kembali untuk sampling obat kuasi - Berkoordinasi dengan PPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi
Rencana Aksi	- Merencanakan sampling obat kuasi - Berkoordinasi dengan PPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi	- Merencanakan sampling obat kuasi - Berkoordinasi dengan PPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi	- Merencanakan sampling obat kuasi - Berkoordinasi dengan PPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling	Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling	Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Maret: - Sampling obat kuasi direncanakan pada triwulan 2	Kondisi Maret: - Sampling obat kuasi direncanakan pada triwulan 2	Kondisi Maret: - Sampling obat kuasi direncanakan pada triwulan 2
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	Open	open	open

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Berdasarkan laporan kinerja triwulan IV tahun 2022, sudah tidak terdapat lagi permasalahan penandaan kosmetik (TMK penandaan karena tidak mencantumkan QR code) di triwulan I tahun 2023. Pada triwulan I tahun 2023 juga sudah direncanakan lagi pelaksanaan inovasi Kembang Aster (Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penanggungjawab Obat dan makanan Terstruktur), dimana dilakukan pengembangan kompetensi terhadap apoteker/penanggungjawab sarana yang didalamnya juga terdapat

materi tentang penandaan produk dengan harapan hasil penandaan produk yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) dapat menurun.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 22. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	73	-	-	-
Pebruari	73	75,00	102,74	Memenuhi Ekspektasi
Maret	73	80,77	110,64	Memenuhi Ekspektasi

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 52 sampel targeted pangan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan hasil 42 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 10 TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu

berdasarkan hasil pengawasan di TW I tahun 2023 **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 110,64 % dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

- b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**
Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
- c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	80,77	110,64	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2023 **mencapai** target Tahun 2023 dengan kategori memenuhi ekspektasi. Tetap dilakukan monitoring disetiap triwulan agar target tahun 2023 dapat tercapai.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**
Capaian Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan pengawasan hingga triwulan I tahun 2023 sudah mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Sampai TW 1 sampel targeted yang masuk pengujian sebanyak 67 sampel, 52 sampel sudah dilakukan pengujian dan sebanyak 13 sampel belum selesai dilakukan pengujian. Dari 52 sampel yang selesai diuji terdapat 42 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 10 sampel TMS. Sampel TMS terdiri dari 4 sampel PJAS yang TMS mikrobiologi, 4 sampel TMS pemanis yang dilarang, dan 2 sampel UMKM yang TMS mikrobiologi. Sesuai Pedoman Sampling, bahwa sampel targeted tidak dilakukan evaluasi penandaan sehingga kesimpulan hasil uji tergantung dari hasil uji laboratorium.
- e. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Tabel 24. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET		
					T	R	T	R	T	R	
4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	QIA.001.053	Pengujian laboratorium sampel makanan	A Pengujian Laboratorium Sampel Makanan (acak)	1	pkt lelang	0	0	0	0	0	0
	QIA.001.055	Pengadaan sampel makanan	A Pengadaan Sampel (Targeted)	4	kali/trip	1	1	0	0	0	0

Kegiatan yang menunjang IKU persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah Pengujian laboratorium sampel makanan targeted dan Pengadaan sampel makanan targeted. Selama triwulan I telah dilakukan sampling makanan targeted sebanyak 67 sampel namun hanya 52 sampel yang selesai diperiksa dan diuji. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak sampel yang harus diuji BBPOM di Surabaya sedangkan sarana prasarana sangat terbatas.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 25. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	9.353.642	6.411.005	68,54	110,64	90% (efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan **efisien** karena % realisasi anggaran lebih rendah daripada % capaian indikator. Beberapa reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk pengujian belum tersedia dan terlalu lama bila menunggu proses lelang, sehingga sudah dilakukan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan reagen. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 26. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	Belum dilakukan pengujian sampel di bulan Januari, sehingga belum ada realisasi yang dihitung di bulan Januari.	- Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji	Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji namun Target Persentase Makanan yang Aman dan bermutu sudah tercapai
Rekomendasi Perbaikan	Percepatan pengujian sampel	Percepatan pengujian sampel	Percepatan pengujian sampel

Rencana Aksi	Monev terhadap pengujian sampel makanan targeted	Percepatan pengujian sampel makanan targeted di bulan berikutnya	Percepatan pengujian sampel makanan targeted di bulan berikutnya
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu 0%, disebabkan belum ada sampel yang diuji	Dari 51 sampel targeted yang disampling, baru dilakukan pengujian 24 sampel	Dari 67 sampel targeted yang disampling sd bulan Maret , baru dilakukan pengujian 52 sampel
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Februari: - Sudah dilakukan pengujian 24 sampel	Kondisi Maret: - Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu 80.77% dari target 73 %, dengan capaian 110,64%	Kondisi Maret: - Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu 80.77% dari target 73 %, dengan capaian 110,64%
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	close	close	close

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja triwulan I tahun 2022 dimana masih terdapat 10 sampel PJAS yang tidak memenuhi syarat (TMS), maka dilakukan tindak lanjut dengan bersurat ke dinas kesehatan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Sedangkan untuk sampel yang TMS lainnya ditindaklanjuti dengan bersurat ke Badan POM. Selain itu, pada tahun 2023 akan direncanakan kembali pelaksanaan kegiatan Bimtek pelaku usaha dan desk CAPA, mengundang pelaku usaha dengan hasil pemeriksaan sarana produksi tidak memenuhi ketentuan sebagai upaya meminimalisir produk yang TMS.

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 27. Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	90	-	-	-
Pebruari	90	-	-	Tidak memenuhi ekspektasi
Maret	90	90,91	101,01	Memenuhi Ekspektasi

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Pangan fortifikasi MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS}}{\text{Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan

fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Hasil pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Realisasi persentase makanan fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan hingga TW I tahun 2023 adalah 90,91%. Capaian persentase Pangan Fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 **Sudah Mencapai target** yang ditetapkan yaitu 101,01% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

- b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**
Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
- c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 28. Perbandingan Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90,01	101,01	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat triwulan I tahun 2023 **mencapai** target Tahun 2023 dengan kategori memenuhi ekspektasi. Tetap dilakukan monitoring agar target tahun 2023 tercapai di akhir periode.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**
Capaian Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat hingga triwulan I tahun 2023 sudah mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Sampai triwulan 1 sampel pangan fortifikasi yang masuk pengujian sebanyak 55 sampel, 50 sampel sudah dilakukan pengujian dan sebanyak 5 sampel belum selesai dilakukan pengujian. Dari 50 sampel yang selesai diuji terdapat 45 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 5 sampel TMS. Sampel yang TMS adalah garam yang tidak memenuhi kadar KIO3. Kegiatan sampling pangan fortifikasi di triwulan I tahun 2023 dilakukan di Kabupaten Bangkalan yang merupakan wilayah stunting tertinggi kedua di Jawa Timur dan Kota Surabaya yang merupakan wilayah stunting terendah di Jawa Timur.

Perlu peningkatan pengawasan pada sarana produksi khususnya produsen pangan fortifikasi terkait fortifikan yang ditambahkan sesuai dengan SNI 3751-2018.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 29. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	QIA.008.051	Pengadaan sampel makanan	A Pengadaan Sampel Pangan Fortifikasi	20 kali/trip	2	1	2	2	2	1

Kegiatan yang menunjang IKU persentase pangan fortififikasi yang memenuhi syarat adalah Pengujian laboratorium sampel pangan fortifikasi dan Pengadaan sampel pangan fortifikasi. Selama triwulan I telah dilakukan sampling makanan targeted sebanyak 55 sampel dan seluruhnya telah selesai diperiksa dan diuji.

- f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 30. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	17.970.000	11.465.750	63,80	101,01	92% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran. Beberapa reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk pengujian belum tersedia dan terlalu lama bila menunggu proses lelang, sehingga sudah dilakukan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan reagen. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

- g. Tindak lanjut hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 31. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal pada Indikator Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	- Belum dilakukan sampling di bulan Januari	- Sampling Pangan Fortifikasi sudah dilakukan namun belum ada realisasi sampel yang diuji sehingga Realisasi maupun capaian Persentase Pangan Fortifikasi belum bisa dihitung	- Belum semua jenis pangan fortifikasi yang disampling, sampel fortifikasi hingga TW1 adalah garam konsumsi Beryodium
Rekomendasi Perbaikan	merencanakan sampling pada bulan berikutnya	Percepatan pengujian sampel fortifikasi	Monitoring jenis sampling fortifikasi

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Rencana Aksi	merencanakan sampling pada bulan berikutnya	Percepatan pengujian sampel fortifikasi di bulan berikutnya	Monitoring jenis sampling fortifikasi setiap bulan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Sampling Pangan Fortifikasi 0	Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 0%	- Sampel fortifikasi hingga TW1 adalah garam konsumsi Beryodium - Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 101.01%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Februari: - Sampling Pangan Fortifikasi 55	Kondisi Maret: - Semua sampel yg disampling (55 sampel) sudah selesai diuji - Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 90.91% dari target 90 dengan Capaian 101.01%	Kondisi Maret: - Realisasi fortifikasi yang MS 90.91%
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	close	close	Close

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan IV tahun 2022, dimana target tahun 2022 tidak tercapai karena lokasi sampling adalah spesifik wilayah stunting terendah, maka di tahun 2023, lokasi sampling adalah wilayah tinggi stunting dan rendah stunting. BBPOM di Surabaya tetap melaksanakan dan meningkatkan intervensi melalui pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi agar sarana produksi tetap konsisten menerapkan CPPOB dan tetap meningkatkan pengawasan Penandaan Pangan di sarana distribusi pangan fortifikasi.

SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap
Keamanan dan mutu obat dan makanan di
Lingkup BBPOM di Surabaya

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 32. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET BULANAN 2023	REALISASI BULANAN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Pebruari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-

Indeks Kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$\text{Indeks Nasional} = \sum [\sum (\bar{R}_a \times b) \times c]$$

Keterangan:

\bar{R}_a adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Pada triwulan I tahun 2023 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Survey pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat akan dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM bekerjasama dengan BPS.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Pada triwulan I tahun 2023 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM, sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Hasil Survey Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat baru diperoleh pada bulan November 2023. Pengambilan data baru akan dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2023 belum didapatkan hasil pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil survey kesadaran (*awareness*) masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2022 didapatkan bahwa nilai pengetahuan masyarakat adalah 83,47; nilai sikap masyarakat adalah 84,59 dan nilai perilaku masyarakat adalah 76,63.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, namun belum diikuti dengan perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait membaca informasi pada label/kemasan dan menyimpan produk sesuai informasi pada label.

Indeks kesadaran masyarakat ini secara nasional diukur terhadap komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan dengan hasil sebagai berikut: obat 84,20 (Baik); Obat Tradisional 79,47 (Baik); Suplemen Kesehatan 79,95 (Baik); Kosmetik 79,82 (Baik); Pangan Olahan 82,80 (Baik).

Dari survey diketahui bahwa pengetahuan masyarakat cenderung meningkat, terutama terkait variable kadaluwarsa dan informasi label tetapi perlu peningkatan pengetahuan terkait produk dengan NIE. Tingkat persepsi masyarakat terhadap informasi KLIK pada produk

memiliki nilai yang tinggi (Sikap yang positif), hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap penting adanya informasi yang terdapat pada produk. Perilaku masyarakat cenderung meningkat pada semua variable, tetapi perlu peningkatan pada perilaku membaca informasi pada label/kemasan produk.

Pengetahuan masyarakat tentang BPOM sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tren ini menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan semakin diketahui oleh masyarakat, terutama setelah terjadi pandemi Covid 19 maupun kejadian-kejadian lain yang terjadi di masyarakat misalnya kasus EG DEG, dll.

Beberapa variabel yang ditanyakan saat survey kesadaran masyarakat antara lain adalah: 1) pengetahuan masyarakat terhadap obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Pertanyaan yang diajukan antara lain tentang : petunjuk penyimpanan, produk yang tidak terdaftar di BPOM, dan tanggal kedaluwarsa produk. Hal lain ditanyakan antara lain adalah: pengetahuan masyarakat terkait logo obat, pengetahuan masyarakat terkait makanan/minuman yang mengandung bahan berbahaya untuk dikonsumsi, pengetahuan masyarakat terkait obat tradisional yang mengandung BKO, pengetahuan masyarakat terkait kosmetik yang mengandung merkuri, pengetahuan masyarakat terkait cara membuang sisa obat yang benar.

Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu misalnya dengan memperhatikan izin edar, kemasan dan tanggal kadaluwarsa. Namun masih banyak juga yang belum mengetahui produk yang tidak terdaftar di BPOM atau membeli produk yang memiliki NIE. Masyarakat telah memperhatikan bagaimana menyimpan produk dengan aman dan menggunakan sesuai petunjuk yang ada di label. Namun masih juga ditemui masyarakat yang belum mengetahui adanya produk Obat dan Makanan berbahaya yang beredar. Masyarakat juga tidak mengetahui logo obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Dari hasil survey juga diketahui bahwa sikap masyarakat merupakan indikator pembentuk indeks kesadaran yang nilainya paling tinggi yaitu 84,59 dan yang paling rendah adalah faktor perilaku yaitu 76,63. Perubahan perilaku memang tidak dapat terjadi dalam jangka pendek. Karena itu harus ada upaya terus menerus untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan BBPOM Surabaya dalam melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling

efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat. Masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar tinggal di pedesaan ternyata tidak banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama tetap mempunyai manfaat yang tidak dapat digantikan oleh media sosial. Karena itu BBPOM di Surabaya tetap melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Jawa Timur sebagai juru tutur atau penyambung lidah BBPOM Surabaya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu.

Pada masa pemulihan dari pandemi covid 19, BBPOM di Surabaya harus menyesuaikan strategi pemberian informasi kepada masyarakat. Informasi melalui media sosial menjadi pilihan yang dirasa tepat dan paling efektif pada kondisi sekarang ini. Masa pandemi covid 19 telah menyebabkan terjadinya transformasi digital yang sangat drastis. Layanan informasi yang semula dilakukan secara langsung sekarang harus disertai dengan layanan melalui telpon dan media social antara lain WhatsApp, email, google review, Instagram, Twitter, dll. Masyarakat selalu mencari media sosial jika ingin mengetahui seluk beluk suatu organisasi. Selama triwulan I tahun 2023 BBPOM di Surabaya telah memberikan layanan sejumlah 1.058 layanan tatap muka langsung, melalui WhatsApp, telpon, email dan google review. Selain itu BBPOM di Surabaya menambahkan layanan konsultasi melalui zoom meeting bagi konsumen yang menghubungi nomor WhatsApp BBPOM di Surabaya menggunakan platform kegiatan Cangkrukan namun dengan tagline “Anda Menanyakan Kami Menjawab”. Selama triwulan I tahun 2023, BBPOM di Surabaya telah melaksanakan kegiatan Cangkrukan sebanyak 5 kali yang diikuti oleh 49 peserta terdiri dari beberapa kelompok masyarakat antara lain mahasiswa, UMKM Pangan Olahan, Industri Pangan, kelompok usaha pangan, dll. Topik yang disampaikan dalam Cangkrukan antara lain Notifikasi Kosmetik, Pendaftaran Pangan Olahan versi Baru, IP CPPOB melalui e sertifikasi, ING, Label, dan lain lain. Selain itu, pada bulan Maret, BBPOM Surabaya melaksanakan operasionalisasi Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan Takjil di wilayah Karang Menjangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pedagang kreatif lapangan yang berjualan di sekitar wilayah jalan Karang Menjangan tentang prinsip prinsip keamanan pangan, bagaimana menerapkan hygiene dan sanitasi, bagaimana mengenali tanda tanda pangan yang mengandung bahan berbahaya yang sering disalagunakan pada pangan, dll. Kegiatan ini melibatkan kurang lebih 33 orang pedagang kreatif lapangan bersama lintas sektor terkait. Pengawasan pangan takjil selama bulan Ramadhan sangat

penting terutama karena meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap pangan siap saji yang dijual oleh pedagang kreatif lapangan.

Masyarakat memanfaatkan layanan melalui media sosial ini secara maksimal karena telah terbiasa menggunakan layanan melalui media sosial selama masa pandemi covid 19 dan hal ini terbukti direspon secara positif oleh masyarakat meskipun masa pandemi sudah semakin mereda. Media sosial lain yang dimanfaatkan oleh BBPOM Surabaya misalnya Instagram, Twitter, dan Facebook. Selama Triwulan I tahun 2023, BBPOM Surabaya telah menayangkan 211 layanan informasi melalui 3 media sosial tersebut dengan topik antara lain Kosmetik Aman, Obat Tradisional Aman, Suplemen Kesehatan Aman, Cek KLIK, bahaya obat ilegal, kenali ciri ciri obat ilegal, dampak penggunaan obat ilegal, pendaftaran pangan, perubahan registrasi pangan, kenali logo pada kemasan obat, ciri ciri kosmetik bermerkuri, pilih kosmetik dengan aman, fungsi utama kosmetik, dll. Selain itu BBPOM Surabaya juga selalu menayangkan infografis dan video informasi pada kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat atau lintas sektor, hasil pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya, dll. Selain melalui media sosial yang sedang menjadi sumber informasi utama bagi kaum milenial, selama triwulan I tahun 2023, BBPOM Surabaya juga melakukan sosialisasi dan pemberian informasi melalui media elektronik melalui Radio Mandala FM Banyuwangi, Radio Suara Giri FM Gresik, Radio Suara Surabaya, Radio Gita Jombang, Radio Mandala, Radio Maja Mojokerto, iklan Youtube, Google Display Network, dan Metro TV dengan berbagai topik tentang Obat dan Makanan yang sangat penting untuk diketahui masyarakat antara lain: Resistensi antimikroba, Waspada obat ilegal, buang sampah obat dengan benar, Stop penggunaan antibiotik sembarangan, Ingat CEK KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa), Suara Konsumen BBPOM di Surabaya, CEK KLIK Kosmetik, Cek kosmetik aman dengan BPOM Mobile, Pendampingan izin edar, Tampil menawan dengan kosmetik aman. Selain melalui media elektronik, BBPOM Surabaya juga memanfaatkan media cetak antara lain Koran Radar Surabaya (gerbangkertasusila) dengan topik Konsultasi pendaftaran izin edar dan Konsultasi pemasukan barang bawaan pribadi.

BBPOM Surabaya memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terutama pada saat menjadi narasumber berdasarkan undangan dari lintas sektor, perguruan tinggi, asosiasi, maupun berbagai komunitas lainnya.

Pada Triwulan I tahun 2023, BBPOM Surabaya telah memberikan informasi secara langsung melalui berbagai kegiatan misalnya pada Peringatan Hari Gizi, Pelatihan pengolahan ubi jalar dan ubi kayu, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Pangan, Peningkatan

Kapasitas Pengetahuan Hygiene Sanitasi Penjamah Makanan, Pelatihan Income Generating/ Peningkatan Pendapatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP), Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Pelatihan Penyegaran Kendali Mutu Internal IKM Garam Beriodium, Seminar Pemenuhan Standar Keamanan Pangan bagi Wirausaha Baru IKM Pangan, Sosialisasi Keamanan Pangan bagi Kader Pangan PKK Kecamatan dan Kelurahan Surabaya I, Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Hygiene Sanitasi Penjamah Makanan, Diagnosa Holistik Kestrada Berbasis Penyebab Penyakit dan CPOTB bagi Penyehat Tradisional, Pelatihan sertifikasi mutu produk perikanan, Pelatihan Keamanan Pangan PIRT Dinkes Sidoarjo, Kuliah Food Licensing and Registration, Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Kader PKK Kota Surabaya, Seminar Nasional Kefarmasian " Membangun Aptoketer Muda Berjiwa Pharmapreneurship", Pengenalan GMP Bagi Pelaku Usaha UMKM. Semua upaya bersama lintas sektor dan komponen koordinasi penta helix bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di berbagai lini dan peran akan pentingnya keamanan dan mutu Obat dan Makanan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 34. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
6 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	BMB.001.051	Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A. Penyebaran Informasi Melalui Media	80 pkt lelang	6	8	7	15	7	11

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator selama Triwulan I tahun 2023 BBPOM Surabaya antara lain pembuatan video; iklan layanan masyarakat di radio Surabaya, Gresik, dan Banyuwangi; penyebaran informasi melalui SMS Blast Telkomsel di Sampang; penyebaran informasi Google Display Network dan youtube; pemasangan informasi konsultasi di koran Radar Surabaya (Gerbangkertasusila); serta pemasangan informasi Cek KLIK di Metro TV. Dengan aktifnya penyebaran informasi melalui media cetak maupun elektronik, di harapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan obat dan makanan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 35. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	95.008.650	95.008.650	100	-	-

Efisiensi anggaran pada triwulan I tahun 2023 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Tidak ada revisi anggaran pada RO yang ditagging untuk pencapaian indikator indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan makanan aman dan bermutu.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 36. Tindak lanjut rekomenasi hasil evaluasi capaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	Belum ada kegiatan KIE. Mengoptimalkan sosialisasi di media sosial, media eletronik/non elektronik. Publikasi di media elektronik/non elektronik anggaran terbatas, sehingga publikasi tidak bisa terlalu lama/terbatas	- menggali media informasi yang diminati masyarakat - mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat, untuk ditindaklanjuti dengan memberikan materi KIE/sosialisasi/penyebaran informasi yang sesuai - memperluas cakupan penyebaran informasi	penyebaran informasi khususnya untuk kelompok difabel belum maksimal
Rekomendasi Perbaikan	- Segera merealisasikan kegiatan KIE langsung kepada masyarakat - melakukan pemetaan prioritas media publikasi dan informasi yang diberikan kepada masyarakat	- penyempurnaan materi penyebaran informasi kepada masyarakat - menambah ragam media/konten komunikasi/publikasi - kerja sama dengan pemda yang diintervensi PN untuk publikasi informasi/kegiatan	membuat media informasi untuk kelompok difabel tuna netra dan tuna rungu
Rencana Aksi	- komunikasi dengan para TA untuk agenda pelaksanaan KIE secara langsung - komunikasi dengan pihak penyedia untuk pelaksanaan publikasi di media elektronik/non elektronik	- Membuat konten yang lebih beragam - membuat materi penyebaran informasi berdasarkan isu terkini	- menyusun konten informasi yang akan dibuat dalam bentuk huruf braille dan menggunakan bahasa isyarat
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	-	- variasi konten yang terbatas	belum ada media informasi untuk kelompok rentan dengan informasi terkini
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Terlaksananya layanan publikasi di medsos, media elektronik/non elektronik, dan terlaksananya KIE secara langsung	Konten lenih variatif, ragam media komunikasi lebih banyak	Memilikik media informasi untuk kelompok difabel
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	close	close	open

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target IKU tahun 2022 telah tercapai dengan capaian 102,86%. Namun demikian, sejak akhir tahun 2022 hingga triwulan I tahun 2023 Badan POM diterpa isu sirup obat yang mengandung Etilen Glikol (EG)

dan Dietilen Glikol (DEG) sehingga dikhawatirkan nilai indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu akan menurun di tahun 2023 seiring dengan tidak stabilnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Badan POM. Oleh karena itu dilakukan peningkatan upaya sosialisasi Obat dan Makanan melalui media cetak dan elektronik, terlihat dari peningkatan target dari 50 layanan di tahun 2022 menjadi 80 layanan di tahun 2023. Diharapkan upaya ini dapat membuat kepercayaan masyarakat kepada Badan POM khususnya Balai Besar POM di Surabaya dapat kembali meningkat dan target IKU tahun 2023 dapat tercapai.

SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap Kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya

Pencapaian tersebut didukung oleh 3 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

1. **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan**
 - a. **Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023**

Tabel 37. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET BULANAN 2023	REALISASI BULANAN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Pebruari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-

Pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

Rumus penghitungan indeks:

$$\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (\hat{E}Jk \times b) \times c)$$

Keterangan:

$\hat{E}Jk$ adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:

- Aspek kepuasan: Tangible (0,16), Reliability (0,30), Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), dan Empathy (0,17)
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110)
- Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.

Hingga triwulan I tahun 2023 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan. Hasil sepenuhnya akan diperoleh di triwulan IV. Sedangkan hasil sementara yang diperoleh di bulan Maret 2023 adalah 94,38.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan diberlakukan di sepanjang tahun 2023. Administrator Balai dapat menarik data kepuasan pelaku usaha secara mandiri melalui link survei yang diberikan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan. Pada triwulan I belum dapat dilakukan perbandingan.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 38. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,7	-	-	-

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan triwulan I tahun 2023 belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2023, karena nilai indeks baru diperoleh di akhir tahun.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada triwulan I dilakukan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk pelaku UMK pangan olahan, Bimbingan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik dalam rangka SPA CPOTB Bertahap, Bimbingan Teknis Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik dalam rangka SPA CPKB, dan Desk Konsultasi dalam rangka penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik di Kabupaten Tuban, Kota Malang dan Kabupaten Gresik. Dari seluruh kegiatan tersebut, telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan sistem IKEPU (Indeks Kepuasan Pelaku Usaha) sesuai arahan dari PRKOM untuk menilai kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik petugas BBPOM di Surabaya. Kegiatan berlangsung pada bulan Maret 2023 dan mendapat nilai sementara 94,38 melebihi target tahun 2023. Namun nilai ini masih akan berubah hingga diperoleh nilai akhir di akhir tahun 2023.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 39. Rencana Aksi pada Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	B Sosialisasi dan Desk registrasi dalam rangka jemput bola Registrasi Pangan Olahan	2 kegiatan	0	0	0	0	0	0
	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	C Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Obat Tradisional	1 kali/trip	0	0	0	0	1	1
			D Penguatan Dan Perluasan Program Pemberdayaan Jamu Gendong Melalui Fasilitator UMKM	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			E PELATIHAN FASILITATOR UPT BPOM PENYULUH KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PENDAMPINGAN PENERAPAN CPPOB/HACCP di UMKM	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			G Klinik POM	2 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			H Peningkatan Kapasitas UPT dalam rangka percepatan/kemudahan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan mapping untuk UMKM naik tahapan CPOTB	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0

Kegiatan bimbingan dan pembinaan yang dilakukan BBPOM di Surabaya pada triwulan I meliputi Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik secara daring dan Desk Consultation Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) untuk UMK Pangan Olahan dalam rangka Gempur Jatim secara luring dan hybrid. Selain pendampingan kepada UMK pangan olahan juga dilakukan pendampingan UMKM obat

tradisional melalui inovasi Sippotra yang meliputi bimbingan teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap (CPOTB Bertahap) untuk UKOT dan UMOT secara daring. Pendampingan bagi UMKM kosmetik juga telah dilakukan melalui inovasi Jatim Glowing yaitu bimbingan teknis Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Kegiatan Desk Konsultasi IP CPPOB dilakukan berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten/Kota untuk mempermudah proses perbaikan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 40. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN 20212	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase obat yang memenuhi syarat	16.800.000	16.800.000	100	-	-

Efisiensi anggaran pada triwulan I tahun 2023 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Telah dilakukan revisi anggaran di triwulan I untuk menambah kegiatan pertemuan pada inovasi klinik pom yang merupakan upaya pendampingan pelaku usaha untuk melakukan registrasi produk yang bekerjasama dengan DPMPTSP di kabupaten di Jawa Timur. Diharapkan hal ini dapat membantu meningkatkan nilai indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 41. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	Belum dilakukan kegiatan bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	Belum dilakukan kegiatan bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	Tidak semua peserta mengisi survei keluasan pelaku usaha sehingga hasil yang diperoleh tidak mencerminkan seluruh peserta
Rekomendasi Perbaikan	1. Mengadakan kegiatan Bimtek CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB Bertahap pada bulan Maret 2. Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala 3. Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala	1. Mengadakan kegiatan Bimtek CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB Bertahap pada bulan Maret 2. Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala 3. Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala	1. Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala 2. Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala
Rencana Aksi	1. Mengadakan kegiatan Bimtek CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB Bertahap pada bulan Maret 2. Mengadakan desk konsultasi	1. Mengadakan kegiatan Bimtek CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB Bertahap pada bulan Maret 2. Mengadakan desk konsultasi	1. Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala 2. Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala

Keterangan	Januari	Februari	Maret
	IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala 3. Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala	IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala 3. Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala	
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Tidak terdapat hasil survei kepuasan pelaku usaha	Tidak terdapat hasil survei kepuasan pelaku usaha	Terdapat hasil survei kepuasan pelaku usaha untuk kegiatan bulan Maret dengan nilai 94,38
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Februari: - Tidak terdapat hasil survei kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	Kondisi Maret: - Terdapat hasil survei kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	Kondisi April: -
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	open	close	open

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Meskipun target indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan tahun 2022 sudah mencapai target, namun tetap dilakukan upaya penambahan kegiatan pendampingan pelaku usaha pada triwulan I tahun 2023. Hal ini dilakukan agar tidak ada penurunan nilai indeks di tahun 2023.

2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 42. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET BULANAN 2023	REALISASI BULANAN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Pebruari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-

Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Nasional} = \sum [\sum (\bar{R}_a \times b) \times c]$$

Keterangan:

\bar{R}_a adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi (1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa; (2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan; (3) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran; (4) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

Pada triwulan I tahun 2023 belum diperoleh hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang bekerjasama dengan BPS.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Pada triwulan I tahun 2023 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM, sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Hasil

Survey Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat baru diperoleh pada bulan November 2023. Pengambilan data baru akan dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2023.

c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,55	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2023 belum didapatkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Dari hasil survey Kepuasan Masyarakat selama 4 tahun terakhir terlihat bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan indeks kepuasan masyarakat yang sangat signifikan. Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut diukur baik secara langsung maupun tidak langsung. Indeks kepuasan yang diukur secara langsung yaitu dilihat sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles).

Sebagai salah satu upaya meningkatkan pemberian informasi dan memberikan layanan informasi yang lebih baik, BBPOM Surabaya telah melahirkan sebuah inovasi Cangkrū'an (Bincang dengan Kru Layanan). Cangkrū'an adalah terminology yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Jawa Timur dan di lingkungan Arek pada umumnya (Surabaya dan Malang Raya) sebagai kegiatan bersosialisasi dalam forum yang sangat informal dan sangat cair. Cangkrū'an biasanya dilakukan di pos ronda, warung kopi, taman, atau tempat tempat berkumpul masyarakat yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. BBPOM Surabaya mengadop konsep Cangkrū'an menjadi layanan informasi interaktif antara BBPOM Surabaya dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dan sekaligus kesempatan untuk konsultasi terkait berbagai ketentuan dan peraturan perundang undangan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan Cangkrū'an ini mendapat sambutan yang sangat menggembirakan dari masyarakat pelaku usaha maupun yang baru akan memulai berusaha. Masih dalam format Cangkrū'an, BBPOM Surabaya juga memberikan layanan konsultasi informasi secara langsung yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan melalui zoom meeting dalam format AMKM "Anda Menanyakan Kami

Menjawab” dimana setiap pelanggan dilayani oleh seorang pemberi layanan informasi melalui zoom meeting.

Selama Triwulan I tahun 2023, BBPOM Surabaya telah melaksanakan 5 kali kegiatan Cangkru’an dengan jumlah total peserta 49 orang. Topik yang disampaikan pada kegiatan Cangkru’an antara lain adalah : Tata cara Registrasi Pangan Olahan versi Baru, Label pada Pangan Olahan, Kosmetika, IP CPPOB, dan konsultasi langsung melalui forum AMKM.

BBPOM Surabaya baru baru ini juga melahirkan program inovasi baru yaitu Jatim Truly (Jawa Timur Trusted Culinary) yang merupakan program pendampingan dan bimbingan teknis serta stikerisasi untuk para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang biasanya berlokasi di daerah daerah wisata. Program ini dimulai di kota yang terkenal sebagai daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur yaitu Kota Batu. 100 orang lebih pedagang kreatif lapangan telah mendapatkan pengetahuan tentang keamanan pangan terutama tentang hygiene dan sanitasi serta penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan. Setelah mendapatkan pengetahuan dan informasi, para PKL mendapatkan praktek langsung bagaimana menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan pada gerobak mereka (street food booth/stall). Setelah memenuhi semua persyaratan, para PKL akan mendapatkan stiker keamanan pangan dari BBPOM Surabaya.

Website BBPOM Surabaya terus ditingkatkan tampilan dan isinya sehingga mampu menjadi pilihan pertama bagi masyarakat yang ingin mencari informasi tentang Obat dan Makanan. Fitur FAQ telah ditambahkan pada website BBPOM Surabaya sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi. Selain website BBPOM Surabaya, media sosial resmi BBPOM Surabaya lainnya, misalnya Instagram, Twitter, Facebook diharapkan juga menjadi pelengkap bagi website BBPOM Surabaya sebagai sumber informasi. Semua media sosial ini diharapkan memuat informasi yang saling mengisi dan melengkapi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang paripurna. Jika masyarakat masih membutuhkan informasi dalam rangka konfirmasi dan klarifikasi masih tersedia layanan telepon, email dan WhatsApp yang dapat diakses kapan saja.

Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan website BBPOM Surabaya harus ringkas, menarik dan up to date serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap waktu untuk menangkal informasi sampah/HOAKS yang banyak beredar di masyarakat. Badan POM baru saja mengeluarkan Tagline baru yaitu KATA BPOM untuk menangkal berbagai isu negative dan Hoax yang beredar di masyarakat. Sebagai instansi yang berbasis ilmiah terkadang BBPOM Surabaya menyampaikan informasi yang terlalu ilmiah dengan bahasa yang sangat ilmiah sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat.

Agent of Change BBPOM Surabaya yang terdiri dari kelompok milenial menjadi harapan bagi BBPOM Surabaya agar mampu membuat desain dan tampilan informasi di media sosial yang sederhana, menarik, informatif dan mudah dimengerti oleh masyarakat. BBPOM di Surabaya juga membentuk kader dan duta untuk menjadi Agent of Change BBPOM di Surabaya untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat di lingkungan terdekatnya.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang kedua yaitu melalui pengukuran indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (reliability), tindakan (responsiveness), memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (empathy) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat. Kasus EG DEG yang terjadi pada tahun 2022 harus menjadi peringatan dan kewaspadaan bagi BPOM agar senantiasa meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan sehingga dapat mengantisipasi semua tahap dan perilaku usaha di bidang Obat dan Makanan agar bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkannya. Tindakan pengawasan yang dilakukan secara cepat dan tepat dalam mengatasi kasus EG DEG diharapkan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada BPOM. Masyarakat awam membutuhkan informasi yang menenangkan dan membuat mereka yakin akan produk yang akan dikonsumsi. Regulatory Action yang dilakukan BPOM memaksa semua pelaku usaha mengevaluasi kembali semua SOP dan tahapan yang mereka lakukan dan meyakinkan masyarakat bahwa produk yang mereka hasilkan aman dikonsumsi. Tindakan bersama sama yang dilakukan semua pihak baik BPOM, Pelaku Usaha, Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan iklim usaha yang sehat.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 44. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	QDC.001.051	Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	A Pemberdayaan Masyarakat Melalui Webinar Keamanan Obat dan Makanan	2 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			B Pemilihan Duta Jamu Jawa Timur (Obat Tradisional Aman dari Bahan Kimia Obat)	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			C Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling	8 kali/trip	0	0	0	0	0	2
			D Penyebaran Informasi Keamanan Obat dan Makanan Melalui Pameran	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			E Penyebaran Informasi dan Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0
	QDC.001.052	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan	A Pelatihan Peningkatan Kompetensi	2 kegiatan	0	0	0	0	1	0
			B Koordinasi Teknis Antar Instansi	30 kali/trip	0	1	3	0	3	3
			C Pemantauan Toksikovigilans	3 bulan	0	0	0	0	0	0
			D Sosialisasi Pelaporan Data	2 kegiatan	0	0	0	0	0	0

Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada masyarakat dilakukan oleh BBPOM Surabaya melalui berbagai media baik media sosial, media cetak, media elektronik. Pemberian layanan informasi melalui tatap muka langsung telah dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selama triwulan I tahun 2023 BBPOM Surabaya telah melakukan pemberian informasi sebanyak 1.340 melalui berbagai media antara lain WhatsApp, website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, sms blast, radio, televisi, webinar (Cangkruan) dan pameran. Selain itu BBPOM Surabaya juga memberikan berbagai materi pemberian informasi sesuai dengan permintaan stakeholder. Selama Triwulan I tahun 2023, BBPOM Surabaya telah memenuhi permintaan narasumber sebanyak 19 kegiatan pemberian informasi/sosialisasi/bimbingan teknis dll. Topik yang disampaikan antara lain Keamanan Pangan dengan memperhatikan ING, Penerapan keamanan pangan, Keamanan dan mutu pangan, Bahan Tambahan Pangan dan CPPB IRT, Pengawetan Pangan, Registrasi Pangan, Label Pangan, Aspek Higiene dan Sanitasi CPOTB, Good Manufacturing Practices pada Pangan Olahan, Membangun Jiwa Pharmapreneurship yang jujur, berintegritas dan amanah.

BBPOM Surabaya juga melaksanakan pengawasan pangan selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Iedul Fitri sebagai bagian dari pengawasan pangan dan jaminan kepada masyarakat agar dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 45. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	5.396.000	5.396.000	100	-	-

Efisiensi anggaran pada triwulan I tahun 2023 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Tidak ada revisi anggaran untuk kegiatan kegiatan yang ditagging pada IKU ini.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 46. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	Adanya pelaku usaha yang terkendala dan belum memahami tata cara pendaftaran melalui aplikasi	Perlunya variasi kegiatan yang menunjukkan kinerja BPOM dan adanya harapan pemda kepada BPOM	- Masih adanya produk ilegal di masyarakat - Perlunya melakukan kegiatan

Keterangan	Januari	Februari	Maret
	yang terintegrasi dengan OSS RBA		pengawasan pangan di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri
Rekomendasi Perbaikan	Melakukan FGD dengan lintas sektor untuk menyampaikan program pendampingan kepada UMKM binaan	membuat program yang sinergi dengan pemda dan terintegrasi dengan kegiatan dari BPOM	meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor dalam kegiatan pengasaan, serta melakukan penelusuran pengaduan masyarakat yang masuk sebagai tindak lanjut sebagai informasi awal apabila terjadi pelanggaran
Rencana Aksi	- melakukan FGD dengan lintas sektor - Publikasi kinerja melalui berita aktual dan media sosial	Dengan terlaksananya program pembinaan kepada PKL kota Batu, maka perlu Publikasi Launching inovasi jatim truly yang melibatkan tokoh masyarakat	- adanya temuan OT ilegal di Banyuwangi, diadakan press release dan melakukan publikasi Kegiatan temuan jamu ilegal di Banyuwangi - melakukan publikasi kegiatan intensifikasi pengawasan pangan di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	perlu nya perluasan penyebaran informasi atas kinerja BPOM	perlu nya perluasan penyebaran informasi atas kinerja BPOM	perlu nya perluasan penyebaran informasi atas kinerja BPOM
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Telah dilakukan publikasi kegiatan melalui berita aktual dan media sosial	Telah dilakukan publikasi kegiatan melalui berita aktual dan media sosial	Telah dilakukan publikasi kegiatan melalui berita aktual dan media sosial
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	close	close	close

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target IKU tahun 2022 telah tercapai, namun target periode akhir renstra masih belum tercapai. Untuk perbaikan branding Balai Besar POM di Surabaya, pada triwulan I tahun 2023 telah diciptakan inovasi Jatim Truly yang merupakan upaya pembinaan dan stikerisasi pada para pedagang kaki lima disekitar daerah wisata. Inovasi ini telah mendapat dukungan dari pemda setempat. Diharapkan hal ini dapat menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BBPOM di Surabaya di Provinsi Jawa Timur.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 47. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET BULANAN 2023	REALISASI BULANAN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Pebruari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat sesuai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Surabaya terhadap penerima layanan informasi, penerima layanan Surat Keterangan Impor/Ekspor (SKI/SKE), dan penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas sektor). Data hasil survei diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi SAPA APIP dan hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat BBPOM Surabaya adalah 91,8 dari target yang ditetapkan 90,5.

Pada triwulan I tahun 2023 belum diperoleh Indeks Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dari Tim Penilai UPP. Pada tahun 2023 ini BBPOM Surabaya dipilih untuk mewakili BPOM dalam penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan katagori Pelayanan Prima dan penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik untuk Kelompok Rentan.

- b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**
Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
- c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 48. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91	-	-	-

Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM baru diperoleh di akhir tahun sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target tahun 2023.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Dari hasil penilaian Unit Pelayanan Publik tahun 2022 yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik 4,90 bagi BBPOM di Surabaya menunjukkan lompatan yang sangat besar jika dibandingkan hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2021 sebesar 4,52. Belajar nilai IPP tahun 2022, di tahun 2023 BBPOM Surabaya melakukan berbagai upaya sesuai aspek penilaian indeks pelayanan publik terutama yang masih belum optimal, antara lain sbb:

- Melakukan Revisi Standar Pelayanan Publik terutama terkait dengan pemenuhan hak hak kelompok rentan. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik, BBPOM Surabaya harus memfasilitasi semua kepentingan dan kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan, tidak terkecuali mereka yang termasuk dalam katagori kelompok rentan yaitu disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, dan korban bencana sosial serta korban bencana alam. Tujuan dari revisi Standar Pelayanan Publik ini adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan sesuai dengan tujuan negara demokrasi bahwa “*no one left behind*”
- Melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. BBPOM Surabaya mengembangkan berbagai inovasi dengan tujuan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan publik di BBPOM Surabaya. Selain itu inovasi juga diharapkan mempermudah petugas pemberi layanan publik melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan sebaik mungkin. Sampai saat ini BBPOM Surabaya telah mengembangkan 31 inovasi baik untuk internal maupun eksternal. Inovasi terbaru adalah Jatim Truly (Jawa Timur Trusted Culinary) sebagai bentuk pendampingan dan pembinaan kepada para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) tentang penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan dan stikerisasi bagi PKL yang telah menerapkan keamanan pangan.
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan *soft skill* pelayan publik. Kemampuan berkomunikasi dan menangani keluhan pelanggan adalah kompetensi penting dan utama sebagai pemberi layanan publik.

- Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat mandiri secara periodik untuk melihat respon pelanggan terhadap pelayanan publik yang diberikan, serta melakukan tindak lanjut terhadap masukan yang diberikan oleh pelanggan.
- Meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga pelanggan merasa nyaman dan mendapatkan semua yang dibutuhkan, terutama untuk kelompok rentan. Sesuai dengan SE Menteri PANRB No. 66/2020 tentang Penyediaan Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ada 14 fasilitas yang harus disediakan bagi kelompok rentan. Keempat belas sarana prasarana tersebut meliputi kursi roda/tongkat/krek; pintu masuk yang mudah diakses; jalan landai dan pegangan rambat; lift khusus kelompok rentan disertai huruf braille; selasar yang menghubungkan semua ruang; toilet khusus; loket khusus; ruang tunggu khusus; serta guiding block dan parkir khusus. Kemudian, alat bantu tunanetra dan tunarungu; arena bermain anak; ruang laktasi/menyusui; serta fasilitas lain pendukung layanan seperti petugas pemandu ataupun petugas yang mampu berbahasa isyarat. Hampir semua fasilitas tersebut telah berusaha dipenuhi oleh BBPOM Surabaya kecuali lift khusus karena di BBPOM Surabaya tidak tersedia lift karena Gedung layanan publik hanya 2 lantai dan ruang layanan publik ada di lantai 1.
- Memberikan reward kepada petugas pemberi layanan.
- Meningkatkan responsive waktu pelayanan lebih cepat.
- Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik secara terus menerus.
- Memperbaiki dokumentasi proses penanganan pengaduan sehingga tertib dan mudah diakses sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penanganan pengaduan yang lebih baik.
- Menyediakan berbagai macam alternatif pelayanan publik yang dapat diakses oleh konsumen yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, demografi, dll. Prinsip dalam pelayanan publik adalah *no one left behind*, semua harus mendapat layanan yang setara.

Menerapkan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan larangan diskriminasi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 49. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A Forum Komunikasi Penerapan Dan Pelayanan SKI/SKE Dengan Lintas Sektor	1 kegiatan	0	0	0	0	1	0
			D Pemeriksaan Sarana Dalam Rangka Permohonan SKE/SKI	20 kali/trip	0	3	2	5	2	5
	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	A Peningkatan Kompetensi Pegawai	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			F Pelatihan dalam rangka percepatan/efisiensi penerbitan rekomendasi importir serta mempersiapkan kemandirian UPT BPOM dalam pengawasan importir OT dan SK	1 kali/trip	0	0	1	0	0	0

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan di lingkungan BBPOM Surabaya untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BBPOM Surabaya, bahkan beberapa hal dapat dipenuhi dengan sangat baik oleh BBPOM Surabaya misalnya timeline untuk rekomendasi SKI dan SKE. Pada tahun 2023 BBPOM Surabaya akan melakukan revisi Standar Pelayanan Publik untuk mengakomodir kebutuhan kelompok rentan. Berbagai fasilitas khusus untuk kelompok rentan telah disediakan oleh BBPOM Surabaya sehingga mereka mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pemberi layanan dilakukan peningkatan kompetensi SDM secara terencana dan terstruktur. Mengantisipasi lingkungan strategis yang semakin dinamis (VUCA) diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi paripurna dalam memberikan layanan. Kebutuhan SDM secara kuantitas sebagian dapat digantikan dengan pemanfaatan Sistem Informasi yang dapat mempercepat layanan, memberikan layanan yang konsisten, transparan dan akuntabel. Sistem informasi yang dikembangkan BBPOM Surabaya ditujukan untuk memberikan kemudahan dan transparansi serta kepastian kepada pelanggan. Telah dikembangkan *tracking system* untuk layanan pengujian pihak ketiga yaitu SURAMADU (Telusur Sampel Pihak Ketiga Terpadu) sehingga konsumen mengetahui dengan pasti status progress sample yang sedang diuji di laboratorium BBPOM Surabaya. Selain itu BBPOM di Surabaya juga telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk memudahkan pelayanan publik misalnya : **Cangkrukan** (Bincang dengan Kru Layanan), **AMKM** (Anda Menanyakan Kami Menjawab), **Pinarak Rek**, **Serasi** (Sistem Informasi Registrasi dan Sertifikasi), dan **Gempur Jatim** (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), **SiPPOTra** (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), **Jatim Glowing** (Jawa Timur Global Cosmetic World Marketing), dan **Sketsa** (Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu Hari Saja). Selain inovasi yang membantu pelaku usaha, BBPOM Surabaya juga mengembangkan inovasi untuk mendukung *back office* dan mempercepat pelayanan publik yang diberikan BBPOM Surabaya. Inovasi yang bersifat internal ini dikembangkan untuk

mendukung kinerja pelayanan publik, menjaga integritas pegawai dan organisasi, menjamin profesionalisme dan *fairness*, serta akuntabilitas.

Pada awal tahun 2023, BBPOM Surabaya telah mengembangkan inovasi baru yaitu Jatim Truly (Jawa Timur Trusted Culinary) yang memberikan pendampingan dan Bimbingan Teknis bagi Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) agar dapat menerapkan prinsip-prinsip Keamanan Pangan sehingga mendukung pertumbuhan industri pariwisata di Jawa Timur.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 50. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	1.935.450	1.935.450	100	-	-

Efisiensi anggaran pada triwulan I tahun 2023 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Telah dilakukan revisi anggaran untuk penambahan biaya kegiatan baru yaitu Desk Monitoring dan Evaluasi Realisasi Impor. Diharapkan kegiatan ini dapat menunjang peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 51. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	Pengaduan masyarakat baik rujukan dari pusat/UPT lain dan pengaduan yang diterima langsung meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk itu perlu telaahan mendalam setiap pengaduan yang masuk apakah memerlukan pemeriksaan lapangan atau tidak	Petugas layanan belum secara konsisten menyampaikan penilaian layanan petugas kepada pelanggan, hal ini perlu dilakukan untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap layanan petugas	Adanya permintaan terbaru dari Biro Hukor sebagai PIC SKM, bahwa penetapan jumlah populasi mengikuti jenis layanan yang ada di SPP BPOM terbaru. Selama ini yang terdata adalah jumlah populasi di 3 layanan
Rekomendasi Perbaikan	Melakukan telaahan lebih mendalam untuk setiap pengaduan yang masuk	Petugas layanan konsisten memberikan kuesioner kepada pelanggan atau peserta ketika kegiatan narasumber	Melakukan pendataan kembali jumlah populasi berdasarkan jenis layanan yang ada di SPP BPOM
Rencana Aksi	mengoptimalkan kompetensi petugas layanan, peran verifikator, dan PIC pengaduan terkini di setiap fungsi untuk memudahkan monitor.	Briefing petugas layanan secara berkala yang mengingatkan petugas untuk mengirimkan kuesioner penilaian	Memilah data populasi berdasarkan jenis layanan di SPP BPOM
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Belum ada SK tim pengaduan dan hasil telaahan pengaduan konsumen	minimnya data hasil penilaian pelanggan terhadap petugas yanblik	Data populasi untuk 3 layanan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Terbentuknya SK tim pengaduan dan hasil telaahan pengaduan konsumen	terdapat hasil penilaian petugas layanan public	Data populasi berdasarkan jenis layanan di SPP BPOM
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	Close	Close	close

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 dan laporan kinerja interim triwulanan triwulan I tahun 2023, BBPOM di Surabaya harus berupaya lebih keras dan bekerja cerdas sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih baik. Konsultasi dan pemberian layanan secara insentif dilakukan melalui media sosial dan media lainnya. Dari hasil survei juga terlihat bahwa kompetensi dan perilaku pemberi layanan perlu mendapatkan perhatian khusus. Sedangkan tindak lanjut pengaduan masyarakat akan diupayakan setuntas mungkin sehingga masyarakat puas. Sarana pengaduan masyarakat juga telah diperbanyak melalui berbagai media dan *platform* sehingga masyarakat dapat melakukan pengaduan, memberikan saran dan masukan dengan lebih bebas. Kotak saran di kantor jelas tidak dapat diandalkan sebagai satu satunya sarana pengaduan. Karena itu BBPOM di Surabaya menambahkan fitur pengaduan melalui *website* BBPOM di Surabaya di www.bbpomsurabaya.pom.go.id. Website ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi baru tentang pendaftaran produk.

SASARAN STRATEGIS 4

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT
DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP
BALAI BESAR POM DI SURABAYA

Pencapaian tersebut didukung oleh 7 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 52. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2023	REALISASI BULANAN 2023	% CAPAIAN BULANAN 2023	KRITERIA
Januari	93	102,29	100,99	Memenuhi ekspektasi
Pebruari	93	88,43	95,08	Belum Memenuhi ekspektasi
Maret	93	98,02	105,40	Memenuhi ekspektasi

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan} = \frac{(A+B+C+D)}{4}$$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3)

Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada triwulan I tahun 2023, Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 140 keputusan/rekomendasi dari 136 keputusan/rekomendasi yang diterima. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan **telah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 105,40 % dan mendapat kriteria **memenuhi ekspektasi**.

- b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**
Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
- c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 53. Perbandingan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	98,02	105,40	Memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan I tahun 2023 **telah mencapai** target Tahun 2023, dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi hingga akhir tahun 2023.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**
Pada triwulan I, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 104,59%, karena terdapat 5 (lima) surat tindak lanjut tahun 2022 yang belum diselesaikan oleh petugas dan diselesaikan pada tahun 2023. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 100,0%, karena terdapat surat dari Pusat yang masuk telah ditindaklanjuti semua. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 87,50%, karena

terdapat 1 (satu) surat Pengaduan yang masuk belum selesai ditindaklanjuti. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat memperoleh hasil 100% karena semua surat rekomendasi sudah ditindaklanjuti.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 54. Rencana Aksi pada Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		JANUARI		PEBRUARI		MARET	
				T	R	T	R	T	R		
10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	QIC.001.055	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D Tindak Lanjut Pengawasan Pengaduan Masyarakat	8	kali/trip	1	3	1	4	1	0
	QIC.004.053	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E Tindak Lanjut Pengawasan Pengaduan Masyarakat	29	kali/trip	2	12	3	3	4	4

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi triwulan I tahun 2023 adalah:

- Telah dilakukannya pemeriksaan sarana dalam rangka tindak lanjut hasil pengaduan dan pemeriksaan sebanyak 26 kegiatan.
 - Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM terkait produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)
- f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 55. Efisiensi Anggaran pada Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi	37.647.000	37.647.000	100	105,40	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Pada triwulan I tahun 2023 telah dilakukan revisi penambahan anggaran terhadap biaya perjadi tindak lanjut pengawasan pengaduan masyarakat untuk menindaklanjuti hasil pengaduan dan menindaklanjuti surat hasil pengawasan dari pusat khususnya kasus sirup obat yang mengandung EG dan DEG.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 56. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	- Penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2022 yang belum melewati timeline - Di awal tahun ada kasus ciki ngebul - Pemeriksaan sarana di pertengahan Januari 2023	- Belum semua surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dibuat - Surat dari Pusat masuk akhir Januari	- Belum semua surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dibuat - Terdapat 2 rekomendasi hasil pemeriksaan sarana bulan Januari, sampai akhir Pebruari belum dibuatkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana sehingga melewati batas timeline. - Surat pengaduan yang belum selesai tindaklanjutnya
Rekomendasi Perbaikan	- Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana 2022 - Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana bulan Januari	- Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana bulan Januari - Percepatan menindaklanjuti surat Pusat	- Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana bulan Pebruari dan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah timeline - Percepatan tindaklanjut surat Pengaduan
Rencana Aksi	- Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana	- Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana - Percepatan menindaklanjuti surat Pusat	- Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana - Percepatan menindaklanjuti surat Pengaduan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	- Belum dibuatnya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas	- Belum dibuatnya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas - Belum ditindaklanjuti surat Pusat	- Belum dibuatnya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas - Belum selesai ditindaklanjuti surat Pengaduan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	- Telah dilakukan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2022 - Petugas sudah mulai membuat surat tindak lanjut hasil pemeriksaan bulan Januari 2023	- Surat Pusat sudah ditindak lanjuti - Bulan Maret : Realisasi persentasi keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan didapatkan 100,93% dari target 96% sehingga diperoleh capaian 105,13%	- Surat Pengaduan belum selesai tindak lanjutnya - Progress Maret : Capaian sudah mendapatkan kriteria Baik tetapi terjadi penurunan % capaian dari 105,13% menjadi 102,10%. Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan pada TW II 2023
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	close	close	close

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan triwulan I tahun 2023, telah dilakukan percepatan capaian kinerja dengan memberikan teguran kepada petugas yang belum menindaklanjuti hasil pengawasan berdasarkan hasil monev yang dilakukan oleh ketua tim secara rutin setiap bulan. Selain itu juga telah dilakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, II, dan III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM di Surabaya, yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 57. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2023	REALISASI BULANAN 2023	% CAPAIAN BULANAN 2023	KRITERIA
Januari	77	53,85	69,93	Tidak Memenuhi ekspektasi
Pebruari	77	61,61	80,01	Belum Memenuhi ekspektasi
Maret	77	79,39	103,10	Memenuhi ekspektasi

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM di Surabaya kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Pada triwulan I tahun 2023 Balai Besar POM di Surabaya telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 120 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 73 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 103,10 % dengan kriteria Memenuhi ekspektasi.

- b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**
Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
- c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 58. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	77	79,39	103,10	Memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan I tahun 2023 **sudah mencapai** target tahun 2023 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target akhir tahun 2023 tetap dapat tercapai.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada triwulan I tahun 2023, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 58,77% karena sebagian CAPA yang diterima merupakan hasil pemeriksaan sarana pada tahun 2022 sedangkan pemeriksaan sarana tahun 2023 dimulai pertengahan bulan Januari sehingga CAPA yang dikirimkan pelaku usaha masih sedikit sekali. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor memperoleh hasil 100,0% karena selalu menanyakan melalui telepon maupun whatsapp ke Dinas Kesehatan agar memberikan feedback terhadap surat tindak lanjut yang telah dikirimkan. Dari hasil tersebut diatas, capaian persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (pelaku usaha dan lintas sector) masih tetap memenuhi dari target yang ditetapkan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 59. Rencana Aksi pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	QIC.004.055	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B Koordinasi/Konsultasi/Join Inspection	23 kali/trip	2	2	3	3	5	5
	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	B Koordinasi Lintas Sektor	60 kegiatan			1	9	2	8
	BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	A Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Obat dan Makanan	50 kali/trip	0	3	5	9	4	5

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan adalah:

- Koordinasi bersama lintas sektor meliputi bupati/walikota, dinas kesehatan, DPMPTSP, dinas perindustrian dan perdagangan, dan lain-lain.
- Sosialisasi kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya agar memberikan *feedback* atas hasil pemeriksaan sarana namun belum maksimal.
- Penggunaan aplikasi *Smart* POM yang berfungsi untuk mempercepat rekomendasi hasil pemeriksaan dan *feedback* lintas sektor (Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten) atas temuan hasil pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 60. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	135.942.299	135.942.299	100	103,10	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Di triwulan I tahun 2023 telah dilakukan revisi penambahan biaya Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Obat dan Makanan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 61. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	• Kurangnya kesadaran dan tidak adanya peraturan atau sangsi yang mewajibkan pemangku	• Kurangnya kesadaran dan tidak adanya peraturan atau sangsi yang mewajibkan pemangku	• Kurangnya kesadaran dan tidak adanya peraturan atau sangsi yang mewajibkan pemangku kepentingan

Keterangan	Januari	Februari	Maret
	kepentingan untuk memberikan feedback / mengirimkan CAPA/ tindakan perbaikan	kepentingan untuk memberikan feedback / mengirimkan CAPA/ tindakan perbaikan	untuk memberikan feedback / mengirimkan CAPA/ tindakan perbaikan
Rekomendasi Perbaikan	• Monev terhadap CAPA/ feedback dari pelaku usaha dan lintas sektor	• Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback / mengirimkan CAPA • Monev terhadap feedback / CAPA dari pelaku usaha dan lintas sector	• Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback / mengirimkan CAPA • Monev terhadap feedback / CAPA dari pelaku usaha dan lintas sector
Rencana Aksi	• Monev terhadap CAPA/ feedback dari pelaku usaha dan lintas sektor	• Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback - Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector	• Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback - Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector - Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke Dinkes terkait feedback dari surat tindak lanjut yang sudah dikirimkan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	- Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 58,33%	• Pelaku usaha dan/Lintas sector sedikit perlahan mulai memberikan respon terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya	- Pelaku Usaha dan/ Lintas sector tidak merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Bulan Pebruari : Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 86,61% dari target 77%	• Bulan Maret : Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 79,39 % dari target 77%	- Pelaku usaha mulai memberikan respon terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya dan lintas sektor (Dinkes) sudah ada yang memberikan respon - Progress Maret : Capaian sudah mendapatkan kriteria Baik tetapi terjadi penurunan % capaian dari 86,61% menjadi 79,39%. Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan pada TW II 2023
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	close	Close	close

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I tahun 2023, maka untuk percepatan pencapaian target indikator dilaksanakan pendekatan kepada lintas sektor karena feedback yang diberikan kepada BBPOM di Surabaya masih kecil. Hingga kemudian meningkat dari 53,85% menjadi 79,39% di akhir triwulan I tahun 2023. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan terkait tentang surat balasan dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 62. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan tepat waktu triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	99	93,97	94,92	Belum memenuhi ekspektasi
Februari	99	94,70	95,65	Belum memenuhi ekspektasi
Maret	99	95,36	96,33	Belum memenuhi ekspektasi

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu :}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA /evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik ; dan Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll.

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga triwulan I tahun 2023 diperoleh dari 4.402 (95,36%) sertifikat yang diterbitkan tepat waktu terhadap jumlah permohonan yang masuk sebanyak 4.616. Persentase capaian sebanyak 96,33% yang masuk dalam kriteria **belum memenuhi ekspektasi**.

b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 63. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	95,36	96,33	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan I tahun 2023 belum mencapai target Tahun 2023 dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi, dengan demikian perlu dilakukan upaya perbaikan berkesinambungan untuk mencapai target tahun 2023.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Kondisi pandemi yang masih terjadi pada triwulan I tidak menyebabkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi/audit sarana baik produksi maupun distribusi secara *on site* menjadi berkurang. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi secara *on site* dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pelaksanaan pemeriksaan sarana secara *on site* lebih diutamakan karena banyak pelaku usaha yang kurang memahami penjelasan petugas melalui media daring dan pelaku usaha merasakan dampak yang lebih baik saat dilakukan pemeriksaan sarana secara *on site*, terlebih untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama. Selain itu, petugas juga kesulitan melakukan pemeriksaan secara daring karena tidak dapat melakukan pengamatan secara

keseluruhan. Pada triwulan I seluruh pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi dilaksanakan secara *on site*.

Pelaksanaan audit sarana dalam rangka pemenuhan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik pada triwulan I diprioritaskan untuk pelaku usaha industri menengah dan besar. Hal ini dikarenakan salah satu persyaratan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik bagi usaha menengah besar adalah dengan dilakukan audit terlebih dahulu sedangkan pelaksanaan audit sarana bagi usaha mikro kecil dilakukan setelah Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik telah terbit, yaitu paling lambat 12 bulan setelah Izin Penerapan terbit. Pada triwulan I juga dilaksanakan pemeriksaan sarana dalam rangka Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik kepada usaha mikro dan kecil, terutama yang telah memiliki Izin Penerapan CPPOB mendekati atau lebih dari 12 bulan.

Pemeriksaan sarana dalam rangka Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap, Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, dan Sertifikasi CDOB hingga triwulan I telah diselesaikan tepat waktu sebanyak 100%. Sedangkan untuk penerbitan sertifikasi hasil pengujian pihak ketiga seluruhnya sesuai timeline. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen petugas dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengujian pihak ketiga dan pengaturan waktu pengerjaan sampel secara tepat. Selain itu, jumlah sampel pihak ketiga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama kondisi pandemi terdapat perubahan *timeline* SKI, yaitu bagi komoditi pangan menjadi 5 jam, komoditi obat dan kosmetik menjadi 2 jam. Namun perhitungan *timeline* SKI tetap sesuai peraturan yaitu 6 jam. Kendala dalam pemenuhan perubahan timeline tersebut, antara lain:

- Importir / eksportir tidak mengunggah dokumen yang lengkap dan benar sehingga terjadi penolakan oleh petugas saat evaluasi dokumen dan menyebabkan waktu penyelesaian dapat melebihi batas waktu.
- Terdapat gangguan pada sistem e-bpom sehingga dokumen yang telah dikirim oleh pelaku usaha tidak dapat dievaluasi.
- Terdapat evaluasi yang membutuhkan konsultasi dengan pusat sehingga membutuhkan waktu keputusan lebih lama.
- Sistem e-bpom tidak dilengkapi dengan kode/penandaan terhadap pengajuan SKI/SKE yang telah mengalami penolakan evaluasi dari pengajuan sebelumnya. Hal ini penting

bagi evaluator untuk dapat membedakan pengajuan yang harus dilakukan evaluasi kembali terlebih dahulu setelah dilakukan perbaikan oleh pemohon.

- Tidak terdapat notifikasi pada sistem e-bpom yang menunjukkan kepada konsumen bahwa dokumen yang masuk setelah jam 12 akan dikerjakan pada hari berikutnya. Hal ini menyebabkan importir / eksportir merasa bahwa evaluasi dokumen terlalu lama dan berdampak pada hasil survei kepuasan masyarakat.
 - Terdapat petugas sertifikasi baru yang belum memiliki kompetensi cukup untuk melakukan evaluasi SKI/SKE sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan evaluasi.
 - Terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan oleh petugas dalam waktu bersamaan dengan evaluasi SKI/SKE, misalnya melaksanakan audit sarana, melakukan konsultasi denah, melakukan evaluasi izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik secara bersamaan dengan evaluasi SKI/SKE.
 - Terkait *timeline* yang telah ditetapkan tersebut, petugas BBPOM di Surabaya berusaha untuk dapat memenuhi dengan melakukan prioritas evaluasi berdasarkan timeline masing-masing komoditi dengan urutan sebagai berikut evaluasi SKI penolakan, SKI komoditi obat, kosmetik, lalu pangan.
 - Untuk SKE, BBPOM di Surabaya sudah menetapkan *timeline* 1 hari sesuai dengan inovasi SKETSA. Adanya SKE yang tidak sesuai *timeline* disebabkan oleh kondisi tertentu yang harus dikonsultasikan lebih dulu ke Badan POM atau adanya gangguan sistem pada e-bpom
 - Sejak sistem e-bpom mulai migrasi dengan Pusat Data Nasional, seringkali terjadi kendala pada sistem sehingga mengganggu pemenuhan SLA yang telah ditetapkan. Mulai tahun 2022, pelayanan publik terutama terkait permohonan sertifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, Surat Pemenuhan Aspek Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (SPA CPKB), Sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik secara Bertahap (CPOTB Bertahap) menggunakan sistem online dimana waktu penyelesaian evaluasi dokumen yang telah diunggah juga harus sesuai dengan timeline yang ditetapkan sehingga dengan keterbatasan petugas harus mampu membagi waktu melakukan evaluasi dokumen sertifikasi dan evaluasi permohonan SKI/SKE.
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 64. Rencana Aksi pada Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	C Pemeriksaan Sarana Produksi Dalam Rangka Registrasi/Sertifikasi	189 kali/trip	12	27	17	41	17	29
	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	I Bimtek Inspektur Kosmetik	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah Pemeriksaan Sarana Produksi Dalam Rangka Registrasi/Sertifikasi. Keputusan sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB masih memenuhi timeline meskipun hasil keputusan tersebut tidak seluruhnya memenuhi ketentuan. Untuk mengatasi hal ini, petugas BBPOM di Surabaya memberikan layanan konsultasi pada saat pelaku usaha mengajukan permohonan. Diharapkan dengan adanya arahan tersebut, pelaku usaha dapat lebih cepat memenuhi ketentuan Cara Produksi yang Baik maupun Cara Distribusi yang Baik.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 65. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	121.320.000	105.946.700	87,33	96.33	100% (efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Pada triwulan I tahun 2023 telah dilakukan revisi untuk penyesuaian kebutuhan perjalanan dinas untuk audit dalam rangka sertifikasi dan registrasi Obat dan Makanan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 66. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem ebpom bermasalah sehingga tidak dapat diakses pada waktu tertentu padahal sudah banyak aju yang masuk. 2. Terdapat eksportir / importir yang tidak memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline 3. Petugas memiliki tugas yang harus dikerjakan dalam waktu bersamaan, misal audit sarana 4. Terdapat evaluasi yang membutuhkan konsultasi dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem ebpom bermasalah sehingga tidak dapat diakses pada waktu tertentu padahal sudah banyak aju yang masuk. 2. Terdapat eksportir / importir yang tidak memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline 3. Petugas memiliki tugas yang harus dikerjakan dalam waktu bersamaan, misal audit sarana dan karena ada petugas yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem ebpom bermasalah sehingga tidak dapat diakses pada waktu tertentu padahal sudah banyak aju yang masuk. 2. Terdapat eksportir / importir yang tidak memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline 3. Petugas memiliki tugas yang harus dikerjakan dalam waktu bersamaan, misal audit sarana dan karena ada petugas yang

Keterangan	Januari	Februari	Maret
	pusat sehingga membutuhkan waktu keputusan lebih lama. 5. Pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama 6. Pemenuhan persyaratan SPA (Surat Pemenuhan Aspek) CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama	sakit 4. Terdapat evaluasi yang membutuhkan konsultasi dengan pusat sehingga membutuhkan waktu keputusan lebih lama. 5. Pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama 6. Pemenuhan persyaratan SPA (Surat Pemenuhan Aspek) CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama	sakit 4. Terdapat evaluasi yang membutuhkan konsultasi dengan pusat sehingga membutuhkan waktu keputusan lebih lama. 5. Pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama 6. Pemenuhan persyaratan SPA (Surat Pemenuhan Aspek) CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama 7. Terdapat petugas baru di Sertifikasi sehingga belum dapat melaksanakan tugas Sertifikasi dengan cepat
Rekomendasi Perbaikan	1. Berkomunikasi dengan Pusdatin terkait kendala tersebut 2. Menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE 3. Melakukan pengaturan tugas agar meminimalkan tugas ganda 4. Berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut 5. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB 6. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB dan CPOTB	1. Berkomunikasi dengan Pusdatin terkait kendala tersebut 2. Menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE 3. Melakukan pengaturan tugas agar meminimalkan tugas ganda 4. Berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut 5. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB 6. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB dan CPOTB	1. Berkomunikasi dengan Pusdatin terkait kendala tersebut 2. Menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE 3. Melakukan pengaturan tugas agar meminimalkan tugas ganda 4. Berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut 5. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB 6. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB dan CPOTB 7. Melaksanakan coaching dan mentoring terhadap petugas baru
Rencana Aksi	1. Selalu berkomunikasi dengan Pusdatin apabila terdapat permasalahan sistem ebpom 2. Menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE dan memberikan respon cepat terkait pertanyaan ekspor/impor 3. Melakukan pengaturan tugas agar meminimalkan tugas ganda 4. Berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut 5. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB, memberikan respon cepat terkait permasalahan IP CPPOB, membuat Grup <i>whatsapp</i> Gempur Jatim 2023 untuk UMK Pangan Olahan 6. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB, memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPKB dan denah kosmetik, membuat Grup <i>whatsapp</i> Jatim Glowing 2023 untuk UMKM Kosmetik 7. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPOTB, memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPOTB Bertahap, membuat Grup <i>whatsapp</i> Sippotra 2023 untuk UMKM OT	1. Selalu berkomunikasi dengan Pusdatin apabila terdapat permasalahan sistem ebpom 2. Menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE dan memberikan respon cepat terkait pertanyaan ekspor/impor 3. Melakukan pengaturan tugas agar meminimalkan tugas ganda 4. Berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut 5. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB, memberikan respon cepat terkait permasalahan IP CPPOB 6. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB, memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPKB dan denah kosmetik 7. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPOTB, memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPOTB Bertahap	1. Selalu berkomunikasi dengan Pusdatin apabila terdapat permasalahan sistem ebpom 2. Menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE 3. Melakukan pengaturan tugas agar meminimalkan tugas ganda 4. Berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut 5. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB, memberikan respon cepat terkait permasalahan IP CPPOB 6. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB, memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPKB dan denah kosmetik 7. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPOTB, memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPOTB Bertahap 8. Melaksanakan coaching dan mentoring terhadap petugas baru

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat permasalahan di sistem ebpom 2. Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir 3. Terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda 4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan dengan pusat 5. Terdapat penyelesaian SKI/SKE yang melebihi SLA sistem 6. Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah 7. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB dan CPOTB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat permasalahan di sistem ebpom 2. Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir 3. Terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda 4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan dengan pusat 5. Terdapat penyelesaian SKI/SKE yang melebihi SLA sistem 6. Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah 7. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB dan CPOTB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat permasalahan di sistem ebpom 2. Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir 3. Terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda 4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan dengan pusat 5. Terdapat penyelesaian SKI/SKE yang melebihi SLA sistem 6. Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah 7. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB dan CPOTB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Februari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat kendala di sistem ebpom sesekali 2. Masih terdapat importir/eksportir yang tidak memenuhi persyaratan SKI/SKE 3. Masih terdapat penyelesaian SKI/SKE yang melebihi timeline 4. Masih terdapat permasalahan tertentu yang memerlukan komunikasi dengan pusat 5. Terbit IP CPPOB UMK Pangan Olahan 6. Terbit SPA CPKB dan CPOTB dari UMKM 	Kondisi Maret: <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat kendala di sistem ebpom sesekali 2. Masih terdapat importir/eksportir yang tidak memenuhi persyaratan SKI/SKE 3. Masih terdapat penyelesaian SKI/SKE yang melebihi timeline 4. Masih terdapat permasalahan tertentu yang memerlukan komunikasi dengan pusat 5. Terbit IP CPPOB UMK Pangan Olahan 6. Terbit SPA CPKB dan CPOTB dari UMKM 	Kondisi April: -
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	open	Open	open

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja 2022, diketahui bahwa target IKU tidak tercapai, begitu juga sepanjang triwulan I tahun 2023, target IKU belum juga tercapai, maka dilakukan upaya penambahan 1 orang SDM di tim sertifikasi di bulan Maret 2023 di substansi sertifikasi mengingat tingginya permintaan sertifikasi dan percepatan pencapaian target indikator.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 67. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	65	57,14	87,69	Belum Memenuhi ekspektasi
Februari	65	66,67	102,56	Memenuhi ekspektasi

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Maret	65	69,89	107,53	Memenuhi ekspektasi

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; SOP Makro.

Pada triwulan I tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 93 sarana produksi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 65 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 28 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk triwulan I adalah sebesar 69,89 %. Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada triwulan I adalah 107,53 % dan telah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

- b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**
Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 68. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	69,89	107,53	memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat triwulan I tahun 2023 **sudah mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2023 tetap dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan I tahun 2023 adalah 69,89% telah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”. Pada triwulan I tahun 2023, pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; terdapat intensifikasi pengawasan recall produk sirup yang mengandung cemaran EG-DEG dan pemusnahan produk sirup yang mengandung cemaran EG-DEG; terdapat GAP kompetensi yang cukup tinggi; terdapat Audit BPK dan BPKP terkait kasus sirup mengandung cemaran EG-DEG ; terdapat demonstrasi dari masyarakat terkait kasus produk sirup yang mengandung cemaran EG-DEG dan terkait kosmetika illegal; terdapat pemanggilan petugas oleh pihak kepolisian sebagai saksi terkait kasus produk sirup EG-DEG dan terdapat beberapa kegiatan pusat yang melibatkan balai seperti forum komunikasi pusat dan UPT terkait pengawasan sarana distribusi dan pelayanan farmasi; forum komunikasi pusat dan UPT terkait pemeriksaan CPOB dan forum komunikasi pusat dan UPT terkait pengawasan farmakovigilans. Meskipun demikian, capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan telah memenuhi ekspektasi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 69. Rencana Aksi pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET		
					T	R	T	R	T	R	
13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	QIC.001.053	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A Advanced GMP Training for Inspectors Deputi 2	1	kali/trip	0	0	0	0	0	0
			B Pendampingan Inspektur dalam penerapan CPOTB terkini pada pengawasan sarana melalui Joint Inspection	1	kali/trip	0	0	0	0	0	0
	QIC.001.055	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A Pemeriksaan Sarana Produksi OMKA	239	kali/trip	7	7	19	21	15	29
			B Pemeriksaan CPOB	11	kali/trip	0	0	1	0	1	1
			C Inspeksi Bersama Sarana Produksi (CPOB)	7	kali/trip	0	0	1	0	0	1

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target indikator adalah pemeriksaan sarana produksi OMKA, pemeriksaan CPOB, dan inspeksi bersama sarana produksi. Pada triwulan I dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi obat (Industri farmasi) sebanyak 2 sarana, dengan hasil 2 memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi kosmetika sebanyak 11 sarana, dengan hasil 8 sarana memenuhi ketentuan dan 3 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi obat tradisional, IOT/IEBA sebanyak 3 sarana dengan hasil 2 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan, sarana produksi suplemen kesehatan sebanyak 1 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan; sarana produksi UKOT sebanyak 7 sarana dengan hasil 5 sarana memenuhi ketentuan dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi UMOT sebanyak 2 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi pangan MD sebanyak 66 sarana dengan hasil 45 sarana memenuhi ketentuan dan 21 sarana tidak memenuhi ketentuan, dan pemeriksaan sarana produksi PIRT sebanyak 1 sarana dengan hasil tidak memenuhi ketentuan. Selain itu juga dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi baik secara daring maupun luring secara merata kepada seluruh petugas inspeksi.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 70. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72.680.000	53.133.250	73,11	107,53	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Pada triwulan I tahun 2023 terdapat revisi anggaran untuk penambahan biaya Inspeksi Bersama Sarana Produksi (CPOB) dan penambahan jumlah petugas pemeriksaan CPOB.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 71. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko; Penetapan target kinerja individual (SKP) petugas dengan menggunakan system penilaian terbaru (SIMAKIN 2023); Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi; Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan; Terdapat intensifikasi pengawalan recall produk sirup yang mengandung cemaran EG-DEG	Pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan ranking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi; Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan; Terdapat audit BPK dan BPKP terkait pengawasan produk sirup dan produk sirup yang mengandung cemaran EG-DEG. Audit tersebut dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu; Terdapat pemusnahan produk sirup yang mengandung cemaran EG-DEG; Pemanggilan petugas sebagai saksi terkait kasus produk sirup yang mengandung cemaran EG-DEG di Polda Jatim; Kegiatan pusat yang melibatkan Balai seperti Forum Komunikasi terkait pengawasan distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian	Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan; Terdapat pemusnahan produk sirup yang mengandung cemaran EG-DEG; Pemanggilan petugas sebagai saksi terkait kasus produk sirup yang mengandung cemaran EG-DEG di Polda Jatim; Kegiatan pusat yang melibatkan Balai seperti Forum Komunikasi terkait pengawasan CPOB dan pengawasan farmakovigilans
Rekomendasi Perbaikan	Dilakukan Sosialisasi/ Learning session/ In house training secara berkala untuk menyamakan persepsi dan memperkecil GAP Kompetensi; Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Perlu dilakukan pemerataan kompetensi melalui pelatihan/sosialisasi internal dan pendampingan dari inspektur kepala/senior/ketua tim kepada petugas yang kurang kompetensinya; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Dilakukan Sosialisasi/ Learning session/ In house training secara berkala untuk menyamakan persepsi dan memperkecil GAP Kompetensi; Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan
Rencana Aksi	Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil baru; Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil baru; Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko; Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko; Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai; Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko; Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai; Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior	Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan;

Keterangan	Januari	Februari	Maret
			Capaian IKU Pemeriksaan Sarana Produksi TW IV : 69,89 %.
Status	open	open	open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, pada triwulan I tahun 2023 telah dilaksanakan inovasi Kembang Aster (Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penanggungjawab Obat dan makanan Terstruktur), dimana dilakukan pengembangan kompetensi terhadap apoteker/penanggungjawab sarana produksi Obat dan makanan dengan harapan kepatuhan pelaku usaha meningkat dan sarana produksi yang memenuhi ketentuan dapat meningkat. Hal ini akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai upaya percepatan pencapaian target tahun 2023.

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 72. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	64	72,97	114,02	Memenuhi ekspektasi
Februari	64	72,50	113,28	Memenuhi ekspektasi
Maret	64	75,37	117,76	Memenuhi ekspektasi

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan;

Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05. 20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

Pada triwulan I tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 203 sarana distribusi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 153 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 50 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan I adalah sebesar 75,37%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 117,76 % dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

- b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**
Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
- c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 73. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	75,37	117,76	Memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I tahun 2023 **telah mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Namun demikian tetap dilakukan upaya perbaikan berkelanjutan agar target akhir tahun 2023 bisa tetap dicapai.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada triwulan I tahun 2023, pemeriksaan sarana distribusi dilakukan terhadap sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, pangan, kosmetika, penotifikasi kosmetika, sarana distribusi obat tradisional dan suplemen Kesehatan. Beberapa hal yang mempengaruhi capaian antara lain terdapat banyak sarana distribusi obat (PBF) yang mengajukan permohonan resertifikasi CDOB, terdapat penggunaan ceklist 33 sebagai tools pemeriksaan sarana distribusi pangan dalam rangka intensifikasi produk pangan (IWP). Meskipun cakupan pengawasan BBPOm di Surabaya adalah produk pangan olahan, namun pada triwulan I Tahun 2023, BBPOM Surabaya melakukan penelusuran terkait kasus penggunaan nitrogen cair pada produk pangan siap saji dan menginisiasi pemeriksaan pada sarana pangan siap saji, terutama yang terdapat di rest area.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 74. Rencana Aksi pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET		
					T	R	T	R	T	R	
14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	QIC.004.053	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan	A Inspeksi Bersama	15	kalitrip	1	1	2	0	0	0
			B Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Dan Sarfanyar, Pangan/ Penerapan CDOB/ Audit Komprehensif/ Aksi Penertiban	362	kalitrip	14	11	27	41	26	44
			C Pengawasan Kasus Khusus/Food Security	5	kalitrip	0	0	1	2	1	0
			D Pengawasan Periklanan	24	kalitrip	2	2	2	2	2	2
			F Pengawasan Penerapan Farmakovigilans	1	kalitrip	0	0	0	0	0	0
			QIC.004.055	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan	A Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DAK Non	2	kalitrip	0	0	0	0
	C Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM Dalam Manajemen	1	kalitrip		0	0	0	0	0	0	
	D Workshop Pemantapan Teknis Pengawasan Post-Market Obat	1	kalitrip		0	0	0	0	1	1	
	E Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan DT, SK dan	1	kalitrip		0	0	0	0	0	0	
	F Pertemuan Koordinasi Inspektur DT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja	1	kalitrip		1	0	0	0	0	0	
	G Pelatihan dalam rangka percepatan/efisiensi penerbitan rekomendasi importir serta mempersiapkan kemandirian UPT BPOM dalam pengawasan importir DT dan SK	1	kalitrip		0	0	1	0	0	0	
	H Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan	1	kalitrip		0	0	0	0	0	0	
	I Perkuatan Regionalisasi Laboratorium dalam Rangka Sampling dan Pengujian	1	kalitrip		0	0	0	0	0	0	
	J Bimbingan Teknis Inspektur	1	kalitrip	0	0	0	0	0	0		

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target IKU antara lain: inspeksi bersama, pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarfanyar, pangan/ penerapan CDOB/ audit komprehensif/ aksi penertiban obat dan makanan ilegal, pengawasan kasus khusus/food security, pengawasan periklanan, dan workshop pemantapan teknis pengawasan post-market Obat.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 75. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	165.710.000	117.287.705	70,78	117,76	90% (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Pada triwulan I tahun 2023 tidak terdapat perubahan pembiayaan untuk mencapai target IKU.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 76. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	<p>Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko</p> <p>Penetapan target kinerja individual (SKP) petugas dengan menggunakan system penilaian terbaru (SIMAKIN 2023)</p> <p>Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi</p> <p>Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan</p> <p>Terdapat intensifikasi pengawasan recall produk sirup yang mengandung cemaran EG-DEG</p>	<p>Pemeriksaan sarana berdasarkan analisis risiko, dimana parameter pada analisis risiko tersebut menghasilkan ranking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa;</p> <p>Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi;</p> <p>Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan;</p> <p>Terdapat audit BPK dan BPKP terkait pengawasan produk sirup dan produk sirup yang mengandung cemaran EG-DEG. Audit tersebut dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu;</p> <p>Penelusuran terkait penggunaan nitrogen cair pada produk pangan siap saji;</p> <p>Terdapat pemusnahan produk sirup yang mengandung cemaran EG-DEG;</p> <p>Pemanggilan petugas sebagai saksi terkait kasus produk sirup yang mengandung cemaran EG-DEG di Polda Jatim;</p> <p>Kegiatan pusat yang melibatkan Balai seperti Forum Komunikasi terkait pengawasan distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian</p>	<p>Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan</p> <p>Terdapat pemusnahan produk sirup yang mengandung cemaran EG-DEG</p> <p>Pemanggilan petugas sebagai saksi terkait kasus produk sirup yang mengandung cemaran EG-DEG di Polda Jatim</p> <p>Kegiatan pusat yang melibatkan Balai seperti Forum Komunikasi terkait pengawasan farmakovigilans</p> <p>Inisiasi Pemeriksaan sarana pangan siap saji</p> <p>Penggunaan tools baru untuk intensifikasi pengawasan pangan yaitu ceklis 33</p>
Rekomendasi Perbaikan	<p>Dilakukan Sosialisasi/ Learning session/ In house training secara berkala untuk menyamakan persepsi dan memperkecil GAP Kompetensi</p> <p>Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana</p> <p>Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan</p>	<p>Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana</p> <p>Perlu dilakukan pemerataan kompetensi melalui pelatihan/sosialisasi internal dan pendampingan dari inspektur kepala/senior/ketua tim kepada petugas yang kurang kompetensinya</p> <p>Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan</p>	<p>Sosialisasi terhadap tools baru untuk pemeriksaan , yaitu ceklis 33 dan ceklis pengawasan pangan siap saji ;</p> <p>Dilakukan Sosialisasi/ Learning session/ In house training secara berkala untuk menyamakan persepsi dan memperkecil GAP Kompetensi;</p> <p>Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana;</p> <p>Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan</p>

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Rencana Aksi	Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil baru Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil baru terkait penggunaan tools inspeksi yang baru; Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan;
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko; Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai; Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko; Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai; Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior	Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan; Capaian IKU Pemeriksaan Sarana Distribusi TW IV : 75,37 %.
Status	close	close	close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, informasinya dimanfaatkan dengan melaksanakan kembali inovasi Kembang Aster (Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penanggungjawab Obat dan makanan Terstruktur), dimana dilakukan pengembangan kompetensi terhadap apoteker/penanggungjawab sarana distribusi dengan harapan kepatuhan pelaku usaha meningkat dan sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dapat meningkat.

6. Indeks Pelayanan Publik

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 77. Realisasi Indeks Pelayanan Publik Triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	4,6	-	-	-
Februari	4,6	-	-	-
Maret	4,6	-	-	-

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Pada triwulan I tahun 2023 belum diperoleh Indeks Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dari Tim Penilai UPP. Pada tahun 2023 ini BBPOM Surabaya dipilih untuk mewakili BPOM dalam penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori Pelayanan Jasa Administrasi.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 78. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik	4,6	-	-	-

Realisasi indeks pelayanan publik triwulan I tahun 2023 belum tersedia menunggu penilaian dari tim penilai UPP dari BPOM.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Dari hasil penilaian Unit Pelayanan Publik tahun 2022 yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik 4,90 bagi BBPOM di Surabaya menunjukkan lompatan yang sangat besar jika dibandingkan hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2021 sebesar 4,52. Belajar nilai IPP tahun 2022, BBPOM Surabaya melakukan berbagai upaya sesuai aspek penilaian indeks pelayanan publik terutama yang masih belum optimal, antara lain sbb :

- Melakukan Revisi Standar Pelayanan Publik terutama terkait dengan pemenuhan hak hak kelompok rentan. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik, BBPOM Surabaya harus memfasilitasi semua kepentingan dan kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan, tidak terkecuali mereka yang termasuk dalam katagori kelompok rentan yaitu disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, dan korban bencana sosial serta korban bencana alam. Tujuan dari revisi Standar Pelayanan Publik ini adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan sesuai dengan tujuan negara demokrasi bahwa “*no one left behind*”
- Melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. BBPOM Surabaya mengembangkan berbagai inovasi dengan tujuan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan publik di BBPOM Surabaya. Selain itu inovasi juga diharapkan mempermudah petugas pemberi layanan publik melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan sebaik mungkin. Sampai saat ini BBPOM Surabaya telah mengembangkan 31 inovasi baik untuk internal maupun eksternal. Inovasi terbaru adalah Jatim Truly (Jawa Timur Trusted Culinary) sebagai bentuk pendampingan dan pembinaan kepada para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) tentang penerapan prinsip prinsip keamanan pangan dan stikerisasi bagi PKL yang telah menerapkan keamanan pangan.

- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan *soft skill* pelayan publik. Kemampuan berkomunikasi dan menangani keluhan pelanggan adalah kompetensi penting dan utama sebagai pemberi layanan publik.
- Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat mandiri secara periodik untuk melihat respon pelanggan terhadap pelayanan publik yang diberikan, serta melakukan tindak lanjut terhadap masukan yang diberikan oleh pelanggan.
- Meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga pelanggan merasa nyaman dan mendapatkan semua yang dibutuhkan, terutama untuk kelompok rentan. Sesuai dengan SE Menteri PANRB No. 66/2020 tentang Penyediaan Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ada 14 fasilitas yang harus disediakan bagi kelompok rentan. Keempat belas sarana prasarana tersebut meliputi kursi roda/tongkat/krek; pintu masuk yang mudah diakses; jalan landai dan pegangan rambat; lift khusus kelompok rentan disertai huruf braille; selasar yang menghubungkan semua ruang; toilet khusus; loket khusus; ruang tunggu khusus; serta guiding block dan parkir khusus. Kemudian, alat bantu tunanetra dan tunarungu; arena bermain anak; ruang laktasi/menyusui; serta fasilitas lain pendukung layanan seperti petugas pemandu ataupun petugas yang mampu berbahasa isyarat. Hampir semua fasilitas tersebut telah berusaha dipenuhi oleh BBPOM Surabaya kecuali lift khusus karena di BBPOM Surabaya tidak tersedia lift karena Gedung layanan publik hanya 2 lantai dan ruang layanan publik ada di lantai 1.
- Memberikan reward kepada petugas pemberi layanan.
- Meningkatkan responsive waktu pelayanan lebih cepat.
- Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik secara terus menerus.
- Memperbaiki dokumentasi proses penanganan pengaduan sehingga tertib dan mudah diakses sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penanganan pengaduan yang lebih baik.
- Menyediakan berbagai macam alternatif pelayanan publik yang dapat diakses oleh konsumen yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, demografi, dll. Prinsip dalam pelayanan publik adalah *no one left behind*, semua harus mendapat layanan yang setara.

Menerapkan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan larangan diskriminasi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 79. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Pelayanan Publik

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
15 Indeks Pelayanan Publik	BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A Forum Komunikasi Penerapan Dan Pelayanan SKI/SKE Dengan Lintas Sektor	1 kegiatan	0	0	0	0	1	0
			D Pemeriksaan Sarana Dalam Rangka Permohonan SKE/SKI	20 kali/trip	0	3	2	5	2	5
	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	A Peningkatan Kompetensi Pegawai	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			F Pelatihan dalam rangka percepatan/efisiensi penerbitan rekomendasi importir serta mempersiapkan kemandirian UPT BPOM dalam pengawasan importir OT dan SK	1 kali/trip	0	0	1	0	0	0

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di triwulan I tahun 2023 adalah pemeriksaan sarana dalam rangka SKI/SKE untuk memastikan kebenaran produk Obat dan makanan yang akan masuk ke Indonesia melalui Jawa Timur. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan di lingkungan BBPOM Surabaya untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BBPOM Surabaya, bahkan beberapa hal dapat dipenuhi dengan sangat baik oleh BBPOM Surabaya misalnya timeline untuk rekomendasi SKI dan SKE. Pada tahun 2023 BBPOM Surabaya akan melakukan revisi Standar Pelayanan Publik untuk mengakomodir kebutuhan kelompok rentan. Berbagai fasilitas khusus untuk kelompok rentan telah disediakan oleh BBPOM Surabaya sehingga mereka mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pemberi layanan dilakukan peningkatan kompetensi SDM secara terencana dan terstruktur. Mengantisipasi lingkungan strategis yang semakin dinamis (VUCA) diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi paripurna dalam memberikan layanan. Kebutuhan SDM secara kuantitas sebagian dapat digantikan dengan pemanfaatan Sistem Informasi yang dapat mempercepat layanan, memberikan layanan yang konsisten, transparan dan akuntabel. Sistem informasi yang dikembangkan BBPOM Surabaya ditujukan untuk memberikan kemudahan dan transparansi serta kepastian kepada pelanggan. Telah dikembangkan *tracking system* untuk layanan pengujian pihak ketiga yaitu SURAMADU (Telusur Sampel Pihak Ketiga Terpadu) sehingga konsumen mengetahui dengan pasti status progress sample yang sedang diuji di laboratorium BBPOM Surabaya. Selain itu BBPOM di Surabaya juga telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk memudahkan pelayanan publik misalnya : **Laskar** (Sistem Informasi Layanan Surat Keterangan Ahli Bagi Polisi), **Cangkrukan** (Bincang dengan Kru Layanan), **AMKM** (Anda Menanyakan Kami Menjawab), **Pinarak Rek**, **Serasi** (Sistem Informasi Registrasi dan Sertifikasi), dan

Gempur Jatim (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), **SIPPOTra** (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), **Jatim Glowing** (Jawa Timur Global Cosmetic World Marketing), dan **Sketsa** (Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu Hari Saja). Selain inovasi yang membantu pelaku usaha, BBPOM Surabaya juga mengembangkan inovasi untuk mendukung *back office* dan mempercepat pelayanan publik yang diberikan BBPOM Surabaya. Inovasi yang bersifat internal ini dikembangkan untuk mendukung kinerja pelayanan publik, menjaga integritas pegawai dan organisasi, menjamin profesionalisme dan *fairness*, serta akuntabilitas.

Pada awal tahun 2023, BBPOM Surabaya telah mengembangkan inovasi baru yaitu **Jatim Truly** (Jawa Timur Trusted Culinary) yang memberikan pendampingan dan Bimbingan Teknis bagi Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) agar dapat menerapkan prinsip-prinsip Keamanan Pangan sehingga mendukung pertumbuhan industri pariwisata di Jawa Timur.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 80. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Pelayanan Publik	30.758.500	1.935.450	6,29	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa efisiensi anggaran belum bisa dihitung karena capaian indikator belum ada. Meski demikian, telah dilakukan banyak upaya penambahan sarana dan prasarana pelayanan publik di kantor BBPOM di Surabaya untuk memenuhi ketentuan pelayanan prima antara lain penambahan guiding blok, rambatan untuk disabilitas, dan perbaikan jalur landai untuk mengakomodir adanya konsumen kelompok rentan yang datang ke kantor. Pada triwulan I tahun 2023 telah dilakukan revisi penambahan anggaran untuk kegiatan baru Desk Monitoring dan Evaluasi Realisasi Impor dalam rangka pelayanan prima.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 81. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian Indeks Pelayanan Publik

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	Perlunya melakukan revaluasi kembali Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Badan tentang Standar Pelayanan Publik terbaru	BBPOM di Surabaya ditunjuk mewakili BPOM sebagai perwakilan UPP untuk Monev Sarpras berkebutuhan rentan.	- BBPOM di Surabaya ditunjuk mewakili BPOM untuk UPP pelayanan prima mewakili BPOM untuk kategori layanan administrasi - Hasil revaluasi sarpras kelompok rentan perlu dilakukan perbaikan dan melengkapi fasilitas kelompok rentan

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Rekomendasi Perbaikan	Melakukan telaah kembali untuk penetapan jenis layanan, alur layanan publik, dan peraturan terkini yang berkaitan dengan layanan publik	Melakukan reviu/pemetaan kembali kebutuhan kelompok rentan dan sarana dan prasarana yang dimiliki,	- Melakukan reviu menyeluruh untuk seluruh aspek UPP dan menyempurnakan apa yang dimiliki serta memperbaiki data dukung. - Segera melakukan perbaikan SPP dan mengadakan konsultasi pelayanan publik dan mencantumkan klausul alur layanan kelompok rentan
Rencana Aksi	pembentukan tim penyusun Standar Pelayanan Publik untuk melakukan telaah	- Membentuk tim khusus untuk monev sarpras kelompok rentan - Menambahkan klausul kelompok rentan dalam standar pelayanan publik - perlu ada sosialisasi tentang monev kelompok rentan	- Perbaikan sarana dan prasarana kelompok rentan - Menyusun alur untuk kelompok rentan terkini - Membuat alur dengan huruf braile dan video dengan penerjemah bahasa isyarat, dll - mengoptimalkan pertemuan morning breeze
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Standar Pelayanan Publik menggunakan yang lama	Fasilitas kelompok rentan sudah tersedia di yanblik, namun perlu dilakukan reviu untuk menyempurnakan fasilitas yang ada dan menunggu agenda sosialisasi monev kelompok rentan dari Kemenpan RB/BPOM	belum ada fasilitas layanan dengan huruf braile, sarpras kelompok rentan ada yang belum memenuhi kriteria sehingga memerlukan perbaikan sarpras.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Telah terbentuk tim yang akan melakukan perbaikan Standar Pelayanan Publik	Melakukan reviu dari SE Kemenpan RB tentang fasilitas kelompok rentan hingga menunggu sosialisasi yang diadakan di bulan Maret	Telah dilakukan reviu dan perencanaan untuk perbaikan fasilitas kelompok rentan, antara lain yaitu : toilet, jalur landai, menambah tempat parkir untuk wanita, pemindahan ruang bermain anak dan loket kelompok rentan
Status	close	Close	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi pada laporan kinerja tahun 2022, diperoleh hasil indeks pelayanan publik sebesar 4,9 melebihi target tahun 2023 dan target akhir periode renstra. Namun demikian, terdapat perubahan tools penilaian di tahun 2023 oleh menpan dan setelah dilakukan konversi nilai, maka nilai indeks pelayanan publik tahun 2022 adalah 4,52, sehingga dilakukan revisi penaikan target IPP tahun 2023 dari 4,51 menjadi 4,6 yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023.

7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 82. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	4,3	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Februari	10,8	10	92,59	Belum Memenuhi Ekspektasi
Maret	31,1	68,46	220,12	Tidak dapat disimpulkan

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai; UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Perhitungan di atas merupakan persentase progress pendampingan UMKM yang akan dilakukan mulai bulan Januari hingga November 2023. Persentase UMKM yang memenuhi standar dapat dihitung pada bulan Desember 2023.

Persentase progress tahapan pendampingan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik pada triwulan I tahun 2023 sebesar 68,46% dengan capaian 220,12% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

- b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**
Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
- c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 83. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	65	-	-	-

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik triwulan I tahun 2023 belum dapat dihitung karena tahapan pendampingan masih berproses. Realisasi akan dihitung bila seluruh tahapan pendampingan selesai dilaksanakan.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**
Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan I, diperoleh capaian progres tahapan sebesar 68,46%, hal ini terjadi dikarenakan pendampingan UMKM Pangan Olahan, Obat

Tradisional dan Kosmetik dilakukan sesuai *timeline* pendampingan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dengan berbagai upaya. Kegiatan pendampingan yang telah dilakukan meliputi bimbingan teknis, layanan konsul denah bangunan produksi, desk konsultasi terkait pemenuhan aspek cara produksi/pembuatan yang baik, desk konsultasi terkait pemenuhan dokumen, desk konsultasi terkait pemilihan bahan baku dan produk yang memenuhi ketentuan, serta desk konsultasi terkait akses melalui sistem e-sertifikasi, e-registrasi pangan olahan, asrot dan notifikos.

Dengan dilaksanakan bimtek, pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan pemenuhan dokumen persyaratan dan ketentuan terkait sarana produksi pangan, obat tradisional dan kosmetik menjadi meningkat. Bimbingan teknis dan pendampingan intensif sangat diperlukan oleh pelaku usaha agar dapat segera memenuhi persyaratan sehingga izin edar dapat segera diperoleh. Pada triwulan I telah dilaksanakan Bimbingan teknis cara produksi/pembuatan pangan olahan, obat tradisional, dan kosmetik. Meskipun telah dilaksanakan Bimbingan teknis, petugas tetap mengawal setiap tahapan yang dilakukan pelaku usaha.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 84. Rencana Aksi pada Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik	QDG.001.051	Advokasi dan Pendampingan UMKM	A GEMPUR (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat) JATIM	22 kali/trip	0	1	0	0	0	4
			B SiPPOTra (Sinergitas Pembinaan dan Pengawasan Obat Tradisional)	10 kali/trip	0	0	0	0	1	0
			C Jatim Glowing	10 kali/trip	0	0	0	0	1	0

Target pendampingan UMKM sesuai DIPA 2023 adalah 98 UMKM yang terdiri dari 77 UMK Pangan Olahan, 8 UMKM Obat Tradisional, dan 13 UMKM Kosmetik. Pada saat pelaksanaan rekrutmen pendampingan UMKM terdapat 243 UMK Pangan Olahan, 27 UMKM Obat Tradisional dan 68 UMKM Kosmetik. BBPOM di Surabaya membuka pendaftaran pendampingan melalui media sosial dan jejaring lintas sektor sehingga banyak pelaku usaha mendaftar secara mandiri maupun diusulkan oleh lintas sektor. BBPOM di Surabaya juga tidak menutup pendaftaran tersebut sepanjang tahun 2023, sehingga dimungkinkan ada penambahan jumlah UMKM yang didampingi hingga akhir tahun 2023. Dalam rangka pendampingan UMKM, BBPOM di Surabaya membuat inovasi Gempur Jatim (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), SiPPOTra (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), dan Jatim Glowing (Jawa Timur Global

Cosmetic World Marketing) untuk mempermudah UMKM dalam mendapatkan ijin edar produknya. Pada tahun 2022, inovasi Gempur Jatim berhasil meraih Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Hal ini menjadikan Gempur Jatim semakin dikenal baik di Jawa Timur maupun diluar Jawa Timur, sehingga semakin banyak pemerintah daerah yang tertarik dan meminta untuk dilaksanakan Gempur Jatim di wilayahnya masing masing.

Pada bulan Februari 2023, dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* yang melibatkan seluruh lintas sektor terkait pendampingan untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dan menemukan solusinya. Beberapa permasalahan yang terungkap adalah pelaku UMKM tidak memahami proses penerbitan atau pembaruan NIB menjadi versi RBA, tidak memahami proses penambahan dan/atau perbaikan KBLI, tidak memiliki NPWP atau NPWP berstatus KSWP tidak valid, kesulitan memiliki penanggung jawab teknis yang sesuai, tidak memahami teknologi proses produksi yang tepat. Terkait permasalahan tersebut, BBPOM di Surabaya bekerja sama dengan DPMPSTSP Kabupaten/Kota untuk memudahkan pelaku usaha dalam proses terkait NIB, KKP Kabupaten/Kota terkait pembuatan NPWP dan/atau pembaruan status NPWP, asosiasi profesi terkait penanggung jawab teknis, dan BRIN terkait pendampingan teknologi proses produksi.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 85. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	58.919.000	39.670.000	67,33	120	90% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Pada triwulan I tahun 2023 tidak terdapat revisi anggaran karena anggaran masih cukup memadai dan target indikator telah tercapai.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 86. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	1. UMK pangan olahan yang memperoleh IP CPPOB masih rendah 2. UMKM obat tradisional yang memperoleh SPA CPOTB Bertahap masih rendah	1. UMK pangan olahan yang memperoleh IP CPPOB masih rendah 2. UMKM obat tradisional yang memperoleh SPA CPOTB Bertahap masih rendah	1. UMK pangan olahan yang memperoleh IP CPPOB masih rendah 2. UMKM obat tradisional yang memperoleh SPA CPOTB Bertahap masih rendah

Keterangan	Januari	Februari	Maret
	3. UMKM kosmetik yang memperoleh SPA CPKB masih rendah	3. UMKM kosmetik yang memperoleh SPA CPKB masih rendah	3. UMKM kosmetik yang memperoleh SPA CPKB masih rendah
Rekomendasi Perbaikan	1. Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif 2. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif 3. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif 4. Responsif dalam menjawab pertanyaan di Grup Gempur Jatim 2023, Jatim Glowing 2023, dan Sippotra 2023	1. Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif 2. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif 3. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif 4. Responsif dalam menjawab pertanyaan di Grup Gempur Jatim 2023, Jatim Glowing 2023, dan Sippotra 2023	1. Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif 2. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif 3. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif 4. Responsif dalam menjawab pertanyaan di Grup Gempur Jatim 2023, Jatim Glowing 2023, dan Sippotra 2023
Rencana Aksi	1. Mengadakan Bimtek CPPOB dan desk konsultasi IP CPPOB secara berkala 2. Mengadakan Bimtek CPKB dan desk konsultasi SPA CPKB secara berkala 3. Mengadakan Bimtek CPOTB Bertahap dan mengadakan desk konsultasi CPOTB Bertahap secara berkala	1. Mengadakan Bimtek CPPOB dan desk konsultasi IP CPPOB secara berkala 2. Mengadakan Bimtek CPKB dan desk konsultasi SPA CPKB secara berkala 3. Mengadakan Bimtek CPOTB Bertahap dan mengadakan desk konsultasi CPOTB Bertahap secara berkala	1. Mengadakan Bimtek CPPOB dan desk konsultasi IP CPPOB secara berkala 2. Mengadakan Bimtek CPKB dan desk konsultasi SPA CPKB secara berkala 3. Mengadakan Bimtek CPOTB Bertahap dan mengadakan desk konsultasi CPOTB Bertahap secara berkala
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	1. Penerbitan IP CPPOB UMK masih rendah 2. Penerbitan SPA CPKB UMKM masih rendah 3. Penerbitan SPA CPOTB Bertahap masih rendah	1. Penerbitan IP CPPOB UMK masih rendah 2. Penerbitan SPA CPKB UMKM masih rendah 3. Penerbitan SPA CPOTB Bertahap masih rendah	1. Penerbitan IP CPPOB UMK masih rendah 2. Penerbitan SPA CPKB UMKM masih rendah 3. Penerbitan SPA CPOTB Bertahap masih rendah
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Februari: 1. Terdapat IP CPPOB UMK yang terbit 2. Terdapat SPA CPKB UMKM Kosmetik yang terbit 3. Terdapat SPA CPOTB Bertahap yang terbit	Kondisi Maret: 1. Terdapat IP CPPOB UMK yang terbit 2. Terdapat SPA CPKB UMKM Kosmetik yang terbit 3. Terdapat SPA CPOTB Bertahap yang terbit	Kondisi April:
Status	close	close	Open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi dari laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target renstra belum tercapai sehingga diperlukan upaya perbaikan di tahun 2023 ini. Selain itu juga dilakukan beberapa hal sebagai berikut untuk pencapaian target indikator:

- Melakukan aksi jemput bola bekerjasama dengan DPMPTSP di beberapa kabupaten melakukan desk sarana dan pendampingan untuk input aplikasi OSS RBA dan aplikasi e-reg.
- Melakukan bimtek pada fasilitator di daerah yang merupakan pegawai pemerintah daerah sehingga meringankan beban petugas Balai saat pendampingan awal.
- Berkolaborasi dengan lintas sektor agar dapat memperluas cakupan pendampingan terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil.

SASARAN STRATEGIS 5

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI (KIE) OBAT DAN MAKANAN DI LINGKUP BBPOM DI SURABAYA

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 87. Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	93,38	93,74	100,39	Memenuhi ekspektasi

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;*
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;*
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;*
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan*

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisisioner dan online survei.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan

makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). BBPOM di Surabaya memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial.

BBPOM di Surabaya melaksanakan Survei Efektifitas KIE hingga triwulan I tahun 2023 dengan jumlah responden sebanyak 36 orang. Survei dilaksanakan terhadap responden yang telah mengikuti kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari BBPOM di Surabaya dalam berbagai metode mulai dari KIE secara tatap muka langsung bersama Tokoh Masyarakat, melalui webinar atau Zoom Meeting misalnya kegiatan Cangkrū'an, sosialisasi kepada mahasiswa dan komunitas ibu-ibu PKK dan kelompok masyarakat lainnya, KIE melalui media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dll.

Capaian Tingkat efektifitas KIE BBPOM Surabaya pada triwulan I tahun 2023 adalah 93,74 dari target 93,38 atau dengan capaian 100,39% yang artinya **sudah mencapai target** yang ditetapkan dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 88. Perbandingan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,38	93,74	100,39	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan triwulan I tahun 2023 **sudah mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Tahun 2023 tetap dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil survey pada triwulan I tahun 2023, yang meningkat jika dibandingkan dengan hasil survey triwulan IV tahun 2022 meskipun tidak terlalu signifikan, harus menjadi kajian dan masukan bagi BBPOM di Surabaya untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekwensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai. Pemilihan topik juga harus menjadi pertimbangan, demikian juga sarana atau media yang akan dipakai

serta bagaimana mengemas kegiatan KIE agar lebih menarik. Dari hasil Survey Kesadaran Masyarakat dan Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 yang telah mencapai target yang ditetapkan, BBPOM Surabaya harus tetap bekerja lebih keras untuk menjangkau masyarakat di seluruh pelosok wilayah dengan berbagai media informasi dan komunikasi yang lebih *friendly* dan lebih dekat dengan masyarakat sehingga hasil survey kesadaran dan kepuasan masyarakat tahun 2023 tetap tercapai. Masyarakat perkotaan yang akrab dengan gawai mungkin lebih mudah menerima informasi melalui berbagai media sosial, namun masyarakat pedesaan dengan pendidikan rendah dan pekerjaan di sektor pertanian mungkin lebih akrab dengan media radio dan televisi. Hal ini harus menjadi pertimbangan BBPOM Surabaya dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Media sosial tetap menjadi pilihan namun tidak mengenyampingkan media yang lain. Dengan demikian hasil penilaian efektifitas KIE tetap dapat dipertahankan di masa masa mendatang.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 89. Rencana Akis pada Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
17 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	QDC.001.051	Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	F Penyuluhan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan	16 kegiatan	0	0	0	4	0	2
			G Sosialisasi Keamanan dan Penandaan Obat dan Makanan	16 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			H KIE Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Label Obat Tradisional	14 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			I Pemberdayaan Masyarakat Tentang Keamanan dan Manfaat Obat Tradisional	14 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			J KIE Informasi Obat dan Makanan Melalui Website BPOM dan Aplikasi BPOM Mobile	14 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			K Pemberdayaan Masyarakat tentang Keamanan, Mutu, dan Penandaan	14 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			L Sosialisasi Konsumen Cerdas Tolak Penyalahgunaan Obat	12 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			M KIE Cerdas Memilih Kosmetika yang Aman dan Bermanfaat	12 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			N Edukasi Konsumen tentang Bahan Berbahaya pada Pangan dan Kemasan Pangan	8 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			O KIE Pengawasan Bahan Berbahaya Pada Produk Kosmetik	8 kegiatan	0	0	4	0	4	0

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 BBPOM di Surabaya telah melaksanakan KIE Bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI sebanyak 6 titik yaitu di Banyuwangi, Situbondo, Kota Batu, dan Surabaya yang diikuti oleh kurang lebih 2.935 orang peserta (kurang lebih 500 orang di tiap lokasi) yang terdiri dari Masyarakat Umum (PKK, Dharmawanita, Organisasi Kemasyarakatan, Karang Taruna), Produsen/ IRTP/ UMKM termasuk pedagang kaki lima, ritel, Lintas sektor (Petugas Kelurahan, Kecamatan, DPRD) terdiri dari 1.229 peserta perempuan dan 1.706 peserta laki laki.

Selain itu BBPOM Surabaya juga melaksanakan berbagai kegiatan KIE antara lain kegiatan Cangkrū'an yaitu kegiatan Webinar interaktif antara pemberi informasi dan penerima informasi menggunakan platform Zoom Meeting. Selama triwulan I tahun 2023, BBPOM di Surabaya telah melaksanakan kegiatan Cangkrū'an sebanyak 5 kali yang diikuti oleh 49 peserta terdiri dari beberapa kelompok masyarakat antara lain mahasiswa, UMKM Pangan Olahan, Industri Pangan, kelompok usaha pangan, dll. Topik yang disampaikan dalam Cangkrū'an antara lain Notifikasi Kosmetik, Pendaftaran Pangan Olahan versi Baru, IP CPPOB melalui e sertifikasi, ING, Label, dan lain lain. Selain itu, pada bulan Maret, BBPOM Surabaya melaksanakan operasionalisasi Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan Takjil di wilayah Karang Menjangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pedagang kreatif lapangan yang berjualan di sekitar wilayah jalan Karang Menjangan tentang prinsip prinsip keamanan pangan, bagaimana menerapkan hygiene dan sanitasi, bagaimana mengenali tanda tanda pangan yang mengandung bahan berbahaya yang sering disalagunakan pada pangan, dll. Kegiatan ini melibatkan kurang lebih 33 orang pedagang kreatif lapangan bersama lintas sektor terkait. Pengawasan pangan takjil selama bulan Ramadhan sangat penting terutama karena meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap pangan siap saji yang dijual oleh pedagang kreatif lapangan.

KIE bersama instansi atau lintas sektor, swasta dan Perguruan Tinggi antara lain SMP Muhammadiyah 4 Gadung, BB Pelatihan Pertanian Ketindan, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Nutrition International, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin, PKK Kota Surabaya, ASPETRI Jatim, Seksi Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengelolaan Produk Kelautan dan Perikanan Kepanjen, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Universitas Ciputra, Universitas Hang Tuah, Dina Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.

Selama Triwulan I tahun 2023 telah dilakukan 19 kali kegiatan KIE bersama stakeholder/lintas sektor tersebut. Topik yang disampaikan antara lain Pelatihan pengolahan ubi jalar dan ubi kayu, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Pangan, Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Hygiene Sanitasi Penjamah Makanan, Pelatihan Income Generating/ Peningkatan Pendapatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP), Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Pelatihan Penyegaran Kendali Mutu Internal IKM Garam Beriodium, Seminar Pemenuhan Standar Keamanan Pangan bagi Wirausaha Baru IKM Pangan, Sosialisasi Keamanan Pangan bagi Kader Pangan PKK Kecamatan dan

Kelurahan Surabaya I, Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Hygiene Sanitasi Penjamah Makanan, Diagnosa Holistik Kestrad Berbasis Penyebab Penyakit dan CPOTB bagi Penyehat Tradisional, Pelatihan sertifikasi mutu produk perikanan, Pelatihan Keamanan Pangan PIRT Dinkes Sidoarjo, Kuliah Food Licensing and Registration, Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Kader PKK Kota Surabaya, Seminar Nasional Kefarmasian "Membangun Aptoketer Muda Berjiwa Pharmapreneurship", Pengenalan GMP Bagi Pelaku Usaha UMKM. Semua upaya bersama lintas sektor dan komponen koordinasi penta helix bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di berbagai lini dan peran akan pentingnya keamanan dan mutu Obat dan Makanan.

Media sosial dan media cetak juga menjadi sarana bagi BBPOM Surabaya untuk menyebarkan informasi tentang Obat dan Makan terutama yang sesuai dengan isu yang sedang banyak terjadi di masyarakat. BBPOM Surabaya harus peka akan kebutuhan informasi masyarakat. Media yang dipilihpun menjadi penentu apakah pesan yang ingin disampaikan sampai secara efektif atau tidak kepada masyarakat. Salah satu contoh pelaksanaan KIE dengan mempertimbangkan target audien dan media adalah kampanye Keamanan Pangan. Secara umum, Ibu adalah anggota keluarga yang paling peduli dengan penyediaan pangan yang aman dan bergizi bagi keluarga. Demikian juga saat memilih obat untuk keluarga yang sakit. Karena itu, BBPOM Surabaya selalu melibatkan komunitas perempuan dan ibu ibu sebagai target audien KIE.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 90. Efisiensi Anggaran pada Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	2.027.440.000	1.720.955.302	84,88	100,39	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Pada triwulan I tahun 2023 telah dilakukan blokir anggaran KIE sebanyak 60 titik senilai 8.878.200.000, selain itu juga telah dilakukan revisi penambahan kegiatan baru yaitu Konsultasi Publik Standar Pelayanan di BBPOM Surabaya.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 91. Tindak lanjut reokmendasi hasil evaluasi capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	- kegiatan KIE belum dapat dilaksanakan, menunggu sosialisasi	- Pengadaan perlengkapan peserta diarahkan untuk e-katalog, dan banyak	- Kegiatan sudah mulai ada yang berjalan, perlunya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
	terpadu dari Roren BPOM. - anggaran yang terbatas menyebabkan kegiatan dilaksanakan dengan efektif dan efisien - terdapat komponen anggaran yang berbeda dengan RAB pusat	penyedia yang berminat untuk mengikuti pengadaan perlengkapan peserta kegiatan KIE tetapi belum terdaftar di e-katalog. - Perlengkapan peserta perlu segera diadakan karena kegiatan akan segera berjalan	perencanaan dan pengelolaan keuangan yang tepat sehingga penyelenggaraan dapat berjalan lancar - Melakukan reviu untuk materi sosialisasi terkini yang dapat diberikan kepada masyarakat
Rekomendasi Perbaikan	melakukan komunikasi dengan para Tenaga Ahli tokoh masyarakat alokasi anggaran yang tersedia untuk kegiatan tahun 2023 dan melaporkan kepada Biro Rorenkeu apabila terdapat kendala	- Melakukan pemetaan pengadaan perlengkapan peserta yang perlu segera diadakan, dan penyedia yang berminat untuk mengikuti e-katalog untuk segera mendaftar di sistem e-katalog, dan mekanisme pemilihan penyedia di e-katalog sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.	- Komunikasi yang efisien dan efektif melibatkan infokom dan keuangan sehingga kegiatan dapat berjalan lancar - komunikasi dengan TA, agar agenda kegiatan dapat disampaikan minimal 1 bulan sebelum kegiatan sehingga ada waktu untuk melakukan pengelolaan anggaran dan kegiatan
Rencana Aksi	Menetapkan RAB yang telah disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran dan mengkomunikasikan dengan para TA	- komunikasi dengan TA untuk penetapan jadwal di triwulan 1 dan penetapan penyedia di e-katalog	- menetapkan template administrasi yang diperlukan agar penyelesaian administrasi lebih cepat - lebih intens komunikasi dengan para TA
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	- kegiatan KIE belum dapat dilaksanakan, menunggu sosialisasi terpadu dari Roren BPOM. - anggaran yang terbatas menyebabkan kegiatan dilaksanakan dengan efektif dan efisien - terdapat komponen anggaran yang berbeda dengan RAB pusat	Belum adanya agenda dan penyedia perlengkapan peserta yang terpilih di e-katalog	kegiatan KIE belum terlalu padat, sehingga kegiatan dapat berjalan lancar
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kegiatan KIE sudah dilaksanakan	Beberapa tokoh masyarakat telah menetapkan agenda kegiatan, dan sudah ada penetapan penyedia perlengkapan peserta di e-katalog	Kegiatan KIE dapat diagendakan sesuai dengan perencanaan
Status	Close	Close	open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2021 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2022 sudah melebihi target tahun 2023, namun target akhir periode renstra belum tercapai. Tidak dilakukan revisi menaikkan target tahun 2023 karena pada tahun 2023 terdapat penambahan titik pelaksanaan KIE dengan tokoh masyarakat dan penambahan jumlah peserta tiap titik dari 250 orang per titik menjadi 500 orang per titik. Penambahan jumlah peserta ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap hasil survey efektifitas KIE.

2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 92. Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	0,8	10,50	1.312,5	Tidak Dapat Disimpulkan
Februari	2,1	10,63	506,27	Tidak Dapat Disimpulkan
Maret	17,1	22,82	133,48	Tidak Dapat Disimpulkan

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI dan SMP/MTS, di 6 Kabupaten/Kota yaitu Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Lamongan. Target tahun 2023 adalah 36 sekolah baru dan 76 sekolah pengawalan yang merupakan target intervensi tahun 2020, 2021 dan 2022.

Hingga akhir triwulan I tahun 2023, progres program PJAS yang telah dilaksanakan adalah kegiatan audiensi dan kegiatan advokasi lintas sektor di 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Sampang, kegiatan pengawalan terhadap sekolah yang sudah di intervensi kegiatan PJAS tahun sebelumnya dan kegiatan sosialisasi keamanan pangan.

Capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman melebihi target yang ditetapkan yaitu 133,45%, dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan sudah terlaksananya kegiatan yang penetapan targetnya bukan pada triwulan I yaitu tahapan kegiatan pengawalan terhadap sekolah yang sudah diintervensi pada tahun sebelumnya.

- b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**
Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
- c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 93. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan I tahun 2023 Dengan Target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	100%	22,82%	22,82%	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman hingga triwulan I tahun 2023 belum mencapai target tahun 2023 dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2023.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar dan sekolah. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian sederhana menggunakan tes kit untuk mengetahui keberadaan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim

BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip-prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.

Pada tahap akhir kegiatan Pengawasan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS), akan dilakukan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman terhadap 36 sekolah target intervensi tahun 2023. Sertifikasi dilakukan untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan di sekolah. Verifikasi dilakukan oleh petugas BBPOM Surabaya. Dalam rangkaian sertifikasi sekolah dengan PJAS aman dilakukan sampling dan pengujian pangan jajanan anak sekolah yang disediakan di kantin maupun penjaja PJAS di sekitar sekolah. Sampling dilakukan terhadap pangan jajanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya formalin, boraks, rodhamin B dan Methanil yellow. Pengujian dilakukan menggunakan Rapid Test Kit Bahan Berbahaya.

Diharapkan pada triwulan I tahun 2023 ini kondisi pandemi semakin melandai dan berubah menjadi endemi sehingga seluruh kegiatan dapat dilakukan secara luring/tatap muka langsung. Pada triwulan I tahun 2023 juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program PJAS ini untuk mendapatkan masukan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan program PJAS. BBPOM di Surabaya sangat bersyukur dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh sekolah dalam melanjutkan program PJAS meskipun sudah tidak difasilitasi oleh BBPOM Surabaya.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 94. Rencana Aksi Pada Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	QDB.001.051	Koordinasi lintas sektor	A Koordinasi ke Kab/Kota Dalam Rangka Keamanan Pangan	94 kali/trip	2	0	8	0	28	0
	QDB.001.052	Intervensi keamanan PJAS	A Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	6 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			B Pemeriksaan Keamanan PJAS	36 sekolah	0	0	0	0	0	0
			C Sertifikasi Sekolah dengan PJAS	32 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			D Pengawasan Sekolah yang Sudah Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS)	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0

Program Pengawasan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada triwulan I tahun 2023 yang dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 36 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Pada triwulan I tahun 2023 baru dilaksanakan Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS dan pengawasan sekolah yang telah diintervensi tahun sebelumnya.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 95. Efisiensi Anggaran Pada Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	60.030.000	11.541.544	19,23	133,48	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **tidak efisien** karena capaian indikator terlalu tinggi melebihi 120% sedangkan realisasi anggaran sangat kecil. Hal ini disebabkan karena pengawasan sekolah yang telah diintervensi tahun sebelumnya tidak mempergunakan biaya yang banyak namun %progres cukup besar. Tidak ada revisi anggaran selama triwulan I tahun 2023.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 96. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	Belum ada kegiatan, penyusunan lokus dan draft surat audiensi dan menunggu penetapan Juknis dari Pusat	Belum ada kegiatan, masih mengagendakan dan mencocokkan jadwal kegiatan audiensi dengan Bupati/Walikota atau yang mewakili	- audiensi sudah terlaksana di beberapa lokus, Lokus lainnya masih menyesuaikan agenda bupati/walikota.

Keterangan	Januari	Februari	Maret
			- capaian target tidak terpenuhi apabila tidak segera audiensi
Rekomendasi Perbaikan	Aktif dalam menanyakan juknis ke pusat	Komunikasi aktif dengan Pemda/Ajudan Bupati/Walikota	- Mencari alternatif jalur komunikasi lain untuk mempercepat agenda audiensi - Melakukan percepatan kegiatan untuk lokus yang sudah diaudiensi
Rencana Aksi	Aktif dalam menanyakan juknis ke pusat	Komunikasi aktif dengan Pemda/Ajudan Bupati/Walikota	- Komunikasi aktif dengan Pemda/Ajudan Bupati/Walikota - menetapkan rencana kegiatan PN untuk lokus yang sudah dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Belum ada kegiatan, penyusunan lokus dan draft surat audiensi dan menunggu penetapan Juknis dari Pusat	Belum ada kegiatan, masih mengagendakan dan mencocokkan jadwal kegiatan audiensi dengan Bupati/Walikota atau yang mewakili	- target dapat tidak tercapai - kesulitan mencocokkan agenda audiensi
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Maret : sudah mulai audiensi	Maret : sudah mulai audiensi	target dapat terpenuhi sesuai rencana aksi
Status	close	Close	close
Timline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa target telah tercapai 100% namun target tahun 2023 dan 2024 belum tercapai. IKU ini bersifat jumlah kumulatif setiap tahun dan baru terealisasi di akhir tahun. Capaian triwulan I melebihi 120% (tidak dapat disimpulkan), namun belum diusulkan perubahan target triwulan melihat realisasi triwulan II. Di triwulan I juga masih terdapat kendala pada pelaksanaan advokasi sehingga dimungkinkan di triwulan II capaian akan normal.

3. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 97. Jumlah desa pangan aman triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	5%	5%	100%	memenuhi ekspektasi
Februari	10%	9,55%	95,45%	belum memenuhi ekspektasi
Maret	20%	26,67%	133,33%	Tidak dapat disimpulkan

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) meliputi tahapan : advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi mempunyai kriteria antara lain : desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Hingga akhir triwulan I tahun 2023, progres program Desa Pangan Aman yang telah dilaksanakan adalah audiensi dan advokasi ke 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Sampang dan pengawalan terhadap desa yang diintervensi tahun sebelumnya. Capaian jumlah desa pangan aman sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 133,33%, dengan tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 98. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman	100	26,67	26,67	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi jumlah desa pangan aman triwulan I tahun 2023 **belum mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode tahun 2023.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah

termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar dan sekolah. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian sederhana kitana bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan menggunakan tes kit. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 99. Rencana Aksi pada Indikator Jumlah desa pangan aman

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
19 Jumlah desa pangan aman	QDB.002.051	Perkuatan kapasitas desa	A Advokasi Kegiatan Terpadu Program Desa, Sekolah dan Pasar	6 kab/kota	0	0	0	0	3	0
			B Bimtek Komunitas Desa dan Usaha Pangan Desa	6 kegiatan	0	0	0	0	0	0
	QDB.002.052	Pemberdayaan komunitas desa	A Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	6 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			B Bimtek Komunitas Desa dan Usaha Pangan Desa	6 kegiatan	0	0	0	0	0	0
	QDB.002.053	Pengawasan keamanan pangan desa	A Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa melalui	9 desa	0	0	0	0	0	0
	QDB.002.054	Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa	A Pengambilan Data/Survei Pre dan Post Intervensi Desa Pangan Aman	9 desa	0	0	0	0	0	0
			B Pengawasan di Desa yang sudah diintervensi keamanan pangan tahun sebelumnya	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			C Pelatihan Fasilitator UPT BPOM Penyuluh Keamanan Pangan Dalam Rangka Pendampingan Penerapan CPPOB/HACCP di UMKM	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0

Pelaksanaan advokasi program desa dilakukan bersamaan dengan advokasi sekolah dan pasar sehingga mengefisienkan biaya pelaksanaan kegiatan.

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 akan dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 36 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 100. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah desa pangan aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN 20212	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah desa pangan aman	277090000	68.558.202	24,74	133,33	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **tidak efisien** karena capaian indikator melebihi 120% sedangkan realisasi anggaran sangat kecil. Hal ini terjadi karena di triwulan I terdapat efisiensi anggaran pada pelaksanaan advokasi yang dilaksanakan bersamaan untuk program desa, sekolah dan pasar. Dengan adanya efisiensi biaya, sisa anggaran direvisi untuk penambahan biaya penyelenggaraan kegiatan

baru yaitu inovasi Jatim Truly dari pengurangan perjadiin bimtek komunitas desa, penambahan biaya Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa melalui kegiatan Mobling serta pengurangan biaya Pengambilan Data/Survei Pre dan Post Intervensi Desa Pangan Aman.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 101. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Desa Pangan Aman sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	Belum ada kegiatan, penyusunan lokus dan draft surat audiensi dan menunggu penetapan Juknis dari Pusat	Belum ada kegiatan, masih mengagendakan dan mencocokkan jadwal kegiatan audiensi dengan Bupati/Walikota atau yang mewakili	- audiensi sudah terlaksana di beberapa lokus, Lokus lainnya masih menyesuaikan agenda bupati/walikota. - capaian target tidak terpenuhi apabila tidak segera audiensi
Rekomendasi Perbaikan	-	-	- Mencari alternatif jalur komunikasi lain untuk mempercepat agenda audiensi - Melakukan percepatan kegiatan untuk lokus yang sudah diaudiensi
Rencana Aksi	-	Komunikasi aktif dengan Pemda/Ajudan Bupati/Walikota	- Komunikasi aktif dengan Pemda/Ajudan Bupati/Walikota - menetapkan rencana kegiatan PN untuk lokus yang sudah dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	-	-	- target dapat tidak tercapai - kesulitan mencocokkan agenda audiensi
Kondisi Setelah Rencana Aksi	-	-	target dapat terpenuhi sesuai rencana aksi
Status	Close	Close	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa target telah tercapai 100% namun target tahun 2023 dan 2024 belum tercapai. IKU ini bersifat jumlah kumulatif setiap tahun dan baru terealisasi di akhir tahun. Capaian triwulan I melebihi 120% (tidak dapat disimpulkan), namun belum diusulkan perubahan target triwulan melihat realisasi triwulan II. Di triwulan I juga masih terdapat kendala pada pelaksanaan advokasi sehingga dimungkinkan di triwulan II capaian akan normal.

4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 102. Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	0,8%	0%	0%	tidak memenuhi ekspektasi
Februari	1,7%	10%	588,24%	Tidak Dapat Disimpulkan
Maret	13,3%	18,33%	137,82%	Tidak Dapat Disimpulkan

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas dan Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Hingga akhir triwulan I tahun 2023, progres program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang telah dilaksanakan adalah audiensi dan advokasi ke 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Sampang, survei pasar di Kota Surabaya dan

Kabupaten Sampang. Capaian jumlah pasar aman dari bahan berbahaya melebihi target yang ditetapkan yaitu 137,82%, dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

- b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**
Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
- c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023**

Tabel 103. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Triwulan I tahun 2023 Dengan Target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100%	18,33	18,33	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya triwulan I tahun 2023 **belum mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria tidak memenuhi ekspektas, karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode tahun 2023.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 akan dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 36 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. Seharusnya pada triwulan I telah dilakukan audiensi, advokasi dan survey pasar di 6 (enam) kabupaten/kota target intervensi Tahun 2023. Namun karena kegiatan audiensi dan advokasi baru dilaksanakan di 2 (dua) kabupaten/kota, sehingga kegiatan survey pasar juga baru dapat dilaksanakan di 2 (dua) kabupaten/kota tersebut dan pelaksanaan survey pasar di 4 (empat) kabupaten/kota menjadi tertunda.

- e. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Tabel 104. Rencana Aksi pada Indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
20 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	QDB.003.052	Pengadaan peralatan pendukung	A Test Kit Pasar	6 paket	0	0	6	0	0	0
	QDB.003.053	Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A Survey Pasar	12 kali/trip	2	0	2	0	4	1
			B Penyuluhan Pedagang Pasar	6 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			C Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar dalam rangka Pengawasan Bahan Berbahaya	6 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			D Kampanye Keamanan Pangan di	6 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			E Pelatihan Fasilitator Pasar	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0
QDB.003.054	Pemantauan dan evaluasi	A Sampling dan Pengujian Sampel di Pasar	12 pasar	0	0	0	0	0	0	

Program intervensi pasar yang telah dilaksanakan adalah advokasi kepada lintas sektor pada 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Sampang, survei pasar di Kota Surabaya dan Kabupaten Sampang. Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan advokasi di triwulan II mengingat seharusnya kegiatan advokasi harus selesai sebelum tahapan lainnya bisa dilakukan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 105. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	21.4114.000	24.720.000	11,55	137,84	75% (tidak efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **tidak efisien** karena capaian indikator melebihi 120% sedangkan realisasi anggaran sangat kecil. Hal ini terjadi karena di triwulan I terdapat efisiensi anggaran pada pelaksanaan advokasi yang dilaksanakan bersamaan untuk program desa, sekolah dan pasar. Pada triwulan I tahun 2023 telah dilakukan revisi anggaran untuk penambahan perjadiin dalam kota untuk sampling dan pengujian di pasar.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 106. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	Belum ada kegiatan, penyusunan lokus dan draft surat audiensi dan menunggu penetapan Juknis dari Pusat	Belum ada kegiatan, masih mengagendakan dan mencocokkan jadwal kegiatan audiensi dengan Bupati/Walikota atau yang mewakili	- audiensi sudah terlaksana di beberapa lokus, Lokus lainnya masih menyesuaikan agenda bupati/walikota. - capaian target tidak terpenuhi apabila tidak segera audiensi
Rekomendasi Perbaikan	-	-	- Mencari alternatif jalur komunikasi lain untuk mempercepat agenda audiensi - Melakukan percepatan kegiatan untuk lokus yang sudah diaudiensi
Rencana Aksi	-	Komunikasi aktif dengan Pemda/Ajudan Bupati/Walikota	- Komunikasi aktif dengan Pemda/Ajudan Bupati/Walikota

Keterangan	Januari	Februari	Maret
			- menetapkan rencana kegiatan PN untuk lokus yang sudah dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	-	-	- target dapat tidak tercapai - kesulitan mencocokkan agenda audiensi
Kondisi Setelah Rencana Aksi	-	-	target dapat terpenuhi sesuai rencana aksi
Status	Close	Close	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa target telah tercapai 100% namun target tahun 2023 dan 2024 belum tercapai. IKU ini bersifat jumlah kumulatif setiap tahun dan baru terealisasi di akhir tahun. Capaian triwulan I melebihi 120% (tidak dapat disimpulkan), namun belum diusulkan perubahan target triwulan melihat realisasi triwulan II. Di triwulan I juga masih terdapat kendala pada pelaksanaan advokasi sehingga dimungkinkan di triwulan II capaian akan normal.

SASARAN STRATEGIS 6
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI LINGKUP
BBPOM DI SURABAYA

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 107. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	3	3,37	112,5	Memenuhi ekspektasi
Februari	11	11,35	103,21	Memenuhi ekspektasi
Maret	20	21,49	107,43	Memenuhi ekspektasi

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 21,49 %. Dari 640 sampel yang disampling, seluruhnya telah diperiksa dan dari 766 sampel yang masuk ke laboratorium sebanyak 489 sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **diatas target** yang ditetapkan yaitu sebesar 107,43% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**. Jumlah sampel yang disampling oleh Balai Besar POM di Surabaya berbeda dengan jumlah sampel yang masuk ke laboratorium, hal ini karena diterapkannya system regionalisasi laboratorium, yang memungkinkan laboratorium mengirimkan sampel dari dan ke UPT lain sesuai dengan pedoman yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan regionalisasi laboratorium.

- b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**
Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
- c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 108. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	21,49	21,49	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I tahun 2023 **belum mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Tahun 2023 dapat tercapai dengan pemenuhan sarana prasarana pengujian agar pengujian dapat diuji sesuai timeline.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar anggaran hingga triwulan I tahun 2023 mencapai target yang ditentukan. Pada triwulan I tahun 2023 seluruh sampel dikerjakan sesuai parameter pada pedoman sampling dan memenuhi waktu timeline.

Persentase realisasi sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 21,49%. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **diatas target** yang ditetapkan yaitu 107,43 % dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**. Jumlah sampel yang disampling oleh Balai Besar POM di Surabaya berbeda dengan jumlah sampel yang masuk ke laboratorium, hal ini karena diterapkannya sistem regionalisasi laboratorium, yang memungkinkan laboratorium mengirimkan sampel dari dan ke UPT lain sesuai dengan pedoman yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan regionalisasi laboratorium.

Sesuai dengan SOP dan pedoman, timeline pengujian sampel adalah 30 hari kerja dan timeline tidak dihitung bila kendala dalam pemenuhan timeline adalah kendala terkait alat, reagen, baku pembanding dan metode. Meskipun capaian target telah terpenuhi namun terdapat beberapa kendala dalam pengujian diantaranya :

1. Instrumen LC MSMS mengalami kerusakan, sehingga sampel regionalisasi yang seharusnya diuji di BBPOM di Surabaya terpaksa dikirim ke BBPOM di Mataram
2. Uji kandungan EG DEG tidak hanya pada komoditi obat, namun juga OT-SK dan Pangan menyebabkan antrian penggunaan instrumen GC MS. Sedangkan GC MS yang dimiliki oleh laboratorium BBPOM di Surabaya hanya satu dan telah berusia lebih dari 10 tahun. Perlu adanya peremajaan instrumen GC MS.
3. Terdapat kendala pemenuhan baku pembanding Amfetamin Sulfat dan Barbital yang diperlukan dalam pengujian produk OT-SK karena keterbatasan anggaran, sedangkan baku tersebut tidak tersedia di P3OMN

4. Keterlambatan pengadaan reagen menyebabkan beberapa pengujian terhambat karena reagen telah habis, diperlukan percepatan pengadaan reagen dan media mikro

Kurang lebih 20% instrumen di laboratorium BBPOM di Surabaya sudah berusia lebih dari 10 tahun bahkan ada yang berusia 20 tahun sehingga sering mengalami kerusakan. Realisasi anggaran pemeliharaan alat BBPOM di Surabaya meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2020 anggaran pemeliharaan alat sebesar Rp. 350,500,000,00; tahun 2021 sebesar Rp. 362.406.000,00; dan pada tahun 2022 realisasi anggaran pemeliharaan alat meningkat sebesar 25% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 452.205.000,00. Perlu dilakukan peremajaan dengan pengadaan alat baru dan penambahan anggaran pemeliharaan alat.

Antrian penggunaan instrumen juga merupakan salah satu kendala sehingga antrian alat disebabkan oleh :

1. Penggunaan bersama oleh beberapa laboratorium seperti instrumen GC-MS dan LC-MSMS.
2. Jumlah alat yang terbatas dibandingkan dengan jumlah sampel yang diuji, seperti Alat KLT Densitometri.

BBPOM di Surabaya hanya memiliki satu alat KLT Densitometri System, bila alat tersebut rusak atau terdapat sampel kasus maka pengujian sampel obat tradisional, suplemen kesehatan dan kuasi rutin akan terhenti karena menunggu perbaikan atau mengutamakan sampel kasus. Penambahan alat KLT Densitometri System untuk memperpendek antrian penggunaan alat sangat dibutuhkan.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 109. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	QIA.005.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A Pengadaan Sampel (acak)	30 kali/trip	2	1	3	2	3	3
	QIA.005.055	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen	A Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan (acak)	1 pkt lelang	0	0	0	0	0	0

Kegiatan yang dilakukan sepanjang triwulan I tahun 2023 adalah pengadaan sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta proses pengadaan reagensia dan media mikrobiologi melalui ecatalog.

Regionalisasi Laboratorium merupakan sistem pengelompokan Balai Besar/Balai POM berdasar kriteria kedekatan letak geografis antar Balai, kemudahan transportasi, kemampuan pengujian, dan kemudahan akses jaringan internet. Pada tahun 2022 Balai

Besar POM di Surabaya merupakan Balai Penguji Spesifik dalam Region 7 yang dikoordinatori Balai Besar POM di Denpasar dengan anggota antara lain : BB/Balai POM di Denpasar, Surabaya, Mataram, Kupang dan Loka Buleleng, Kediri, Jember, Bima, Manggarai Barat dan Ende. Tahun 2023 akan dibentuk system regionalisasi baru dimana akan terdapat satu laboratorium besar yang lengkap dalam satu region, Pemilihan lokasi laboratorium regional dalam satu wilayah didasarkan kepada luas bangunan, ketersediaan instrumen, SDM, jumlah industri baik industri farmasi, obat tradisional, kosmetik maupun pangan, jumlah kasus dan masih banyak lagi pertimbangan. Sistem Regionalisasi laboratorium baru ini akan dilanching pada bulan Mei 2023 dengan 2 laboratorium yang ditunjuk sebagai pilot project. Regionalisasi laboratorium baru diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan beraneka ragam parameter uji yang dibutuhkan untuk pengawasan obat dan makanan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 110. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	70.489.776	70.489.776	100	107,45	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Tidak ada revisi anggaran selama triwulan I tahun 2023.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 111. Tindak lanjut rekoemndasi hasil evaluasi capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kebutuhan alat yang mendesak untuk dipenuhi pada tahun 2023 (Nitrogen evaporator, GC MS, TLC System, Aw meter, turbidimeter anggaran yang dibutuhkan kurang lebih 6 Miliar) - Kebutuhan akan peningkatan kompetensi spesialis CPOB dari Laboratorium Pengujian - AC Central di lab mikrobiologi seringkali tidak terasa dingin meski sudah dilakukan perbaikan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat antrian alat GC MS untuk pengerjaan sampel EGDEG komoditi obat dan pangan - Beberapa reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk pengujian belum tersedia dan terlalu lama bila menunggu proses lelang - Kondisi laboratorium mikrobiologi (pada beberapa area) terjadi beberapa titik kebocoran (Air dari plafon) - Untuk pengujian Obat Tradisional, parameter Clostridia terkendala alat (Anaerobic jar atau Inkubator CO2), reagen dan reagen konfirmasi - Jaringan pipa gas hydrogen yang menuju ke instrument GC FID (1 tabung besar hanya bisa digunakan 2 hari) perlu diregenerasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelistrikan pada lemari asam ruang preparasi Laboratorium OTSK mengalami kendala sehingga lemari asam tidak dapat menyala dengan optimal karena aliran listriknya sering terputus dan MCB mengeluarkan percikan listrik - Terdapat antrian penggunaan TLC Scanner dan Sampler Densitometri karena banyaknya sampel kasus yang datang di bulan maret bersamaan dengan datangnya sampel rutin
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan instrumen yang dibutuhkan mendesak pada tahun 2023 - Melakukan peningkatan kompetensi spesialis CPOB - Info dari pihak rekanan (Daikin), daya AC Central sebesar 6 PK, kurang memadai dengan kondisi suhu saat ini. Sehingga perlu penambahan Daya serta pencucian dan penggantian filter secara rutin 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan penggunaan instrumen GC MS dengan memperhatikan prioritas - Menggunakan anggaran reagen non lelang untuk pemenuhan reagen dan baku pembanding - Pengajuan pengecekan kondisi plafon laboratorium mikrobiologi - Pengajuan pengadaan inkubator CO2 tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia anggaran, diusulkan untuk pengadaan anaerobic jar 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki sistem kelistrikan lemari asam di ruang preparasi Laboratorium OTSK - Penambahan seperangkat instrumen TLC scanner
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> - bersurat kepada P3OMN dan Rorenkeu untuk permohonan rekomendasi dan penambahan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan alat laboratorium yang harus dipenuhi tahun 2023 - Mengusulkan untuk mengikutsertakan calon Spesialis CPOB dalam kegiatan audit CPOB sebagai observer - Mengajukan pencucian dan penggantian filter AC Central secara rutin 	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuat penjadwalan penggunaan instrumen GC MS dengan memperhatikan prioritas - Dilakukan pembelian reagen dan baku pembanding menggunakan anggaran reagen non lelang (Pengadaan reagen KLB, Prekursor dsb) - Dilakukan pengecekan berkala terkait ruangan pengujian Mikrobiologi - Diusulkan pembelian Anaerobic jar 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghubungi teknisi terkait kelistrikan karena masih dalam masa garansi pemasangan - Penambahan instrumen Densitometri agar tidak terjadi antrian panjang dan penumpukan sampel
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> - terdapat alat-alat yang belum dimiliki / kurang sedangkan anggaran tahun 2023 untuk alat hanya sebesar 12 Juta - belum adanya peningkatan kompetensi spesialis CPOB - Suhu tidak dingin (tidak mencapai persyaratan pada Laboratorium Mikrobiologi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Antrian alat GC MS untuk pengerjaan sampel EGDEG komoditi obat dan pangan - Reagen dan baku pembanding belum tersedia - Terjadi kebocoran, pada saat hujan - Antrian pengujian parameter Clostridia pada Komoditi OT 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelistrikan lemari asam ruang preaparsi lab OT-SK mengalami masalah sehingga lemari asam tidak dapat menyala secara optimal - Antrian sperangkat alat Densitometri mulai dari TLC hingga scanner
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<p>Kondisi Februari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah diterima balasan persetujuan rekomendasi dari P3OMN dan Rorenkeu untuk pengadaan alat-alat tersebut, namun menggunakan DIPA Balai yang dioptimalisasi 		<ul style="list-style-type: none"> Kelistrikan MCB pada lemari asam di ruang preparasi lab OT-SK sudah diperbaiki dan lemari asam sudah optimal
Status	Open	Open	Close

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa target tidak tercapai, dikarenakan masih ada pengujian sampel yang melewati timeline karena belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana seperti alat laboratorium, baku pembanding dan lain-lain. Target hingga tahun 2024 tetap sama 100%, sehingga perlu banyak dilakukan upaya pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium. Pada awal tahun 2023 sudah dilakukan upaya bersurat ke Biro Perencanaan dan Keuangan dan P3OMN untuk penambahan anggaran pembelian alat laboratorium, namun jawaban yang diperoleh hanyalah persetujuan pengadaan alat laboratorium namun tidak ada penambahan anggaran.

2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 112. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	3	3,93	131,16	Tidak dapat disimpulkan
Februari	11	9,92	90,17	Belum memenuhi ekspektasi
Maret	20	23,94	119,72	Memenuhi ekspektasi

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan

biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). BBPOM di Surabaya termasuk laboratorium regional VII dengan koordinator BBPOM di Denpasar.

Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga triwulan I tahun 2023 adalah 23,94%. Dari 301 sampel yang disampling BBPOM di Surabaya, seluruhnya telah diperiksa dan dari 412 sampel yang masuk laboratorium sebanyak 240 sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 119,72% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya**

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023**

Tabel 113. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	23,94	23,94	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I tahun 2023 **belum mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Tahun 2023 dapat tercapai.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Seluruh sampel yang masuk ke laboratorium telah diuji sesuai dengan parameter sesuai pedoman sampling dan timeline (100%). Timeline pengujian sampel sesuai dengan SOP dan pedoman adalah 30 hari kerja. Timeline tidak dihitung bila kendala dalam pemenuhan timeline adalah kendala terkait alat, reagen, baku pembanding dan metode.

Perlu dilakukan peremajaan dengan pengadaan alat baru dan penambahan anggaran pemeliharaan alat hal ini karena kurang lebih 20% instrumen di laboratorium BBPOM di Surabaya sudah berusia lebih dari 10 tahun bahkan ada yang berusia 20 tahun sehingga sering mengalami kerusakan. Salah satu alat di laboratorium Pangan dan Air yang mengalami rusak berat adalah Nitrogen evaporator yang merupakan alat penunjang dalam pengujian kloramfenikol dan nitrofurantoin (parameter baru tahun 2023) yang merupakan parameter spesifik yang diuji BBPOM di Surabaya dalam rangka regionalisasi laboratorium. Alat tersenut hanya ada satu dan kondisinya sudah kurang dari 50% bagian yang dapat digunakan, perlu segera dilakukan pengadaan alat baru untuk mengantisipasi jumlah parameter regionalisasi yang menggunakan alat tersebut pada tahun 2023 yang semakin bertambah.

Antrian penggunaan instrumen juga merupakan salah satu kendala sehingga pengujian sampel melebihi 30 hari kerja, dengan adanya regionalisasi laboratorium yang merupakan sistem pengelompokan laboratorium berdasarkan spesialisasi pengujian Laboratorium pangan dan air BBPOM di Surabaya mendapatkan tugas untuk menguji parameter asetaldehid pada kemasan menggunakan GC MS dan uji residu kloramfenikol menggunakan LC MSMS. Kedua alat ini merupakan alat yang digunakan bersama antara laboratorium Pangan, Obat, Obat Tradisional-Suplemen Makanan dan Kosmetik.

Parameter - parameter baru yang diuji dalam rangka regionalisasi laboratorium juga menyebabkan pengujian mengalami kesulitan dalam mendapatkan kondisi yang optimal. Selain kesulitan uji terkait metode baru, beberapa instruksi pusat untuk menguji komoditi terkait isu yang sedang berkembang di masyarakat juga cukup berpengaruh terhadap kelangsungan pengujian, seperti misalnya pengujian BPA pada AMDK serta pengujian cemaran EG DEG yang beberapa kali dilakukan dan dibutuhkan hasil segera.

Kendala yang dialami laboratorium pangan selama Triwulan I diantaranya kerusakan alat ICP MS dan microwave digester yang digunakan untuk pengujian logam berat. Adanya kerusakan tersebut menyebabkan melambatnya penyelesaian sampel walaupun belum melebihi timeline, kerusakan ICP MS telah dapat diatasi dengan perbaikan, namun kerusakan microwave digester masih belum teratasi. Saat ini destruksi pengujian logam berat dilakukan dengan meminjam microwave digester dari lab OT SK.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 114. Rencana Aksi pada Indikator Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	QIA.001.053	Pengujian laboratorium sampel makanan	A Pengujian Laboratorium Sampel Makanan (acak)	1 pkt lelang	0	0	0	0	0	0
	QIA.001.055	Pengadaan sampel makanan	A Pengadaan Sampel (acak)	32 kali/trip	4	3	3	3	3	2

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sampling dan pengujian sampel makanan, selain itu juga sedang dilaksanakan proses pengadaan reagensia dan media mikrobiologi secara ecatalog. Regionalisasi Laboratorium merupakan sistem pengelompokan Balai Besar/Balai POM berdasar kriteria kedekatan letak geografis antar Balai, kemudahan transportasi, kemampuan pengujian, dan kemudahan akses jaringan internet. Pada tahun 2022 Balai Besar POM di Surabaya merupakan Balai Penguji Spesifik dalam Region 7 yang dikoordinatori Balai Besar POM di Denpasar dengan anggota antara lain : BB/Balai POM di Denpasar, Surabaya, Mataram, Kupang dan Loka Buleleng, Kediri, Jember, Bima, Manggarai Barat dan Ende. Tahun 2023 akan dibentuk system regionalisasi baru dimana akan terdapat satu laboratorium besar yang lengkap dalam satu region, Pemilihan lokasi laboratorium regional dalam satu wilayah didasarkan kepada luas bangunan, ketersediaan instrumen, SDM, jumlah industri baik industri farmasi, obat tradisional, kosmetik maupun pangan, jumlah kasus dan masih banyak lagi pertimbangan. Sistem Regionalisasi laboratorium baru ini akan diluncurkan pada bulan Mei 2023 dengan 2 laboratorium yang ditunjuk sebagai pilot project. Regionalisasi laboratorium baru diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan beraneka ragam parameter uji yang dibutuhkan untuk pengawasan obat dan makanan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 115. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	27.033.650	18.528.916	68,54	119,72	90% (efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Selama triwulan I tahun 2023 terdapat revisi penambahan penambahan biaya pembelian sampel makanan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 116. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kebutuhan alat yang mendesak untuk dipenuhi pada tahun 2023 (Nitrogen evaporator, GC MS, TLC System, Aw meter, turbidimeter anggaran yang dibutuhkan kurang lebih 6 Miliar) - Salah satu instrument PCR (merk : My GoPro) yang dikembalikan oleh Dinkes Prop Kupang, diterima di lab tanggal 22 Desember 2022 dalam keadaan error (menurut keterangan dalam BAST). 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat antrian alat GC MS untuk pengerjaan sampel EGDEG komoditi obat dan pangan - Terdapat penundaan penyelesaian sampel rutin karena banyaknya sampel kasus yang masuk diantaranya sampel minuman kekinian dan pengujian sampel kasus EG DEG - Tabung reaksi di laboratorium mikrobiologi masih menggunakan tutup kapas, sehingga memperlambat proses pembuatan media. - Rak tabung reaksi pada laboratorium Mikrobiologi terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - terdapat kerusakan alat ICP MS untuk pengujian logam, teknisi belum dapat memperbaiki secara langsung karena padatnya jadwal provider alat
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan instrumen yang dibutuhkan mendesak pada tahun 2023 - Pengajuan perbaikan kepada vendor untuk Instrumen PCR (merk : My GoPro) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan penggunaan instrumen GC MS dengan memperhatikan prioritas - Prioritas utama adalah sampel kasus yang menjadi perhatian masyarakat - Pengajuan tabung reaksi dengan tutup ulir (pada pengadaan glassware) - Pengajuan Rak tabung reaksi (pada pengadaan operasional pengujian) 	<ul style="list-style-type: none"> - perbaikan secara remote
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> - bersurat kepada P3OMN dan Rorenkeu untuk permohonan rekomendasi dan penambahan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan alat laboratorium yang harus dipenuhi tahun 2023 - Pengecekan Instrumen PCR (merk : My GoPro) oleh vendor 	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuat penjadwalan penggunaan instrumen GC MS dengan memperhatikan prioritas - Sesuai arahan P3OMN timeline sampel rutin dapat di hold untuk pengerjaan sampel kasus, dan segera menyelesaikan sampel rutin setelahnya - Pengajuan tabung reaksi dengan tutup ulir (pada pengadaan glassware) - Pengajuan Rak tabung reaksi (pada pengadaan operasional pengujian) 	<ul style="list-style-type: none"> - dilakukan penginstalan aplikasi anydesk pada PC instrumen ICP MS dengan bantuan tim IT agar dapat dilakukan perbaikan secara remote
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> - terdapat alat-alat yang belum dimiliki / kurang sedangkan anggaran tahun 2023 untuk alat hanya sebesar 12 Juta - Instrumen PCR (Merk My GoPro) tidak dapat digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Antrian alat GC MS untuk pengerjaan sampel EGDEG komoditi obat dan pangan - Penundaan pengerjaan sampel rutin 	<ul style="list-style-type: none"> - belum ada aplikasi anydesk sehingga perbaikan ICP MS belum dapat dilakukan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> - telah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari P3OMN dan Rorenkeu untuk pengadaan alat tersebut dengan memanfaatkan optimalisasi anggaran DIPA BBPOM di Surabaya - Info vendor pada instrumen PCR (Merk : My GoPro) terdapat kerusakan pada lid, biaya perbaikan sebesar 62,8 juta. 		
Status	Open	Open	Open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa target tidak tercapai, dikarenakan masih ada pengujian sampel yang melewati timeline karena belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana seperti alat laboratorium, baku pembanding dan lain-lain. Target hingga tahun 2024 tetap sama 100%, sehingga perlu banyak dilakukan upaya pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium. Pada awal tahun 2023 sudah dilakukan upaya bersurat ke Biro Perencanaan dan Keuangan dan P3OMN untuk penambahan anggaran pembelian alat laboratorium, namun jawaban yang diperoleh hanyalah persetujuan pengadaan alat laboratorium namun tidak ada penambahan anggaran.

SASARAN STRATEGIS 7
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN
KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI LINGKUP
BBPOM DI SURABAYA

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 117. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	2,0%	5,67%	283,33%	Tidak dapat disimpulkan
Februari	6,8%	16,88%	248,28%	Tidak dapat disimpulkan
Maret	12,1%	21,67%	179,06%	Tidak dapat disimpulkan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
 b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
 c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
 d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)
 Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times$
 (Jumlah capaian / target perkara)
 Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.
 Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila
 perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut
 sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2023 adalah 21,67. Capaian nilai persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2023 **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 178,79% dan mendapat kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya
 Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
- Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023

Tabel 118. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72	21,67	30,09	tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan I tahun 2023 **belum mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Tahun 2023 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2023 mencapai target. Pencapaian target realisasi tersebut karena telah tercapai 3 perkara dari 9 target perkara untuk tahun 2023 dan ada penyelesaian perkara carry over tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebanyak 3 perkara
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) perkara carry over tahun 2022 sebanyak 3 perkara

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

- Sejak Januari 2023 diterapkan aplikasi E-Berpadu (milik Mahkamah Agung) dimana masing-masing penyidik harus memiliki akun karena permohonan persetujuan penyitaan dan berkas perkara yang telah P21 harus dikirimkan secara online menggunakan aplikasi E-Berpadu untuk keperluan persidangan. Dilakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga per Januari 2023 penyidik BBPOM di Surabaya sudah memiliki akun. Dilakukan koordinasi juga dengan Korwas Polda Jawa Timur terkait permohonan penggeledahan karena Korwas harus mengirimkan permohonan penggeledahan ataupun laporan penggeledahan secara online melalui aplikasi E-Berpadu.
- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber dan onsite. Berdasarkan hasil pendalaman informasi tersebut maka pada Januari 2023 telah dilakukan operasi penindakan pada 1 sarana distribusi kosmetika (klinik kecantikan). Pada Februari 2023 dilakukan operasi penindakan pada 1 sarana distribusi kosmetika (importir) sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat dan 1 sarana distribusi obat tradisional.
- Membuat laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri setempat segera setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik.

- Melakukan pemanggilan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tambahan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing dalam rangka penyelesaian pemberkasan.
- Pada Januari 2023 telah dilakukan penyerahan berkas perkara (tahap 1) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur, yaitu perkara mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung Bahan Kimia Obat yang merupakan perkara carry over tahun 2022. Pada Februari 2023 terdapat 2 berkas perkara carry over tahun 2022 yang dinyatakan lengkap oleh JPU (P21) yaitu perkara mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung Bahan Kimia Obat.
- Pada Februari 2023 telah diterima surat P19 (berkas perkara dinyatakan belum lengkap) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk 1 perkara mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar dengan 2 tersangka, antara lain permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap kedua tersangka. Telah dilakukan pemanggilan tersangka namun kedua tersangka tersebut melalui masing-masing kuasa hukumnya mengirimkan surat keberatan/penolakan untuk dilakukan pemeriksaan dengan alasan surat panggilan tidak mencantumkan adanya P19 dari JPU dan 1 tersangka lainnya dengan alasan menunggu dilakukan gelar khusus terlebih dahulu.
- Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasan, antara lain terkait upaya yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan P19 dan terkait pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (tahap 2).
- Pada triwulan I dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebanyak 3 perkara carry over tahun 2022 yaitu 3 perkara mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar, dengan rincian 1 perkara yang dinyatakan lengkap (P21) pada Desember 2022 dan 2 perkara yang dinyatakan lengkap (P21) pada Februari 2022.
- Pada Maret 2023 telah dilakukan sidang di Pengadilan Negeri Kota Mojokerto dan Pengadilan Negeri Bangil untuk perkara mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung Bahan Kimia Obat yang menghadirkan saksi petugas dari BBPOM di Surabaya.
- Pada Maret 2023 dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) ke Kejaksaan Agung RI untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi, yaitu perkara memproduksi dan mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung Bahan

Kimia Obat yang merupakan kegiatan Operasi penindakan bersama Direktorat Penyidikan Badan POM RI, BBPOM di Surabaya dan Loka POM di Kab.Jember tahun 2021.

- Pada Maret 2023 dilakukan Operasi penindakan bersama Direktorat Penyidikan Badan POM RI, BBPOM di Surabaya dan Loka POM di Kab.Jember terhadap sarana produksi dan distribusi obat tradisional tanpa izin edar di Kab.Banyuwangi dan dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi.
- Dilakukan pemeriksaan WNA sebagai saksi dalam perkara mendistribusikan kosmetika tanpa izin edar dengan menghadirkan Ahli Bahasa dari Balai Bahasa Prov. Jawa Timur.
- Dilakukan update peta rawan kasus setiap bulan dengan mengambil data dari hasil pendalaman informasi / kegiatan penindakan / pengawasan / informasi masyarakat / media / temuan kasus dari kepolisian.
- Dilakukan patroli siber setiap bulan untuk mengidentifikasi akun yang akan direkomendasikan untuk dilakukan take down. Selain itu juga dilakukan profiling terhadap akun tertentu untuk dilaporkan ke Direktorat Siber Badan POM RI.

Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yaitu sosialisasi Patroli Siber secara daring yang diselenggarakan oleh Direktorat Siber Badan POM RI, Diklat TPPU di Pusdik APU Depok yang diselenggarakan oleh PPSDM Badan POM RI dan PPATK, Diklat Intelijen Lanjutan di Pusdik Intelijen Soreang yang diselenggarakan oleh Direktorat Intelijen Badan POM RI, FGD Tugas dan Fungsi PPNS serta pemanfaatan aplikasi PPNS yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan Bimtek E-Berpadu secara daring yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyidikan Badan POM RI.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 119. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET			
					T	R	T	R	T	R		
23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	AEA.001.052	Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A Perencanaan Penyusunan Analisis	2	kalitrip	0	2	1	0	0	0	
			B Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan	8	kalitrip	1	0	2	0	1	0	
			C FGD Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	2	kalitrip	0	0	0	0	1	0	
	AEA.001.053	Penjejak Digital Kejahatan Obat dan	A Rapat Perencanaan Penjejak Digital Kejahatan Obat dan	1	kalitrip	0	0	0	0	0	0	
			B Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	12	bulan	1	1	1	1	1	1	
			C Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	6	kalitrip	2	1	0	0	0	1	
			D Evaluasi Kegiatan Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	2	kalitrip	0	0	0	0	0	0	
			E Penyusunan Laporan Penjejak Digital Kejahatan	1	kalitrip	0	0	0	0	0	0	
	AEA.001.054	Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan	A Koordinasi Lintas Sektor Penindakan Obat dan Makanan	4	kalitrip	0	0	1	0	1	0	
			B Pembentukan Petugas Analisis Pencegahan Kejahatan	1	kalitrip	0	0	0	0	0	0	
			C Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	1	kalitrip	0	0	0	0	1	0	
			D Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Untuk Penguatan	1	kalitrip	0	0	0	0	0	0	
			E Forum Koordinasi Intelijen	1	kalitrip	0	0	0	0	1	0	
			F Evaluasi Operasi Siber dan Coaching Clinic	1	kalitrip	0	0	0	0	0	0	
			G Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyidik	1	kalitrip	0	0	0	0	0	0	1
	QCD.U09.051	Operasi Intelijen	H Pembentukan Petugas Intelijen	1	kalitrip	0	0	0	0	0	0	0
			I Pembentukan Petugas Intelijen Lanjutan BPODM	1	kalitrip	0	0	0	1	0	0	
			J Workshop Intelijen Strategis	1	kalitrip	0	0	0	0	0	0	
			K Penanganan Kasus Dengan Mekanisme Ultimum Remedium	8	kalitrip	1	0	1	0	0	0	
			L Pemusnahan Barang Bukti/Barang Yang Diserahkan/Barang	1	paket	0	0	0	0	0	0	
			M Sewa Gudang Untuk Barang	1	paket	1	1	0	0	0	0	
			A Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	9	perkara	4	1	0	2	0	0	
			B Pelaksanaan Operasi Intelijen Obat dan Makanan	9	perkara	1	1	1	2	1	0	
C Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			2	kalitrip	0	0	0	0	0	0		
QCD.U09.052			Gelar Kasus dan Pelaporan	A Gelar Kasus dan Pelaporan	9	perkara	1	9	1	0	1	0
QCD.U09.053	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	9	perkara	1	9	1	0	1	0		
QCD.U09.054	Operasi Penindakan	A Operasi Penindakan	9	perkara	1	1	1	2	1	0		
		B Penangkapan dan Penahanan	9	perkara	0	0	0	1	0	0		
QCD.U09.055	Pemberkasan	A Pemberkasan	9	perkara	0	1	1	1	1	1		
		B Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	9	perkara	0	1	0	1	3	2		
		C Gelar Perkara	9	perkara	0	1	1	0	1	0		
		D Bantuan Hukum/ Penasehat	9	perkara	0	0	1	0	0	0		
		E Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	9	perkara	0	1	1	1	1	1		

Kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator pada triwulan I tahun 2023 adalah sewa gudang barang bukti, kegiatan operasi intelijen, gelar kasus dan pelaporan, rapat pembahasan pendana penyidikan, skenario penindakan dan olah TKP, operasi penindakan, pemberkasan, konsultasi penyelesaian berkas perkara, gelar perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, perencanaan penyusunan analisis, patroli siber dan profiling kejahatan obat dan makanan, serta verifikasi data hasil patroli siber dan profiling kejahatan obat dan makanan. Selain itu juga telah dilaksanakan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur,

Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Pengadilan Negeri Surabaya, Balai Bahasa Prov. Jawa Timur, Samsat Surabaya Barat, Samsat Surabaya Timur, provider Indosat dan provider 3 dalam rangka penyelesaian pemberkasan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 120. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	494.623.000	349.898.428	70,74	179,06	90% (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Selama triwulan I tahun 2023 telah dilakukan penambahan biaya sewa kendaraan dan perjalanan dinas operasi intelijen karena intelijen dibutuhkan lebih dari 1 kali serta operasi penindakan membutuhkan waktu lebih dari 3 hari, serta penambahan biaya pemusnahan dari sisa sewa gudang.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 121. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan E-Berpadu (aplikasi milik Mahkamah Agung) sejak Januari 2023 namun belum disosialisasikan dimana masing-masing penyidik harus memiliki akun. Permohonan persetujuan penyitaan dan pengiriman berkas perkara secara online menggunakan E-Berpadu - Perencanaan kegiatan penindakan sesuai target perkara tahun 2023 yaitu sebanyak 9 perkara - Penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut sebanyak 22 perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - Diterima surat P19 an. tersangka AHF dan B dari JPU Kejati Jawa Timur - Diterima surat keberatan untuk menghadiri pemeriksaan dari Penasehat Hukum an. tersangka AHF untuk diperiksa dalam rangka upaya tindak lanjut pemenuhan P19 dari JPU - Diterima surat keberatan/penolakan pemeriksaan dari Penasehat Hukum an. tersangka B untuk diperiksa dalam rangka upaya tindak lanjut pemenuhan P19 dari JPU - Perencanaan kegiatan penindakan sesuai target perkara tahun 2023 yaitu sebanyak 9 perkara - Penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut yaitu sebanyak 22 perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan kegiatan penindakan sesuai target perkara tahun 2023 yaitu sebanyak 9 perkara - Pemeriksaan WNA sebagai saksi dalam perkara mendistribusikan kosmetika TIE sehingga diperlukan Ahli Bahasa - Penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut yaitu sebanyak 21 perkara
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi ke Kejati Jawa Timur, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur terkait penerapan aplikasi E-Berpadu - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi

Keterangan	Januari	Februari	Maret
	<p>Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan gelar kasus sarana distribusi kosmetika yang mengedarkan kosmetika TIE - Pengiriman SPDP dan permohonan bantuan geledah ke Korwas Polda Jatim - Melakukan pemanggilan saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasian - Melakukan koordinasi ke Samsat Surabaya Timur dan Samsat Surabaya Barat untuk mencari bukti-bukti dalam upaya penyelesaian pemberkasian salah satu perkara carry over 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan gelar kasus importir yang mendistribusikan kosmetika TIE dan sarana yang mengedarkan OT TIE - Pengiriman SPDP dan permohonan bantuan geledah ke Korwas Polda Jatim - Melakukan pemanggilan saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing - Melakukan pengiriman surat panggilan ke-2 kepada tersangka ABH dan tersangka B untuk diperiksa dalam rangka upaya tindak lanjut pemenuhan P19 dari JPU - Melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejati Jawa Timur untuk perkara yang sudah P21 - Melakukan koordinasi ke Ditlantas Polda Jatim dan Indosat untuk mencari bukti-bukti dalam upaya penyelesaian pemberkasian salah satu perkara carry over - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasian 	<p>penindakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan operasi penindakan sarana yang mengedarkan OT TIE - Melakukan pengiriman surat panggilan ke-2 kepada tersangka ABH dan tersangka B untuk diperiksa dalam rangka upaya tindak lanjut pemenuhan P19 dari JPU - Melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejati Jawa Timur untuk perkara yang sudah P21 - Pengiriman surat panggilan konfrontir saksi-saksi untuk perkara kosmetika TIE yang merupakan perkara carry over tahun 2022 - Melakukan koordinasi ke Balai Bahasa Prov. Jawa Timur untuk permohonan ahli bahasa dalam rangka pemeriksaan saksi yang merupakan WNA - Melakukan pemanggilan saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing - Melakukan koordinasi ke Ditlantas Polda Jatim dan Indosat untuk mencari bukti-bukti dalam upaya penyelesaian pemberkasian salah satu perkara carry over - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasian
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi ke Kejati Jawa Timur, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur terkait penerapan aplikasi E-Berpadu - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Melakukan gelar kasus sarana distribusi kosmetika yang mengedarkan kosmetika TIE - Pengiriman SPDP dan permohonan bantuan geledah ke Korwas Polda Jatim - Melakukan pemanggilan saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasian - Melakukan koordinasi ke Samsat Surabaya Timur dan Samsat Surabaya Barat untuk mencari bukti- 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Melakukan gelar kasus importir yang mendistribusikan kosmetika TIE dan sarana yang mengedarkan OT TIE - Pengiriman SPDP dan permohonan bantuan geledah ke Korwas Polda Jatim - Melakukan pemanggilan saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing - Melakukan pengiriman surat panggilan ke-2 kepada tersangka ABH dan tersangka B untuk diperiksa dalam rangka upaya tindak lanjut pemenuhan P19 dari JPU - Melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejati Jawa Timur untuk perkara yang sudah P21 - Melakukan koordinasi ke Ditlantas Polda Jatim dan Indosat untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Melakukan operasi penindakan sarana yang mengedarkan OT TIE - Melakukan pengiriman surat panggilan ke-2 kepada tersangka ABH dan tersangka B untuk diperiksa dalam rangka upaya tindak lanjut pemenuhan P19 dari JPU - Melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejati Jawa Timur untuk perkara yang sudah P21 - Pengiriman surat panggilan konfrontir saksi-saksi untuk perkara kosmetika TIE yang merupakan perkara carry over tahun 2022 - Melakukan koordinasi ke Balai Bahasa Prov. Jawa Timur untuk permohonan ahli bahasa dalam

Keterangan	Januari	Februari	Maret
	bukti dalam upaya penyelesaian pemberkasian salah satu perkara carry over	mencari bukti-bukti dalam upaya penyelesaian pemberkasian salah satu perkara carry over - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasian	rangka pemeriksaan saksi yang merupakan WNA - Melakukan pemanggilan saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing - Melakukan koordinasi ke Ditlantas Polda Jatim dan Indosat untuk mencari bukti-bukti dalam upaya penyelesaian pemberkasian salah satu perkara carry over - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasian
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	- Masing-masing penyidik belum memiliki akun untuk aplikasi E-Berpadu - Belum ada realisasi target perkara tahun 2023 - Jumlah perkara carry over sebanyak 22 perkara	- Terealisasi 1 perkara dari 9 target perkara tahun 2023 - Jumlah perkara carry over sebanyak 22 perkara	- Terealisasi 3 perkara dari 9 target perkara tahun 2023 - Jumlah perkara carry over sebanyak 21 perkara
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Februari : - Masing-masing penyidik telah memiliki akun untuk aplikasi E-Berpadu sehingga permohonan persetujuan penyitaan dan pengiriman berkas perkara yang telah P21 secara online menggunakan E-Berpadu - Telah dilakukan kegiatan penindakan di bulan Januari 2023 terhadap sarana distribusi kosmetika yang mengedarkan kosmetika TIE - Telah dilakukan penyerahan berkas perkara an. tersangka NW ke Kejati Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur pada Januari 2023 (merupakan perkara carry over tahun 2022) - Telah dilakukan kegiatan penindakan di bulan Februari 2023 terhadap importir kosmetika yang mendistribusikan kosmetika TIE - Diterima surat P21 an. tersangka K dan NW pada Februari 2023 dari Kejati Jatim - Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejati Jawa Timur an. tersangka NW pada Februari 2023 (merupakan perkara carry over tahun 2022)	Kondisi Maret : - Telah dilakukan kegiatan penindakan di bulan Maret 2023 terhadap sarana distribusi OT yang mengedarkan OT TIE - Telah dilakukan pengiriman surat panggilan ke-2 kepada tersangka ABH dan tersangka B untuk diperiksa dalam rangka upaya tindak lanjut pemenuhan P19 dari JPU - Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejati Jawa Timur an. tersangka IP dan K pada Maret 2023 (merupakan perkara carry over tahun 2022) - Telah dilakukan operasi penindakan produsen OT ilegal di Banyuwangi dengan Direktorat Penyidikan BPOM RI - Telah dilakukan pengiriman surat panggilan konfrontir saksi-saksi untuk perkara kosmetika TIE yang merupakan perkara carry over tahun 2022 - Telah dilakukan koordinasi ke Balai Bahasa Prov. Jawa Timur untuk permohonan ahli bahasa dalam rangka pemeriksaan saksi yang merupakan WNA - Telah dilakukan pemeriksaan saksi WNA dalam rangka pemberkasian perkara kosmetika TIE - Menghadiri sidang sebagai saksi petugas di PN Mojokerto dan PN Bangil	Kondisi April : -
Status	Close	Close	Open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target tahun 2022 sudah tercapai, namun target tahun 2023 dan 2024 belum tercapai. Terdapat kendala dalam penyelesaian perkara, sehingga untuk menindaklanjutinya maka dilaksanakan pertemuan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasian, terkait upaya yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan P19 dan terkait pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (tahap 2).

SASARAN STRATEGIS 8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup
BBPOM di Surabaya yang optimal

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

1. Indeks RB BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 122. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya Triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Pebruari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-

Indeks RB BBPOM di Surabaya diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang

selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM : Manajemen Perubahan (bobot 5%), Penataan Tatalaksana (bobot 5%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 15%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%), Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%). Sedangkan rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM adalah Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 20%) dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (bobot 20%).

Nilai indeks RB BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2023 belum diperoleh menunggu hasil penilaian dari TPI (Tim Penilai Internal) atau APIP pada akhir tahun 2023.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023

Tabel 123. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks RB BBPOM di Surabaya	89,7	-	-	-

Realisasi indeks RB BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2023 belum diperoleh karena hasil penilaian oleh APIP baru akan diperoleh di akhir tahun.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2021, BBPOM Surabaya telah berhasil memperoleh predikat WBBM. Namun demikian, tetap harus dilakukan perbaikan berkelanjutan sebagai upaya untuk mempertahankan predikat WBBM dan upaya mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Pada triwulan I tahun 2023, BBPOM Surabaya telah melakukan evaluasi inovasi yang sudah diterapkan di tahun 2022, dengan hasil mengganti 2 inovasi yang sudah tidak relevan dengan 2 inovasi baru yaitu inovasi Jatim Truly dan inovasi PAMAN. Selain itu terdapat beberapa pengembangan dari inovasi sebelumnya antara lain pengembangan

aplikasi simpelsi (penambahan menu tanda tangan tanda terima tunjangan kinerja), pengembangan aplikasi Teman Odin (menambah fitur notifikasi), dan penyelesaian aplikasi SILASKAR (layanan saksi ahli). Prestasi yang berhasil di raih oleh AOC adalah penghargaan sebagai Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Terbaik I. Pada awal tahun juga dikembangkan inovasi aplikasi untuk mempermudah pengawasan barang tentengan, namun inovasi ini dibatalkan karena akan ada penyeragaman aplikasi dari pusat.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 124. Rencana Aksi pada Indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET		
					T	R	T	R	T	R	
24 Indeks RB BBPOM di Surabaya	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	A Internalisasi Reformasi Birokrasi Mempertahankan WBBM	6 kegiatan	0	0	1	1	0	2	
			C Pemeliharaan dan Peningkatan	3 kegiatan	0	0	1	0	1	0	
			K Workshop Penyelenggaraan	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0	
				M Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Badan POM	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
		BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	E Sosialisasi dan Internalisasi Fraud Control Plan (FCP) Regional	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
	F Koordinasi lintas sektor			8 kali/trip	0	0	1	0	0	0	
		EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	A Pembayaran gaji dan tunjangan	12 bulan	1	1	1	1	1	1
		EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A Kebersihan dan Keamanan Kantor	1 paket	0	0	0	0	0	0
	B Pemeliharaan Gedung Kantor			12 bulan	1	1	1	1	1	1	
	D Pengadaan Keperluan Sehari-Hari			12 bulan	1	1	1	1	1	1	
	E Pemeliharaan Kendaraan Roda 4			12 bulan	1	1	1	1	1	1	
	F Terselenggaranya Operasional Perkantoran			12 bulan	1	1	1	1	1	1	
	G Pemeliharaan Kendaraan Roda 2			12 bulan	1	1	1	1	1	1	
	H Pemeliharaan Sarana Gedung			12 bulan	1	1	1	1	1	1	
	I Kesehatan Pegawai			12 bulan	1	1	1	1	1	1	
	EBA.962.051	Layanan Umum UPT	A Pemeriksaan Kesehatan	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0	
	CAB.002.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A Pengadaan Fasilitas Perkantoran	1 paket	0	0	0	0	0	0	

Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Indeks RB adalah dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua komponen penilaian indeks RB serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Selama triwulan I tahun 2023, BBPOM di Surabaya banyak dikunjungi Balai dari seluruh Indonesia untuk sharing terkait keberhasilan pencapaian predikat WBBM, dari kegiatan tersebut juga telah dilakukan sharing apa saja yang sudah dilakukan di Balai Balai tersebut, sehingga bisa menjadi masukan perbaikan untuk BBPOM di Surabaya. Seluruh rencana aksi RB yang telah direncanakan di triwulan I tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik, bahkan terdapat beberapa tambahan inovasi yang tidak direncanakan sebelumnya. Kegiatan penunjang yang juga dilaksanakan selama triwulan I tahun 2023 antara lain Pemeliharaan dan Peningkatan QMS, Peningkatan Kompetensi Agent of Change, Pelatihan Lead Auditor, dan semua kegiatan operasional perkantoran serta belanja pegawai.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 125. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks RB BBPOM di Surabaya	6.520.180.083	5.058.127.683	77,58	-	-

Efisiensi anggaran pada triwulan I tahun 2023 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Selama triwulan I tahun 2023 terdapat revisi anggaran blokir tunjangan kinerja 3 bulan senilai 2.410.714.000 serta penambahan biaya langganan internet karena penambahan bandwidth.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 126. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	belum ada pengawasan barang tentengan	Permintaan dari pemkot Batu untuk pendampingan Pedagang Kreatif Lapangan di lokasi pariwisata	Belum bisa melakukan pengisian LKE dan data dukung ZI menunggu perubahan juknis dari menpan dan BPOM
Rekomendasi Perbaikan	membuat inovasi terkait pengawasan barang tentengan bekerjasama dengan Bea cukai	membuat inovasi baru pendampingan Pedagang Kreatif Lapangan di lokasi pariwisata	tetap mengisi LKE dan data dukung ZI seperti biasa sambil menunggu arahan dari pusat
Rencana Aksi	membuat inovasi terkait pengawasan barang tentengan bekerjasama dengan Bea cukai	membuat inovasi baru pendampingan Pedagang Kreatif Lapangan di lokasi pariwisata	tetap mengisi LKE dan data dukung ZI seperti biasa sambil menunggu arahan dari pusat
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	belum ada inovasi	belum ada inovasi	LKE ZI dan data dukung belum terisi
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Pebruari : berkoordinasi dengan bea cukai dan membuat inovasi sipatas libas	Kondisi Maret : launching inovasi Jatim Truly	Kondisi April : LKE ZI dan data dukung sudah dilengkapi oleh semua pokja
Status	close	Close	close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target tahun 2022 sudah tercapai, begitu pula dengan target tahun 2023 dan 2024 sudah terlampaui. Namun belum diajukan perubahan target karena terdapat perubahan cara penilaian RB dari Kemenpan dimana terdapat RB tematik dan RB General dan perubahan penilaian belum ditentukan sampai sekarang.

2. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 127. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Pebruari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Surabaya adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan rentang nilai sebagai berikut :

Tabel 128. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d. 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Pada triwulan I tahun 2023, belum diperoleh penilaian AKIP dari APIP/Inspektorat.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 129. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRIERIA
Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85,6	-	-	-

Belum ada realisasi nilai AKIP BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2023, hasil penilaian AKIP oleh APIP akan diperoleh di akhir tahun 2023.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2022, BBPOM di Surabaya telah berhasil menaikkan nilai AKIP menjadi 84,99 (A), namun demikian perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai tersebut karena target 2023 juga meningkat. Rekomendasi penilaian AKIP di tahun 2022 antara lain :

- Menciptakan inovasi terkait pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi
- belum adanya penjelasan mengenai perubahan anggaran dan dikaitkan dengan capaian kinerja serta inovasi terkait pelaporan kinerja
- Progres rencana aksi belum tergambarkan pada Laporan Kinerja Interim
- Belum ada penjelasan terkait upaya efisiensi tingkat sasaran dan kegiatan pada Laporan Kinerja Interim
- Belum adanya inovasi terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal
- Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada tahun berjalan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja serta mempertahankan upaya perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement)

Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari APIP, pada triwulan I tahun 2023, telah dilakukan perbaikan pada laporan kinerja interim triwulan I tahun 2023 dengan menambahkan penjelasan mengenai perubahan anggaran dan dikaitkan dengan capaian kinerja, menambahkan progres rencana aksi setiap triwulan, menambahkan penjelasan upaya efisiensi tingkat sasaran dan kegiatan. Inovasi terkait pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi simakin yang telah mengukur IKI individu hingga pimpinan UPT setiap triwulan secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi. Telah tersedia inovasi temanqu untuk pelaporan kinerja, dimana semua pegawai dapat mengakses laporan kinerja tahunan, laporan tahunan, laporan kinerja interim triwulan, dan laporan evaluasi internal triwulan. Telah tersedia inovasi insight yang menampilkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan aplikasi simetris yang telah memuat rekapitulasi kendala, rencana aksi, dan tindak lanjut. Selain itu telah terdapat peningkatan kinerja dari tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dibuktikan dengan kenaikan NPS dan penambahan jumlah IKU yang mencapai target. Pada triwulan I tahun 2023 juga telah disusun Laporan evaluasi Renstra Paruh Waktu yang berisi evaluasi kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2020 hingga tahun 2022 serta proyeksi ketercapaian target tahun 2024.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 130. Rencana aksi pada Indikator Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
25 Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	D Forum Komunikasi Perencana BPOM	2 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			E Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2022	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			F Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan	1 kali/trip	0	0	0	0	1	1
			H Perencanaan dan Evaluasi	1 paket	0	0	0	0	0	0
			N Evaluasi Sakip Regional	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			O Asistensi Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Bimbingan Teknis SAI dan Laporan	1 kali/trip	0	0	0	0	1	0
	BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	D Bimtek SAKIP dan Monev Online	1 kali/trip	1	0	0	1	0	0

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai AKIP antara lain dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, tim sakip mengikuti bimtek SAKIP dan monev online, dan mengikuti rapat kerja nasional badan pengawas obat dan makanan. Dengan selalu ditingkatkannya kompetensi tim sakip setiap tahun, diharapkan perbaikan dapat selalu dilakukan untuk pelaksanaan sistem akip yang lebih baik secara menyeluruh.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 131. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	19.052.000	3.844.772	20,18	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa efisiensi anggaran belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Tindak lanjut hasil evaluasi sakip tahun 2022 telah dilakukan dan tidak memerlukan biaya, sehingga tidak ada revisi anggaran di triwulan I tahun 2023.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 132. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Nilai AKIP BBPOM di Surabaya sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	Terdapat 3 IKU yang sudah mempunyai target di bulan Januari, namun realisasi masih 0 yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, Jumlah desa pangan aman, dan Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	masih terdapat 2 IKU yang tidak memenuhi ekspektasi dan 4 IKU yang belum memenuhi ekspektasi, sehingga NPS sementara hanya 86,62 atau belum memenuhi ekspektasi	Hanya 1 IKU Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang belum memenuhi ekspektasi/cukup. Hasil proyeksi capaian tahun 2024, IKU ini tidak akan tercapai.
Rekomendasi Perbaikan	Melakukan percepatan kegiatan dan melakukan monitoring untuk	menindaklanjuti semua rekomendasi 6 IKU yang belum	Mengajukan penurunan target IKU sertifikasi tahun 2024 ke roren

Keterangan	Januari	Februari	Maret
	memastikan bulan Pebruari kegiatan tersebut sudah terlaksana	mencapai target supaya target tw 1 tercapai	
Rencana Aksi	Melakukan percepatan kegiatan dan melakukan monitoring untuk memastikan bulan Pebruari kegiatan tersebut sudah terlaksana	menindaklanjuti semua rekomendasi 6 IKU yang belum mencapai target supaya target tw 1 tercapai	Mengajukan penurunan target IKU sertifikasi tahun 2024 ke roren
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Realisasi IKU Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, Jumlah desa pangan aman, dan Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya masih 0 di bulan Januari	masih terdapat 2 IKU yang tidak memenuhi ekspektasi dan 4 IKU yang belum memenuhi ekspektasi, sehingga NPS sementara hanya 86,62 atau belum memenuhi ekspektasi	Hanya 1 IKU Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang belum memenuhi ekspektasi/cukup. Hasil proyeksi capaian tahun 2024, IKU ini tidak akan tercapai.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Februari : sudah ada realisasi IKU di bulan Februari	Kondisi Maret : hanya 1 IKU yang belum memnuhi ekspektasi dan NPS bulan Maret sebesar 112,18 atau memenuhi ekspektasi/baik	Kondisi April :
Status	close	close	Open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target tahun 2022 sudah tercapai, namun target tahun 2023 dan 2024 belum tercapai. Telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi sakip tahun 2022 pada triwulan I tahun 2023 sehingga diharapkan target tahun 2023 dapat tercapai.

SASARAN STRATEGIS 9 Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya

Tabel 133. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Pebruari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- b. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- c. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- d. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Pada triwulan I tahun 2023 belum diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya. Nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2023.

- b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya
Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
- c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 134. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,5	-	-	-

Belum tersedia realisasi Indeks Profesionalitas ASN pada triwulan I tahun 2023. Realisasi akan diperoleh pada akhir tahun 2023

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Belum diperoleh hasil pada triwulan I tahun 2023. Rencana aksi yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain : pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti upacara, penerapan inovasi PINSIL (pemberian pin kepada 3 orang pegawai dengan jumlah keterlambatan paling banyak) dan penilaian SKP setiap triwulan. Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/ seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM, sehingga pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi.

Untuk menegakkan disiplin pegawai, dilakukan apel *online* via zoom setiap senin dan kamis (inovasi apel manis) untuk mensosialisasikan semua informasi penting lainnya kepada seluruh pegawai. Untuk memacu kinerja pegawai, diterapkan juga mekanisme *reward* dan *punishment* pegawai, dimana pegawai yang mempunyai kinerja terbaik dan disiplin tinggi diberi penghargaan pegawai teladan dengan diberi kompensasi peningkatan kompetensi sesuai pilihan pribadi dengan biaya dari kantor. Pada tahun 2022, diperoleh 2 orang dengan nilai SKP “cukup”, hal ini dapat mengurangi perolehan bobot kinerja. Selain itu terdapat 1 orang yang diberi hukuman disipling selama tahun 2023 sehingga dapat mengurangi perolehan bobot kinerja. Oleh karena itu, upaya yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan nilai kompetensi pegawai.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 135. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
26 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	B Diklat untuk Pegawai Teladan	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			C Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka Perkuatan SDM Unggul	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			G Pelatihan Dasar dan Rekrutmen	2 kegiatan	0	0	0	0	0	1
			H Peningkatan Kompetensi Pegawai	11 kali/trip	0	0	0	0	0	1
			P Pembinaan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator di triwulan I tahun 2023 antara lain Peningkatan Kompetensi Pegawai, dan Rekrutmen CP3K. Selain itu juga dilakukan kegiatan pendukung seperti melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua komponen penilaian indeks seperti kompetensi, capaian JP, kinerja individu/SKP, disiplin pegawai, capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 136. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	3.690.000	3.690.000	100	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa efisiensi penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat dihitung, karena capaian indikator belum tersedia. Capaian indikator baru diperoleh di akhir tahun. Pada triwulan I tahun 2023 telah dilakukan revisi anggaran pengurangan dana rekrutmen CPNS karena tahun ini tidak ada rekrutmen CPNS, hanya rekrutmen CP3K.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 137. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	Terdapat penghapusan Koordinator dan subkoordinator sehingga alur kinerja dan pelaporan kinerja masih mengalami banyak kesalahpahaman	masih ada 3 orang pegawai di TU yang berpendidikan SMA	SK perpindahan jabatan dari struktural ke fungsional an. Dra. Retno Chatulistiani belum terbit padahal yang bersangkutan seharusnya pensiun per 1 April 2023
Rekomendasi Perbaikan	penyusunan SK ketua tim, SK penanggungjawab keuangan, cuti, dan disiplin pegawai	Dimotivasi untuk mengajukan tugas belajar melanjutkan ke S1 di Universitas Terbuka	Melakukan komunikasi intensif ke Biro SDM untuk memantau perkembangan atau penambahan kelengkapan data dukung
Rencana Aksi	penyusunan SK ketua tim, SK penanggungjawab keuangan, cuti, dan disiplin pegawai	Pendampingan kepada 3 pegawai tersebut untuk mengajukan tubel	Melakukan komunikasi intensif ke Biro SDM untuk memantau perkembangan atau penambahan kelengkapan data dukung
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	belum ada SK ketua tim, SK penanggungjawab keuangan, cuti, dan disiplin pegawai	3 orang pegawai TU belum mengajukan tubel	SK perpindahan jabatan dari struktural ke fungsional an. Dra. Retno Chatulistiani belum terbit padahal yang bersangkutan seharusnya pensiun per 1 April 2023
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Februari : sudah ada SK ketua tim, SK penanggungjawab keuangan, cuti, dan disiplin pegawai	Kondisi Maret : 3 orang pegawai TU yang SMA sudah mengajukan tubel	Kondisi April : SK perpindahan jabatan dari struktural ke fungsional an. Dra. Retno Chatulistiani sudah terbit dan sudah bisa diproses gaji susulan
Status	Close	Close	close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target tahun 2023 telah tercapai di tahun 2022, namun tidak dilakukan usulan menaikkan target tahun 2023 dan 2024 karena pada tahun 2022 dan seterusnya terdapat SKP dengan nilai cukup dan terdapat 1 pegawai yang mendapat hukuman disiplin di tahun 2023 sehingga akan mengulangi nilai indeks IP ASN.

SASARAN STRATEGIS 10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan obat dan makanan

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 138. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
3. Standar Alat Laboratorium > 70.

Terkait dengan implementasi Regionalisasi Laboratorium triwulan I tahun 2023 dan pemenuhan kapasitas dan kemampuan Laboratorium, belum diperoleh nilai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) BBPOM di Surabaya. Nilai akhir akan diperoleh di akhir tahun 2023. Nilai sementara sesuai evaluasi mandiri di triwulan I adalah 85,29, hanya meningkat tipis dari hasil audit GLP TW IV tahun 2022 yang semula 85,2 sedangkan target tahun 2023 adalah 88.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024

Tabel 139. Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2021 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88	-	-	-

Belum ada realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada triwulan I tahun 2023. Nilai akan diperoleh di akhir tahun 2023.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

BBPOM di Surabaya senantiasa berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dari tiga unsur penilaian Standar Kemampuan Laboratorium BBPOM di Surabaya didapatkan poin sebagai berikut

1. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) = 87,5%
2. Pemenuhan Kompetensi SDM = 87,27%
3. Pemenuhan Peralatan = 81,14%

Usaha yang dilakukan pada triwulan I untuk mencapai target antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium.
- Melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan melaksanakan verifikasi metode dan pengujian sampel untuk pemenuhan ruang lingkup
- Melakukan pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan melaksanakan pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan secara daring yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, maupun dari P3OMN.

- Pemenuhan Standar Alat laboratorium dilakukan dengan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP dan pemenuhan kebutuhan regionalisasi laboratorium.

Kendala Pemenuhan GLP antara lain sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup

- Belum tersedianya alat Ion Chromatography (IC) dan Turbidimeter yang diperlukan untuk parameter uji Lab Spesifik Air sedangkan untuk tahun 2023 tidak tersedia anggaran untuk pengadaan alat di BBPOM Surabaya
- Alat GCMS hanya ada 1 unit dan penggunaannya secara bergantian dengan antrian untuk laboratorium Pangan, Obat Tradisional Kosmetik dan Obat (jumlah sampel tahun 2022 sebanyak 419 sampel dengan durasi uji 2 - 4 jam per sampel), hal ini menyulitkan penambahan ruang lingkup.
- Parameter-parameter yang terdapat pada SRL sebagian tidak dapat diuji karena berbeda dengan parameter yang terdapat pada prioritas sampling. Sehingga ketersediaan reagen, alat dan baku pembanding menjadi kendala karena Balai mengutamakan parameter-parameter wajib yang terdapat pada prioritas sampling.
- Banyak sampel dari pihak ketiga yang parameter ujinya tidak masuk dalam standar ruang lingkup.
- Penambahan ruang lingkup untuk parameter uji diazolidinyl urea (Kosmetik) belum dapat dilakukan karena optimasi yang dilakukan belum berhasil.
- Ruang lingkup kategori residu pestisida memerlukan peningkatan kompetensi personel. Dimana RL tersebut tidak termasuk ke dalam materi PAI tahun 2023
- Ruang lingkup pengujian spesifik residu obat (Metabolit Nitrofurazon AMOZ, AOZ, Amino hidantoin, Semicarbazide) memerlukan peningkatan kompetensi personel. Dimana RL tersebut tidak termasuk ke dalam materi PAI tahun 2023

2. Kompetensi

- Adanya personel penguji laboratorium yang memasuki masa purnabakti menyebabkan penurunan nilai kompetensi, sedangkan penguji yang baru harus memenuhi kelengkapan kompetensi agar dapat meningkatkan persentase pemenuhan kompetensi
- Terdapat personil yang kesulitan memenuhi nilai SKL kompetensi karena laboratorium penempatan personil tersebut tidak melaksanakan pengujian terkait.

3. Peralatan

- Pengurangan nilai peralatan disebabkan alat rusak dan usang, lebih dari 20% instrumen di Balai Besar POM di Surabaya berusia lebih dari 10 tahun.

- Untuk alat inkubator yang digunakan dalam pengujian mikrobiologi, penetapan jumlah alat dalam standar berdasarkan suhu penggunaan. Namun dalam penggunaan di laboratorium terdapat pengujian sampel dengan suhu inkubasi tertentu yang lebih banyak dibandingkan suhu inkubasi yang lain (yang terdapat dalam standar alat), sehingga mempengaruhi jumlah alat berdasarkan suhu penggunaan dan nilai SKL peralatan.
- Laboratorium OTSK hanya mempunyai 1 (satu) alat TLC System, sedangkan hampir semua parameter OTSK menggunakan alat tersebut untuk pengujian dasar, sehingga mengakibatkan terjadinya antrian pada alat tersebut. Antrian diperpanjang dengan adanya sampel kasus yang tidak terprediksi baik jumlah ataupun waktu datangnya, sehingga alat tersebut lebih diprioritaskan untuk penyelesaian sampel kasus, dan mengakibatkan timeline pengujian sampel rutin semakin panjang karena menunggu antrian alat
- Alat GCMS hanya ada 1 dan sudah berusia lebih dari 10 tahun, beberapa suku cadang sudah diskontinyu dan tidak dapat dilakukan update aplikasi.
- Peralatan laboratorium sebagian besar sudah berusia 20 tahun, perlu dilakukan refreshment peralatan untuk mendukung proses pengujian yang memerlukan teknologi modern.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 140. Rencana Aksi pada Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET			
					T	R	T	R	T	R		
27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	PDD.001.054	Peningkatan ruang lingkup pengujian	A Bimtek Pemeliharaan Dan Perbaikan	1	kalitrip	0	0	0	0	0	0	
			B Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai/Balai Besar PDM Kimia Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif	1	kalitrip	0	0	0	0	0	0	0
			C Bimtek Pengembangan Pengujian Kimia Kosmetik	1	kalitrip	0	0	0	0	0	0	0
			D Bimtek Pengembangan Pengujian Kimia Obat Tradisional	1	kalitrip	0	0	0	0	0	0	0
			E Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai PDM pengujian Mikrobiologi	1	kalitrip	0	0	0	0	0	0	0
			F Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai PDM Kimia Pangan Olahan	1	kalitrip	0	0	0	0	0	0	0
			G Bimbingan Teknis Pengujian	5	kegiatan	0	0	0	0	1	1	1
			I Peningkatan Kompetensi	3	paket	0	0	0	1	1	0	0
			J Operasional Laboratorium	12	bulan	1	1	1	1	1	1	1
			K Rekalibrasi Peralatan	1	kalitrip	0	0	0	0	0	0	0
			L Pengadaan Suku Cadang dan Glassware	3	paket	0	0	0	0	0	0	1
			M Kalibrasi Eksternal Peralatan Laboratorium	3	paket	0	0	0	1	0	0	0
			PDD.001.056	Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja	A Forum Diseminasi hasil riset dan kajian Obat dan Makanan	1	kalitrip	0	0	0	0	0
B Konsultasi Sistem Mutu	1	kalitrip			0	0	0	0	0	1		
C Surveilans Laboratorium Pengujian oleh KAN BSN	1	kalitrip			0	0	0	0	0	0		
D Pertemuan Teknis KAN	1	kalitrip			0	0	0	0	0	0		
E Verifikasi Metode Analisis	5	paket			0	0	1	1	1	1		
F Uji Profisiensi/Uji Banding	5	paket			0	0	0	0	1	1		

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator triwulan I tahun 2023 antara lain adalah bimbingan teknis pengujian, peningkatan kompetensi, penyediaan operasional laboratorium, pengadaan suku cadang, konsultasi sistem mutu, verifikasi metode analisis, dan uji profisiensi/uji banding.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 141. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	274.317.400	144.953.131	52,84	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa efisiensi penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat dihitung karena data capaian indikator belum tersedia. Belum ada revisi anggaran selama triwulan I tahun 2023.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 142. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	- Jumlah anaerobic jar yang ada di laboratorium kurang (untuk pengujian Clostridia pada Obat Tradisional) akibat 3 anaerobic jar yang lama tidak dapat berfungsi (pengadaan tahun	- Antrian penggunaan alat GC MS untuk pengujian EG DEG beberapa komoditi - Terdapat permasalahan	- Batu timbangan yang dikalibrasi terbatas sehingga terdapat antrian penggunaan batu timbangan untuk melakukan verifikasi harian timbangan

Keterangan	Januari	Februari	Maret
	1970-an) - Lebih dari 20% instrumen di Laboratorium Kimia dan mikrobiologi berusia lebih dari 10 tahun - Alat - alat utama yang frekuensi penggunaannya sangat tinggi ataupun sudah rusak berat seperti Nitrogen evaporator, KCKT, GC MS, Fume Hood (lemari asam), Dissolution tester, AAS, TLC Densitometri Automatic Zone Reader dan Biosafety Cabinet - Belum tersedianya reagensia dan baku sehingga bimtek pangan diundur	pada ICP-MS - Jaringan pipa gas hydrogen yang menuju ke instrument GC FID perlu diregenerasi.	- Banyak ruangan yang suhu dan kelembabannya tidak memenuhi syarat
Rekomendasi Perbaikan	- Melakukan pembelian Anaerobic jar - Meminta rekomendasi dan penambahan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan alat laboratorium - Melakukan permintaan atau pembelian reagen dan baku pembeding	- Penggunaan instrumen GC MS dengan memperhatikan prioritas - Melakukan perbaikan instrumen ICP MS - Melakukan perbaikan aliran gas instrumen GC FID	- Menambah batu timbang - Mencari penyebab suhu dan kelembaban ruangan yang tinggi
Rencana Aksi	- Diusulkan pembelian Anaerobic jar - bersurat kepada P3OMN dan Rorenkeu untuk permohonan rekomendasi dan penambahan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan alat laboratorium - Pembelian reagen dalam status indent 3-4 bulan. Baku pembeding untuk keperluan pelatihan telah dikomunikasikan dengan P3OMNMN	- Telah dibuat pengaturan penggunaan instrumen GC MS dengan memperhatikan prioritas - Koordinasi dengan Ka Tim IT untuk install aplikasi anydesk - Koordinasi dengan teknisi ICP MS - Pengajuan ke bagian ke perlengkapan untuk perbaikan aliran gas instrumen GC FID	- Bersurat ke PPPOMN untuk bantuan batu timbang - Memastikan termohyrometer yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban dalam keadaan baik - Mengajukan permintaan pemasangan kaca film pada ruang timbang - Mengajukan perbaikan pintu ruang timbang - Mengajukan perbaikan AC
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	- Antrian pengujian parameter Clostridia pada Komoditi OT - Instrumen yang rusak atau tidak optimal penggunaannya - Belum tersedianya reagen dan baku	- Antrian penggunaan GC MS - ICP MS belum bisa digunakan untuk uji - Kebocoran gas pada GC FID	- Antrian penggunaan batu timbang untuk verifikasi harian timbangan - Suhu dan kelembaban ruangan tidak memenuhi syarat
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Februari: - Telah diterima balasan persetujuan rekomendasi dari P3OMN dan Rorenkeu untuk pengadaan alat-alat tersebut, namun menggunakan DIPA Balai yang dioptimalisasi - Sudah dilakukan permintaan baku kepada PPPOMN dan dilakukan pembelian reagen (inden)	Kondisi Maret: - Instrumen GC digunakan sesuai dengan prioritas sehingga tidak mengganggu kegiatan pengujian - Instrumen ICP MS sudah diperbaiki dan sudah bisa digunakan untuk dilakukan pengujian	
Status	Open	Open	Open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa target tahun 2022 telah tercapai, namun target tahun 2023 dan 2024 belum tercapai, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan dengan sarana dan prasarana laboratorium yang terbatas.

2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 143. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan I tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Pebruari	-	-	-	-
Maret	2,75	3	109,09	Memenuhi ekspektasi

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: *email, sharing folder, dashboard* BOC, Berita Aktual pada

Subsite Balai. Pemanfaatan *email* yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Pada triwulan I tahun 2023 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM sebesar 3 dengan capaian 109,09%, sudah **mencapai target** yang telah ditetapkan dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

- b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**
Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
- c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target renstra 2021-2024**

Tabel 144. Perbandingan Realisasi pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,75	3	109,09	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan I tahun 2023 **sudah mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Realisasi nilai 3 merupakan nilai maksimal, sehingga tidak perlu dilakukan revaluasi untuk menaikkan target, namun perlu upaya untuk mempertahankan capaian agar target renstra tahun 2024 tetap tercapai.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**
Realisasi indikator triwulan I tahun 2023 dari Pusat Data dan Informasi dapat dilihat sebagai berikut:

Pemutakhiran SIPT	Pemutakhiran SPIMKER	Pemanfaatan Email	Pemanfaatan Sharing folder	Pemanfaatan Dashboard BOC	Pemanfaatan Berita Aktual	Realisasi Indeks
3	3	3	3	3	3	3

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi triwulan I tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain:

- Melakukan *input* SIPT setiap bulan.
- Memutakhirkan SPIMKER tepat waktu

- meningkatkan akses *email* pegawai dengan mentautkan Absensi *Online* “SIKEMAH” dengan halaman *login email pom.go.id*, serta mengirim *email* pemberitahuan terkait kepegawaian kepada seluruh pegawai melalui *email pom.go.id* dengan permintaan untuk *reply*.
- Meningkatkan viewer berita aktual dari internal Balai dengan menautkan absen apel online dengan berita aktual terbaru yang telah diupload tim berita

Selama triwulan I tahun 2023 ditemukan banyak kendala pada pemanfaatan SIPT, namun target masih bisa tercapai. Perlu tetap dilakukan *monev* secara rutin setiap bulan untuk menjaga agar target tetap tercapai.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 145. Rencana Aksi pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
28 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C Pemeliharaan Peralatan Kantor	12 bulan	1	1	1	1	1	1
	CAN.001.051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 paket	0	0	0	0	0	0

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal adalah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pemeliharaan Peralatan Kantor. Pada triwulan I tahun 2023 hanya pengadaan printer yang selesai dilaksanakan, sedangkan pengadaan laptop dan PC belum dapat terealisasi karena terkendala belum siapnya sistem ecatalog dan penggunaan produk dalam negeri .

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 146. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	69.433.333	36.535.523	52,62	109,09	95 % (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Belum ada revisi anggaran di triwulan I tahun 2023.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 147. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	indeks Januari masih 2,2 karena nilai SIPT belum maksimal,	indeks pebruari masih 2,6 karena nilai SIPT belum maksimal,	Update dashboard BOC terkait indeks pemanfaatan SIPT tidak sesuai penghitungan manual
Rekomendasi Perbaikan	Memaksimalkan input sampling dan sarana	membuat surat ke pusdatin tembusan sestama dan deputi 1,2,3 untuk menyampaikan supaya cut off data input sipt di tanggal 10 bukan tanggal 1	melakukan crosscheck kepada pihak pusdatin
Rencana Aksi/Tindak Lanjut	melakukan informasi update dashboard sipt kepada ketua tim pada pertengahan bulan yang dapat diakses pada halaman insight https://sites.google.com/view/insightsby/	membuat surat ke pusdatin tembusan sestama dan deputi 1,2,3 untuk menyampaikan supaya cut off data input sipt di tanggal 10 bukan tanggal 1	melakukan crosscheck kepada pihak pusdatin
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	%Sarana : 44,68 %Sampling : 85,22	surat belum terkirim	%Sarana : 57,6 %Sampling : 110,65
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Februari : belum mencapai target, presentasi sampling dan sarana meningkat %Sarana : 64,02 %Sampling : 94,85	Kondisi Maret : penghitungan manual Telah mencapai target	%Sarana : 86,22 %Sampling : 110,65
Status	Open	close	close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target tahun 2022, 2023, dan 2024 telah tercapai, namun tidak dilakukan revisi target karena di tahun 2023 terdapat perubahan perhitungan terutama pada komponen pemanfaatan SIPT.

SASARAN STRATEGIS 11 Terkelolanya keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 148. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Pebruari	46	57,42	124,83	Tidak dapat disimpulkan
Maret	56	65,16	116,35	Memenuhi ekspektasi

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus :

$$(Nilai EKA \times 60\%) + (Nilai IKPA \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Terdapat perubahan cara perhitungan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang awalnya memuat 13 (tiga belas) indikator berubah menjadi 8 (delapan) indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Delapan (8) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Dispensasi SPM. Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi OM SPAN. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai EKA diperoleh dari aplikasi SMART.

Realisasi nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2023 adalah 65,16, diperoleh dari nilai IKPA 95,47 dan nilai EKA 44,95. Capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2023 **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 116,35% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 149. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	95,2	65,16	68,44	tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi nilai kinerja anggaran triwulan I tahun 2023 **belum mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi. Perlu diusulkan reuiu target untuk diturunkan di tahun 2024, karena pada indikator nilai kinerja anggaran ini terdapat 2 komponen penilaian yang berlawanan. Dimana jika penyerapan anggaran tinggi maka nilai IKPA akan tinggi, sedangkan bila penyerapan anggaran tinggi maka nilai efisiensi pada EKA pasti rendah. Setelah dilakukan perhitungan proyeksi, maka diperkirakan target tahun 2024 tidak akan bisa tercapai bila masih ada instruksi target penyerapan anggaran 99%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian nilai kinerja anggaran triwulan I tahun 2023 belum mencapai target triwulan I tahun 2023. Capaian nilai kinerja anggaran dipengaruhi oleh 1 capaian output dari 21 output yang belum mencapai target 13,83. Perlu memperhatikan lagi deviasi halaman III DIPA; penyerapan anggaran; belanja kontraktual; dan pengelolaan UP dan TUP yang belum mendapat poin 100. Perlu diupayakan peningkatan nilai IKPA hingga sempurna agar bisa menaikkan nilai NKA.

URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
		REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Nilai	100.00	81.77	98.62	84.89	100.00	95.95	100.00	97.94	95.47	100%	95.47
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
	Nilai Akhir	10.00	8.18	19.72	8.49	10.00	9.60	5.00	24.49			
	Nilai Aspek	90.89		95.89					97.94			

Nilai EKA triwulan I tahun 2023 adalah 44,95 dengan komponen nilai penyerapan 8,88; konsistensi 61,62; capaian RO 6,99; efisiensi 20; dan nilai efisiensi 100. Rendahnya penyerapan anggaran capaian RO dipengaruhi oleh kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat yang belum terlaksana sesuai rencana karena kesibukan para tokoh masyarakat.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 150. Rencana Aksi pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
29 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	B Penyusunan Laporan Keuangan dan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan bagi Bendahara	3 kali/trip	0	0	0	2	0	0
			G Workshop Pengadaan Barang/Jasa Badan POM	1 kali/trip	0	0	1	0	0	1
			J Reviu LK BMN Regional	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			I Pemusnahan	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			L Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM (Mataram)	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian indikator di triwulan I tahun 2023 hanya workshop pengadaan barang/jasa BPOM, namun demikian tetap dilakukan kegiatan lain antara lain melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas realisasi output, realisasi anggaran dan capaian IKU serta kendala dan solusi untuk mengatasi semua kendala. Selain itu juga telah dilakukan revisi halaman III DIPA tepat waktu dan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI sebelum tanggal 7 setiap bulan. Selain itu juga mengupayakan pengembalian dana UP/TUP seminimal mungkin atau habis. Setiap bulan juga telah dibahas berbagai cara konkrit untuk menaikkan realisasi RO (rincian output) supaya bisa melebihi target tanpa membutuhkan banyak biaya.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 151. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	20.105.261	20.105.261	100	116,35	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Di triwulan I banyak kegiatan yang dilakukan tanpa membutuhkan anggaran, dan belum dilakukan revisi anggaran untuk mendukung indikator NKA.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 152. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	proses pendaftaran user SAKTI membutuhkan waktu lebih lama dibanding tahun sebelumnya	Pengadaan seragam tidak dapat dilaksanakan karena harga seragam batik BPOM di ecatalog jauh lebih tinggi dari SBM seragam Surabaya. Telah dilakukan konsultasi ke DJA terkait SBM, namun SBM tersebut tidak boleh dilewati dan tidak diperbolehkan bila	terdapat deviasi (diatas 5%) pada belanja modal (53) dimana rencana lebih tinggi daripada penyerapan anggaran sebesar 21,15%

Keterangan	Januari	Februari	Maret
		hanya membeli atasan/bawahan saja (tidak 1 stel)	
Rekomendasi Perbaikan	Konsultasi secara intensif dengan KPPN	Mengganti pengadaan seragam batik dengan seragam khaki (selasa)	Perbaikan perencanaan penarikan belanja modal untuk triwulan 2
Rencana Aksi	Konsultasi secara intensif dengan KPPN	Mengganti pengadaan seragam batik dengan seragam khaki (selasa)	Perbaikan perencanaan penarikan belanja modal untuk triwulan 2
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Pendaftaran user SAKTI belum selesai	Pengadaan seragam belum terlaksana	deviasi penyerapan belanja modal sebesar 21,15%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Februari : user SAKTI sudah terdaftar semua dan sudah dapat mengajukan UP di akhir Januari	Maret : Penyusunan spek dan perencanaan pengadaan seragam khaki sudah dimulai	April : -
Status Tindak Lanjut	Close	close	open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan hasil laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target tahun 2022, 2023, dan 2024 belum tercapai. Sehingga dilakukan upaya untuk mengusulkan penurunan target tahun 2024.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.432784/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2022 sebesar Rp61.048.715.000,- (enam puluh satu milyar empat puluh depalan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah). Pada tanggal 27 Desember 2022 dilakukan revisi automatic adjusment/blokir dalam rangka penanganan pandemi covid 19 sebesar Rp.11.288.914.000,- (sebelas milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

Pengelolaan anggaran BBPOM di Surabaya senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Surabaya dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian **output** terhadap % capaian **input** (dalam laporan ini, capaian **input** yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 153. Tingkat Efisiensi Kegiatan

NO.	KEGIATAN	TE	KATEGORI
1.	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	-0,58	TIDAK EFISIEN
2.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	0,88	EFISIEN
3.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	-0,03	TIDAK EFISIEN
4.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	0,25	EFISIEN
5.	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0,00	EFISIEN
6.	Perangkat pengolah data dan komunikasi	5,99	TIDAK EFISIEN
7.	Layanan Umum	0	EFISIEN
8.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,88	TIDAK EFISIEN
9.	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Surabaya	0,56	EFISIEN
10.	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	15,04	TIDAK EFISIEN
11.	Desa Pangan Aman	2,65	TIDAK EFISIEN
12.	Pasar aman dari bahan berbahaya(Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	3,27	TIDAK EFISIEN
13.	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	-0,50	TIDAK EFISIEN
14.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	4,44	TIDAK EFISIEN
15.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	2,67	TIDAK EFISIEN
16.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	0,89	EFISIEN
17.	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	2,04	TIDAK EFISIEN
18.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	0,54	EFISIEN
19.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	0,56	EFISIEN
20.	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0	EFISIEN
21.	Layanan Perkantoran	0,07	EFISIEN

Pada triwulan I tahun 2023 BBPOM di Surabaya melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil 11 kegiatan tidak efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,58 (Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT) hingga 15,04 (Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak anggaran yang belum direalisasikan di triwulan I sehingga mempengaruhi tingkat efisiensi menjadi tidak efisien.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap sasaran strategis dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut :

- 1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
- 10) > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

Tabel 154. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis

	Sasaran Strategis	% Capaian Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kategori
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	87	106,67	0,23	Efisien
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	135,53	-	-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	51,60	-	-	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	78,91	108,35	0,37	Efisien
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	70,80	115,1	0,63	Efisien
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	91,28	113,58	0,24	Efisien
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	70,74	120	0,70	Efisien
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	77,41	-	-	-
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	100	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	52,8	-	-	-
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	100	116,35	0,16	Efisien

Diantara 11 sasaran strategis, terdapat 5 sasaran strategis yang tidak dapat dihitung efisiensinya karena nilai capaian kinerja belum diperoleh. Sedangkan 6 sasaran stregis lainnya telah efisien.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- i. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya” sebesar Rp100.484.442,-. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian obat dan makanan beserta sarana penunjangnya. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pertama adalah **efisien** karena capaian sasaran yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- ii. Pada sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp95.008.650,-. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi terkait obat dan makanan melalui media. Sasaran ini belum dapat dihitung efisiensinya dikarenakan belum ada capaian indikator. Capaian indikator baru diperoleh pada akhir tahun 2023.
- iii. Pada sasaran strategis ketiga yaitu “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp24.131.450,-. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis fasilitator pendampingan UMKM Obat tradisional. Sasaran ini belum dapat dihitung efisiensinya dikarenakan belum ada capaian indikator. Capaian indikator baru diperoleh pada akhir tahun 2023.
- iv. Pada sasaran strategis keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 491.562.404,-. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi, koordinasi/advokasi dengan instansi terkait, tindak lanjut pengawasan pengaduan, pendampingan UMKM (Gempur Jatim). Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana dan pelayanan publik, secara keseluruhan target sasaran ini dapat tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keempat adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- v. Pada sasaran strategis kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp1.825.775.048,-. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan

kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat dan pelaksanaan advokasi dalam rangka intervensi sekolah, desa dan pasar. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas KIE ditunjukkan dengan tercapainya semua target 4 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kelima adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

- vi. Pada sasaran strategis keenam yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp89.018.692,-. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengujian sampel obat dan makanan dan sarana prasarana penunjang pengujian seperti reagensia, media, baku pembanding, dll. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keenam adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan lebih tinggi dari anggaran yang dikeluarkan.
- vii. Pada sasaran strategis ketujuh yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp349.898.428,-. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan investigasi, penindakan, pemberkasan, koordinasi, serta peningkatan kompetensi penyidik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ketujuh adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- viii. Pada sasaran strategis kedelapan yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp5.068.972.455,-. Anggaran yang dipergunakan pada sasaran ini merupakan anggaran dengan proporsi terbesar dibandingkan anggaran pada sasaran lainnya. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, pertemuan koordinasi/advokasi, pertemuan dalam rangka RB, penyusunan lapkin, laptah, renstra, dan rapat evaluasi. Tingkat efisiensi belum dapat dihitung karena capaian kinerja belum tersedia, dan baru tersedia di akhir tahun 2023.
- ix. Pada sasaran strategis kesembilan yaitu “Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp3.690.000,-. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang berdampak pada

tercapainya target sasaran. Tingkat efisiensi belum dapat dihitung karena capaian kinerja belum tersedia, dan baru tersedia di akhir tahun 2023.

- x. Pada sasaran strategis kesepuluh yaitu “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp181.488.654,- Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemenuhan sarana prasarana untuk jaminan mutu hasil pengujian, peningkatan kompetensi penguji, koordinasi laboratorium, pemeliharaan alat pengolah data dan alat laboratorium, dan pengadaan sarana prasarana kantor. Tingkat efisiensi belum dapat dihitung karena capaian kinerja belum tersedia, dan baru tersedia di akhir tahun 2023.
- xi. Pada sasaran strategis kesebelas yaitu “Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp20.105.261,-. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kegiatan. Anggaran yang dipergunakan memang sangat kecil dan belum berdampak nyata terhadap terkelolanya keuangan secara akuntabel ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kesebelas adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan lebih tinggi dari anggaran yang dikeluarkan.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada Triwulan I tahun 2023 BBPOM di Surabaya melaksanakan 11 sasaran strategis dengan 29 indikator. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator pada triwulan I tahun 2023, telah dilakukan 22 kegiatan utama.

1. Dari 11 sasaran strategis yang dievaluasi, hanya 6 sasaran strategis yang dapat dievaluasi. Dari 6 sasaran strategis semuanya memperoleh capaian “Memenuhi Ekspektasi”.
2. Capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :
 - 1) Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 106,67% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2023;
 - 2) Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedua pada triwulan I tahun 2023, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya;
 - 3) Belum ada capaian indikator sasaran strategis ketiga pada triwulan I tahun 2023, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya;
 - 4) Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 108,35% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2023;
 - 5) Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 115,10% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam

- meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2023;
- 6) Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 113,58% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2023;
 - 7) Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 120% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2023;
 - 8) Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal;
 - 9) Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesembilan, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal;
 - 10) Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
 - 11) Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 116,35% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel pada triwulan 1 tahun 2023.
3. Pada triwulan I tahun 2023 BBPOM di Surabaya melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan 11 kegiatan tidak efisien dan semua sasaran efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,58 (Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT) hingga 15,04 (Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman). Sedangkan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) 6 sasaran diperoleh bervariasi antara 0,16 hingga 0,70. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2023 antara 96,33% sampai dengan 220,13%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” disebabkan karena Sistem ebpom untuk proses SKI bermasalah sehingga tidak dapat diakses pada waktu tertentu padahal sudah banyak pengajuan yang masuk. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik”, hal ini disebabkan karena adanya program inovasi pendampingan UMKM pangan, obat tradisional, dan kosmetik sehingga capaian yang diperoleh sangat tinggi menyesuaikan dengan banyaknya permintaan dari stakeholder.

4.2 Saran

1. Dari 20 indikator kinerja yang dapat dievaluasi, masih terdapat 1 indikator yang belum mencapai target triwulan I tahun 2023 yaitu Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, oleh karena itu akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berkomunikasi dengan Pusdatin terkait kendala tersebut
 - b. Menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE
 - c. Melakukan pengaturan tugas agar meminimalkan tugas ganda
 - d. Berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut
 - e. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB
 - f. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB dan CPOTB
 - g. Melaksanakan coaching dan mentoring terhadap petugas baru
2. Masih ada 5 indikator yang tidak dapat disimpulkan dengan capaian diatas 120% terhadap target triwulan I yaitu indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik; Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman; Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas; Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar; dan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut, bila capaian triwulan 2 masih tidak dapat disimpulkan, maka akan dilakukan reuiu target RAPK bulan Juli hingga Desember 2023.



LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran I

1. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Surabaya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Surabaya
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 20 Desember 2022
Pihak Pertama

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Surabaya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85.7
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78.55
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	65
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.38


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	112
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	37
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	24
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	89.7
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	85.6
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.5
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.75
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95.2

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia


Anggaran :
Rp.
61,048,715,000.00

Surabaya, 20 Desember 2022
Pihak Pertama

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

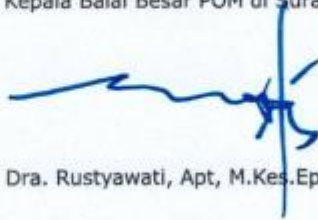
No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	595.329.600,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	289.803.360,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	148.832.400,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	149.292.640,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	63.394.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												81	280.539.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												85.7	223.620.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												78.55	209.320.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												91	64.653.500,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	46.830.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	283.620.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	525.300.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	452.771.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	792.959.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT						4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	64.653.500,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4.3	10.8	31.1	50.8	59.5	70.6	76.5	83.8	89.1	91.3	96	65	315.156.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	18.943.840.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0.8	2.1	17.1	32.1	39.6	47.1	57.1	62.1	72.1	82.2	95.5	112	811.162.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	10	20	31.7	35	42.8	54.4	67.8	77.8	80	90	37	1.154.484.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	11	20	27	35	45	55	65	75	85	95	100	744.162.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	11	20	30	38	45	55	65	75	85	95	100	439.096.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	2	6.8	12.1	14.3	18.5	26.5	33.4	37.7	50.7	59.1	66.8	72	1.312.841.000,00
23.	Indeks RB UPT												89.7	28.786.178.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												85.6	90.810.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.5	246.648.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												88	2.835.300.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	514.075.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	46	56	61	63	66	67	69	71	72	74	95.2	88.500.000,00	
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0.8	1.7	13.3	41.1	52.9	59.5	72.9	72.9	85.4	97.9	100	24	575.545.000,00
Total												61.048.715.000,00		

Surabaya, 20 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Surabaya



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

Jl. Karangmenjangan No.20 Surabaya 60286
Telp. (031) 5020575, 5022815, 5048833 | Fax. (031) 5015486

E-mail : bpom_surabaya@pom.go.id ; ulpk_surabaya@pom.go.id | website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA
NOMOR HK.02.02.15A.15A5.06.22.0174 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.15A.15A5.12.21.3792 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Juli 2022
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
 SURABAYA NOMOR
 HK.02.02.15A.15A5.07.22.0174 TAHUN
 2022
 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI
 BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 DI SURABAYA TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
 SURABAYA TAHUN 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	6. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,7

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	kerja BBPOM di Surabaya	8.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,55
		9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
		12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64
		15.	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya	4,51
		16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	65
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	17.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,38

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	112
		19.	Jumlah desa pangan aman	37
		20.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	24
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	21.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	23.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	24.	Indeks RB BBPOM di Surabaya	89,7
		25.	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85,6
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	26.	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,5
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
		28.	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	95,2


KAPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
RUSTYAWATI

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2023 BALAI BESAR POM DI SURABAYA

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%) $e=(d/cx100)$	Pagu	Realisasi	Capaian $h=(g/fx100)$
A	b	c	D	e	f	g	h
1.	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	3	21,43	394.553.000	203.393.428	51,55
2.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	16754	4616	27,55	916.627.000	134.677.600	14,69
3.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	25,00	1.143.993.000	293.537.453	25,66
4.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	80	34	42,50	280.539.000	95.008.650	33,87
5.	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	37,50	170.525.000	85.654.400	50,23
6.	Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	0	25,00	97.475.000	3.486.000	3,58
7.	Layanan Umum	1	1	25,00	84.690.000	0	0,00
8.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	25,00	2.822.966.000	244.833.971	8,67
9.	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Surabaya	9	3	33,33	918.288.000	196.415.000	21,39
10.	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	112	0	22,82	811.162.000	11.541.544	1,42
11.	Desa Pangan Aman	37	0	21,67	1.154.484.000	68.558.202	5,94
12.	Pasar aman dari bahan berbahaya	24	0	18,33	575.545.000	24.720.000	4,30
13.	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	64355	3400	5,28	19.153.160.000	2.026.051.302	10,58
14.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	98	0	68,46	315.156.000	39.670.000	12,59
15.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	942	146	15,50	878.192.000	37.057.831	4,22
16.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	2451	438	17,87	1.488.324.000	140.979.551	9,47
17.	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	100	55	55,00	63.394.000	11.465.750	18,09
18.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	408	93	22,79	460.701.000	68.256.750	14,82
19.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	724	203	28,04	902.629.000	162.214.955	17,97

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
	Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM						
20.	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	50,00	12.334.000	0	0,00
21	Layanan Perkantoran	1	1	25,00	28.404.038.000	6.666.633.925	23,47

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TRIWULAN I TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan	Output	Input	IE	TE	Capaian TE
		%	%			
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	21,43	51,55	0,42	-0,58	75 %
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	27,55	14,69	1,88	0,88	88 %
3	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	25	25,66	0,97	-0,03	75 %
4	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	42,5	33,87	1,25	0,25	95 %
5	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	50,23	50,23	1,00	0,00	100 %
6	Perangkat pengolah data dan komunikasi	25	3,58	6,99	5,99	75 %
7	Layanan Umum	25	0,00	-	-	-
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	25	8,67	2,88	1,88	75 %
9	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Surabaya	33,33	21,39	1,56	0,56	92 %
10	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	22,82	1,42	16,04	15,04	75 %
11	Desa Pangan Aman	21,67	5,94	3,65	2,65	75 %
12	Pasar aman dari bahan berbahaya	18,33	4,30	4,27	3,27	75 %
13	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	5,28	10,58	0,50	-0,50	75 %
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	68,46	12,59	5,44	4,44	75 %
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	15,5	4,22	3,67	2,67	75 %
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	17,87	9,47	1,89	0,89	88 %
17	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	55	18,09	3,04	2,04	75 %
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	22,79	14,82	1,54	0,54	92 %
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	28,04	17,97	1,56	0,56	92 %
20	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	50	0,00	-	-	-
21	Layanan Perkantoran	25	23,47	1,07	0,07	100 %

LAMPIRAN 2. KERTAS KERJA

1. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN SAMPLING DAN PENGUJIAN

No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	s.d Maret										RAPK s.d Maret (Jan-Mar)				
				Jumlah sampling Maret	TMK			Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji	pembilang	Penyebut	capaian	
					TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak			TMK Label/ Penandaan	MS							TMS*
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan																		
1	Obat	Random	Surabaya	120	0	0	0	5	120	86	86	0	0	34	86			
			Kabupaten Kediri	9	0	0	0	0	9	8	7	1	1	1	8			
			Kabupaten Jember	10	0	0	0	0	10	8	8	0	0	2	8			
			TOTAL	139	0	0	0	5	139	102	101	1	1	37	102			
			Surabaya	45	0	0	0	0	45	33	33	0	0	12	33			
			Kabupaten Kediri	4	0	0	0	0	4	3	3	0	0	1	3			
		Targeted	Kabupaten Jember	7	0	0	0	0	7	5	5	0	0	2	5			
			TOTAL	56	0	0	0	0	56	41	41	0	0	15	41			
			TOTAL RANDOM DAN TARGETED	195	0	0	0	5	195	143	142	1	1	52	143			
			Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar															
2	Obat Tradisional	Random	Surabaya	106	0	0	0	4	106	73	58	15	15	33	73			
			Kabupaten Kediri	6	0	0	0	1	6	3	2	1	1	3	3			
			Kabupaten Jember	11	0	0	0	0	11	7	4	3	3	4	7			
			TOTAL	123	0	0	0	5	123	83	64	19	19	40	83			
			Surabaya	41	0	0	0	0	41	20	16	4	4	21	20			
			Kabupaten Kediri	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2			
		Targeted	Kabupaten Jember	3	0	0	0	1	3	2	2	0	0	1	2			
			TOTAL	46	0	0	0	1	46	24	20	4	4	22	24			
			TOTAL RANDOM DAN TARGETED	169	0	0	0	6	169	107	84	23	23	62	107			
			Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar															
3	Obat Kuasi	Random	Surabaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Kabupaten Kediri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Kabupaten Jember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Surabaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Kabupaten Kediri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Targeted	Kabupaten Jember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			TOTAL RANDOM DAN TARGETED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar															
4	Suplemen Kesehatan	Random	Surabaya	24	0	0	0	0	24	16	16	0	0	8	16			
			Kabupaten Kediri	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0			
			Kabupaten Jember	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1			
			TOTAL	26	0	0	0	0	26	17	17	0	0	9	17			
			Surabaya	12	0	0	0	0	12	10	10	0	0	2	10			
			Kabupaten Kediri	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1			
		Targeted	Kabupaten Jember	3	0	0	0	0	3	1	1	0	0	2	1			
			TOTAL	16	0	0	0	0	16	12	12	0	0	4	12			
			TOTAL RANDOM DAN TARGETED	42	0	0	0	0	42	29	29	0	0	13	29			
			Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar															
5	Kosmetik	Random	Surabaya	205	0	0	0	1	205	145	143	2	2	60	145			
			Kabupaten Kediri	13	0	0	0	2	13	8	8	0	0	5	8			
			Kabupaten Jember	20	0	0	0	3	20	13	12	1	1	7	13			
			TOTAL	238	0	0	0	6	238	166	163	3	3	72	166			
			Surabaya	88	0	0	0	0	88	55	55	0	0	33	55			
			Kabupaten Kediri	5	0	0	0	1	5	4	4	0	0	1	4			
		Targeted	Kabupaten Jember	10	0	0	0	1	10	7	7	0	0	3	7			
			TOTAL	103	0	0	0	2	103	66	66	0	0	37	66			
			TOTAL RANDOM DAN TARGETED	341	0	0	0	8	341	232	229	3	3	109	232			
			Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar															
6	Rokok	Targeted	Surabaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Kabupaten Kediri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Kabupaten Jember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Surabaya	455	0	0	0	10	455	320	303	17	17	135	320	303	320	94,69%
			Kabupaten Kediri	29	0	0	0	3	29	19	17	2	2	10	19	17	19	89,47%
		Kabupaten Jember	42	0	0	0	3	42	29	25	4	4	13	29	25	29	86,21%	
		TOTAL	526	0	0	0	16	526	368	345	23	23	158	368	345	368	93,75%	
		Targeted	Surabaya	186	0	0	0	0	186	118	114	4	4	68	118	114	118	96,61%
			Kabupaten Kediri	12	0	0	0	1	12	10	10	0	0	2	10	10	10	100,00%
Kabupaten Jember	23		0	0	0	2	23	15	15	0	0	8	15	15	15	100,00%		
TOTAL	221		0	0	0	3	221	143	139	4	4	78	143	139	143	97,20%		
TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK																		
1	Pangan (selain Fortifikasi)	Random	Surabaya	179	0	0	1	9	178	93	88	5	6	85	94	88	94	93,62%
			Kabupaten Kediri	14	0	0	0	0	14	7	7	0	0	7	7	7	7	100,00%
			Kabupaten Jember	21	0	0	0	0	21	10	10	0	0	11	10	10	10	100,00%
			TOTAL	214	0	0	1	9	213	110	105	5	6	103	111	102	110	80,77%
			Surabaya	67	0	0	0	1	67	52	42	10	10	15	52	42	52	80,77%
			Kabupaten Kediri	6	0	0	0	0	6	6	5	1	1	0	6	5	6	83,33%
		Targeted	Kabupaten Jember	4	0	0	0	0	4	4	2	2	0	4	2	4	4	50,00%
			TOTAL	77	0	0	0	1	77	62	49	13	13	15	62			
			TOTAL RANDOM DAN TARGETED	291	0	0	1	10	290	172	154	18	19	118	173			
			Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar															
2	Fortifikasi	Targeted	Surabaya	55	0	0	0	0	55	55	50	5	5	5	55	50	55	90,91%
			Kabupaten Kediri	8	0	0	0	0	8	8	7	1	1	0	8	7	8	87,50%
			Kabupaten Jember	5	0	0	0	0	5	5	1	4	0	5	1	5	20,00%	
			TOTAL	68	0	0	0	0	68	68	58	10	10	0	68			
			Random	214	0	0	1	9	213	110	105	5	6	103	111			
			Targeted	145	0	0	0	1	145	130	107	23	23	15	130			
		TOTAL	359	0	0	1	10	358	240	212	28	29	118	241				

2. INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU

-

3. INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

-

4. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

-

5. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

-

6. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN (98,02)

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Januari		Februari		Maret		Total		RAPK s.d TW I (Jan - Mar)			
			Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)	
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakannya oleh UPT	Obat	1	1	10	8	10	19	21	28	28	21	133,333333	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	1	4	17	17	12	8	30	29	29	30	96,6666667	
		Suplemen Kesehatan	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	100	
		Kosmetik	2	2	3	3	5	5	10	10	10	10	100	
		Pangan	4	6	15	14	28	26	47	46	46	47	97,87234043	
		Total	8	13	46	43	55	58	109	114	114	109	104,59	
		Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakannya oleh UPT	Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	3	3	2	2	3	3	8	8	8	8	100	
		Suplemen Kesehatan	2	1	1	2	0	0	3	3	3	3	100	
		Kosmetik	3	1	0	2	2	2	5	5	5	5	100	
		Pangan	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	100	
		Total	9	6	3	6	5	5	17	17	17	17	100,00	
		Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakannya oleh Pusat / UPT lain	Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		Kosmetik	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	100	
		Pangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		Total	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	100,00	
		Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakannya oleh UPT	Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	100	
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		Kosmetik	2	2	0	0	0	0	2	2	2	2	100	
		Pangan	2	2	1	1	2	1	5	4	4	5	80	
		Total	5	4	1	2	2	1	8	7	7	8	87,50	
		Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
TOTAL			23	24	50	51	62	64	135	139		98,02		

7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER (79,39)

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	Januari		Februari		Maret		Total		RAPK s.d TW I (Jan - Mar)		
			Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	1	3	8	10	19	8	28	21	21	28	75
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	5	3	17	5	8	3	30	11	11	30	36,6666667
		Suplemen Kesehatan	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	100
		Kosmetik	2	2	3	2	5	1	10	5	5	10	50
		Pangan	5	6	14	10	26	13	45	29	29	45	64,4444444
		Total	13	14	43	27	58	26	114	67	67	114	58,77
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Pangan	1	0	1	1	4	5	6	6	6	6	100
		Total	1	0	1	1	4	5	6	6	6	6	100,00
TOTAL			14	14	44	28	62	31	120	73		79,39	

8. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU (95,36)

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	Januari		Februari		Maret		Total			RAPK s.d TW I (Jan - Mar)					
			Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)			
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	759	759	709	719	719	651	926	926	897	2404	2404	2257	2257	2404	93,89
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	631	631	598	658	658	658	810	810	776	2099	2099	2032	2032	2099	96,81
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	33	33	33	44	44	44	33	33	33	110	110	110	110	110	100,00
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	3	3	3	100,00
Total			1426	1423	1340	1421	1424	1356	1769	1769	1706	4616	4616	4402	4402	4616	95,36

9. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (69,89)

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	Januari			Februari			Maret			Total			RAPK s.d TW I (Jan - Mar)			
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Industri Farmasi (IF)	38	14	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0				
2	Industri Bahan Baku Obat	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	12		0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	2	1				
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) (Target gabung dengan IOT)	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	67		3	1	2	3	3	0	1	1	0	7	5	2				
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15		0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0				
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Target SK)	6		0			0			1	1	0	1	1	0				
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi (Target gabung dengan IOT)	5		0			0			0	0	0	0	0	0				
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Masuk target SK)	14		0			0			0	0	0	0	0	0				
11	Industri Kosmetik	86		0			8	5	3	3	3	0	11	8	3				
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik (Masuk dalam target Industri Kosmetika)	10		0			0			0			0	0	0				
13	Industri Pangan	900		294	10	7	3	18	12	6	38	26	12	66	45	21			
14	Industri Rumah Tangga Pangan Surabaya	28286		408	1	0	1	0			0		1	0	1	93	65	28	69,89

10. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI (75,37)

No	Sarana Distribusi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	Januari			Februari			Maret			Total			RAPK s.d. TW 1 (Jan - Mar)			
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)		86	6	6	0	11	11	0	6	5	1	23	22	1	23	22	1	
2	Apotek		41	3	2	1	2	1	1	2	0	2	7	3	4	7	3	4	
3	Toko Obat		16	0			0	0	0	2	1	1	2	1	1	2	1	1	
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)		28	1	1	0	3	2	1	1	0	1	5	3	2	5	3	2	
5	Rumah Sakit (RS)		45	1	1	0	3	3	0	4	4	0	8	8	0	8	8	0	
6	Puskemas		36	2	1	1	4	3	1	1	1	0	7	5	2	7	5	2	
7	Klinik		39	0			2	1	1	3	1	2	5	2	3	5	2	3	
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)		1	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan		1	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	673	141	6	3	3	30	14	16	29	24	5	65	41	24	65	41	24	
11	Fasilitas Distribusi suplemen kesehatan	675	87	4	4	0	14	13	1	5	5	0	23	22	1	23	22	1	
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	302	113	13	8	5	13	11	2	8	6	2	34	25	9	34	25	9	
13	Klinik Kecantikan (Penotifikasi dan Importir)	275	31	0			1	1	0	7	6	1	8	7	1	8	7	1	
14	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	1120	59	1	1	0	0	0	0	15	13	2	16	14	2	16	14	2	
	Surabaya	2770	724	37	27	10	83	60	23	83	66	17	203	153	50	203	153	50	

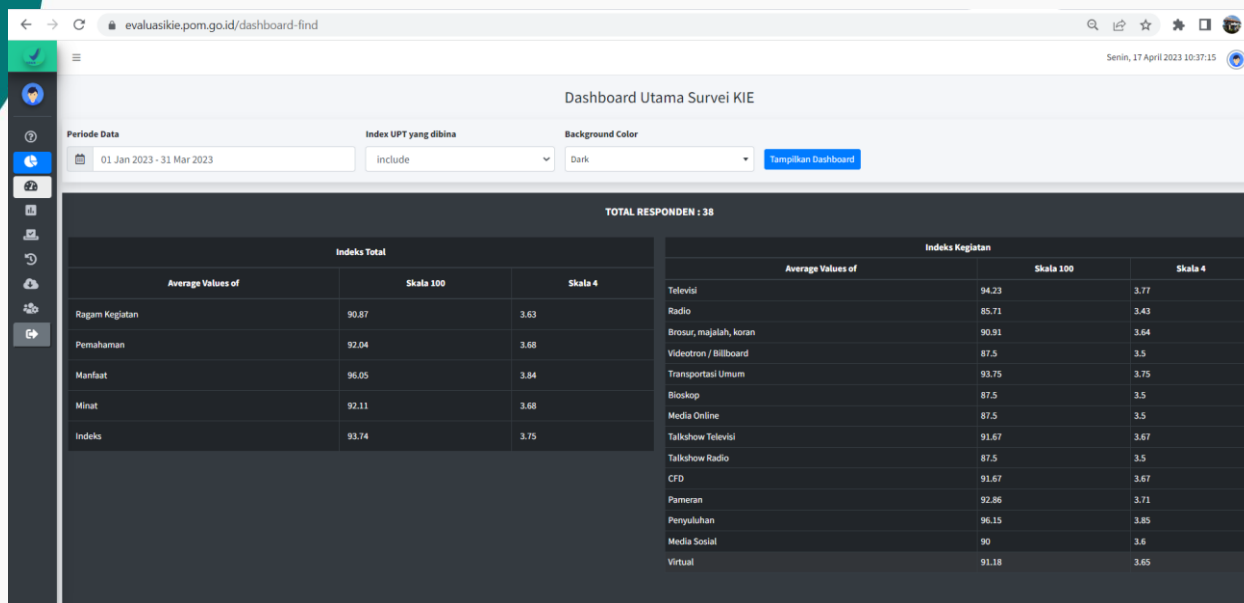
11. Indeks Layanan Publik BPOM

-

12. PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK (68,46)

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d, tahun N	JLATIF
								Mar
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	8	8	10
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM	20%	30%	Maret-April			20
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan	40%	70%	Maret-Oktober			40
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-			0
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan			0
Total Progres								70
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang	10%	10%	Januari	13	13	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor	40%	50%	Februari-Maret			40
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-			15,38
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November			0
Total Progres								65,38
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	77	77	10
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			20
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September			40
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-			0
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember			0
Total Progres								70
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						98	98	68,46

13. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN (93,74)



14. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)			Total progres
					Januari	Februari	Maret	
1 Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	Jan - April	36,00	112,00	0,00	0,00	6,67	6,67
2 Sosialisasi keamanan pangan (176)	10,00	Maret - April			8,00	0,00	0,00	8,00
3 Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah (36)	15,00	April - Juni			0,00	0,00	0,00	0,00
4 Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan (36)	10,00	April - Nov			0,00	0,00	0,00	0,00
5 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15,00	Juli - Sept			0,00	0,00	0,00	0,00
- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah					0,00	0,00	0,00	0,00
- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah					0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman (36)	20,00	Agustus - Nov	0,00	0,00	0,00	0,00		
7 Pengawasan (76)	10,00	Okt - Des	2,50	0,13	5,53	8,16		
Total skor			36,00	112,00	10,50	0,13	12,19	22,82

15. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)			Total
					Januari	Februari	Maret	
1 Advokasi Kelembagaan Desa (6 kab/kota)	20,00	Januari-April	9	37	0	0	6,67	6,67
2 Pengadaan paket informasi	5,00	Januari-April			0	0	5	5
3 Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) (9 desa)	15,00	April-Juli			0	0	0	0,00
4 Bimtek Komunitas sekaligus survei ((9 desa)	15,00	Mei-Oktober			0	0	0	0,00
5 Fasilitas Keamanan Pangan (9 desa)	10,00	Juni-November			0	0	0	0,00
6 Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan (Pre : 5%; Post 5%)	10,00	Mei-Oktober - Post Nov			0	0	0	0,00
7 Monitoring dan Evaluasi	15,00	November-Desember			0	0	0	0
8 Pengawasan (13+9)	10,00	Juni-Desember			0	4,55	5,45	10,00
Total	100	0	9	37	0	4,55	17,12	21,67

16. JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)			Total
					Januari	Februari	Maret	
1 Advokasi	20,00	Januari-April	6	24	0,00	0,00	6,67	10,00
2 Survei Pasar	5,00	Jan			0,00	0,00	1,67	2,50
3 Bimtek Pengelola Pasar + Materi	15,00	April-Mei			0,00	0,00	0,00	5,00
4 Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1	20,00	April			0,00	0,00	0,00	0,00
5 Penyuluhan	5,00	Juni-Juli			0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kampanye	5,00	Juni-Juli			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 2	20,00	September- Oktober			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Lomba Pasar Aman	10,00	Des			0,00	10,00	0,00	10,00
Total	100,00		6	24	0,00	10,00	8,33	27,50

17. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SAMPEL OBAT DAN MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

No	Bulan	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1	Januari	2451	146	Benar	2451	23	Benar	3,45
2	Pebruari	2451	413	Benar	2451	171	Benar	11,91
3	Maret	2451	641	Benar	2451	489	Benar	23,05

No	Bulan	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1	Januari	1042	82	Benar	1042	0	Benar	3,93
2	Pebruari	1042	144	Benar	1042	76	Benar	10,56
3	Maret	1042	301	Benar	1042	240	Benar	25,96

18. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KEBERHASILAN PENYIDIKAN

Tahapan	Maret										
	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
SPDP	9	3	3		1,00		0,15	15,00%	43,33%	50,00%	21,67%
Tahap I					0,00	0,50	0,4	13,33%			
P21					0,00	0,50	0,3	10,00%			
Tahap II				3	0,00	0,50	0,15	5,00%			
Total			3	3							

19. INDEKS RB BBPOM DI SURABAYA

20. NILAI AKIP

21. INDEKS PROFESIONALITAS ASN

22. PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP

23. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI UPT YANG OPTIMAL (3)

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email			
	TW I		
	Januari	Febuari	Maret
total_akun_individu	139	139	138
total_akun_unit	1	1	1
total_individu_login	135	137	138
total_individu_aktif	135	137	138
total_unitbalai_aktif	1	1	1
Aspek Login (%)	29,14	29,57	30
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	29,14	29,57	30
Perhitungan (%)	98,28	99,14	100
Perhitungan per TW	98,28	98,71	99,14
Nilai Indeks	3	3	3

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC			
	TW I		
	Januari	Febuari	Maret
Aktifitas			
Login BOC	40	40	40
Akses BCC	60	60	60
Total	100	100	100
Perhitungan per TW	100	100	100
Nilai Indeks Per TW	3	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Sharing Folder			
	TW I		
	Januari	Febuari	Maret
Aktifitas			
Jumlah Akses	125	242	276
Perhitungan	125	183,5	214,33
Nilai Indeks	3	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual			
	TW I		
	Januari	Febuari	Maret
Jumlah Upload	10	10	13
Jumlah Viewer	1732	1374	2134
Perhitungan Rata2 Berita	10	10	11
Perhitungan Rata2 Pengunjung	173,2	155,3	158,79
Indeks Per TW	3	3	3

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER			
	TW I		
	Januari	Febuari	Maret
Aktifitas			
Jumlah Entry	46	59	50
Jumlah Verifikasi	46	59	50
Perhitungan	100	100	100
Perhitungan per TW	100	100	100
Nilai Indeks per TW	3	3	3
Komposit SPIMKER (20%)	0,6	0,6	0,6

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT			
	Januari	Febuari	Maret
Penilaian			
% Sarana	44,68	64,02	86,22
% Sampling	85,22	94,85	110,65
% Pengujian			
Rata-Rata	64,95	79,44	98,44
Indeks per Bulan	1	2	3
Komposit SIPT	0,8	1,6	2,4

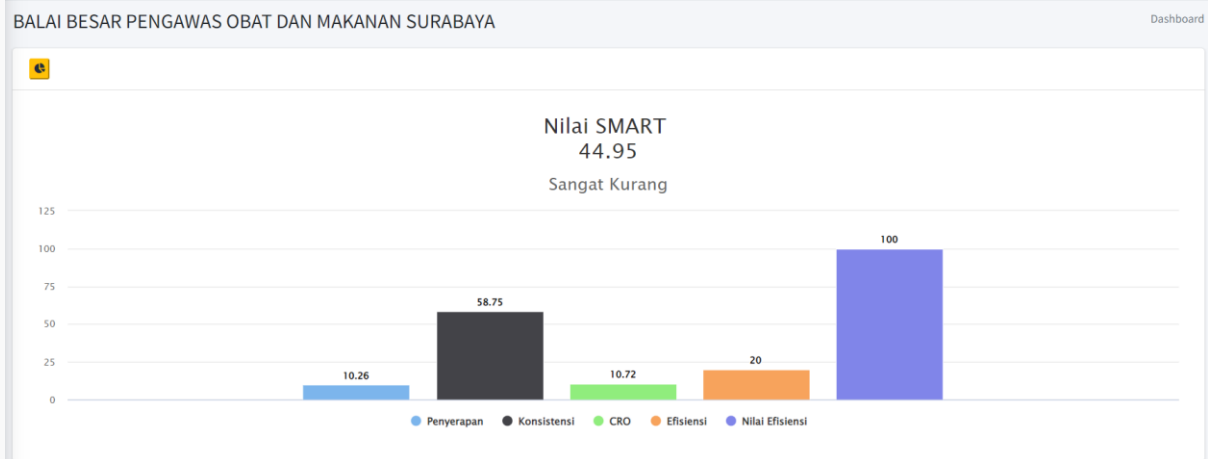
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi			
	Januari	Febuari	Maret
Indeks			
Indeks Pemanfaatan	3	3	3
Indeks Pemutakhiran	1,4	2,2	3
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,2	2,6	3

24. NILAI KINERJA ANGGARAN

Nilai IKPA (95,88)

URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
		REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Nilai	100.00	81.77	98.62	84.89	100.00	100.00	100.00	97.94	95.88	100%	95.88
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
	Nilai Akhir	10.00	8.18	19.72	8.49	10.00	10.00	5.00	24.49			
	Nilai Aspek	90.89		96.70					97.94			

Nilai EKA (44,95)



Nilai NKA : $(95,88 \times 40\%) + (44,95 \times 60\%) = 64,58$